

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Fenomena koalisi antarpolitis sudah mulai kelihatan sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 maupun setelah hasil Pemilu Legislatif diumumkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) melalui *Quick Count* tanggal 10 April 2009. Fenomena koalisi antar partai politik dalam upaya menjaring calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia tahun 2009-2014 ini menjadi menarik karena banyaknya partai politik yang berbondong-bondong mengukung salah satu kandidat atau pasangan terutama pada pasangan yang berhasil memenangkan peringkat pertama pada hasil Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2009 yang lalu. Dimana berdasarkan hasil *quick count* dari Lembaga Survei Indonesia maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 Partai Demokrat berhasil memenangkan atau menduduki nomor pertama.

Menurut Bambang Eka Wijaya (BEW) mengatakan koalisi ini cenderung mengesampingkan aspirasi konstituen partai di basis massa (Lampung Post, 19 Februari 2008). Janganlah banyak berharap terhadap koalisi taktis ini karena koalisi model ini sangat tidak konsisten untuk berpikir dan bertindak dalam memenuhi harapan-harapan rakyat. Lantas bagaimana dengan koalisi yang dibangun oleh partai politik dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2009-2014? Melihat perkembangan dan pendapat para pakar politik yang bertebaran di media massa, ada kecenderungan koalisi partai politik yang terbentuk sekarang ini lebih cenderung bersifat taktis.

Media massa memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan politik karena media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat (Firmanzah, 2007 : 43). Cakupan (*coverage*) yang luas dalam masyarakat membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkomunikasikan program kerja, pesan politik, pembentukan image partai atau seseorang. Media yang memiliki cakupan luas ini dapat berupa koran, majalah, TV, radio dan internet. Oleh karena itu tidak dipungkiri lagi bahwa media massa memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam pemilihan capres/cawapres RI 2009-2014. Orang yang sebelumnya jarang mengikuti perkembangan politik melalui media massa tiba-tiba membaca satu atau dua penerbitan sekaligus setiap harinya dan masih juga menyimak berita dan *talk show* melalui radio, televisi atau internet guna mengikuti program (platform) partai atau kandidat di mana posisi partai atau kandidat terkait dengan persoalan-persoalan pelik yang dihadapi bangsa, bagaimana jalannya kampanye, bagaimana hasil sementara pemilihan, dan bagaimana sosok serta penampilan para kandidat. Komunikasi memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun segmen kehidupan manusia lainnya. Dalam menyebarkan pesan (*message*) kepada masyarakat umum, komunikasi memiliki alat yang ampuh. Dulu, alat itu hanya berupa barang cetakan yang sekarang disebut media cetak. Akan tetapi sejak abad 19 muncul alat komunikasi yang disebut media elektronik, yakni radio dan televisi. Dalam perspektif komunikasi, kedua jenis media tersebut sering disebut sebagai media massa (Hikmat, 2010: 63)

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiyah berarti penyiaran secara tercetak

atau publikasi secara dicetak (*printed publications*). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran dan televisi siaran sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak yakni surat kabar, majalah dan buletin kantor berita.

Seperti diketahui bahwa ciri-ciri komunikasi massa yakni komunikasi dengan menggunakan media massa adalah prosesnya berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan dan komunikannya heterogen. Ciri-ciri tersebut dipenuhi baik oleh media massa cetak surat kabar dan majalah maupun media massa elektronik radio dan televisi. Kendatipun demikian antara media massa cetak dan media massa elektronik itu terdapat perbedaan yang khas yakni pesan-pesan yang disiarkan oleh media massa elektronik diterima oleh khalayak hanya sekilas dan khalayak harus selalu berada di depan pesawat televisi. Sedangkan pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat diulangkaji dan dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada tiap kesempatan. Ciri-ciri khas itulah yang menyebabkan pesan-pesan yang disiarkan oleh media massa elektronik harus mudah dicerna oleh pendengar dan pemirsa sedangkan pesan-pesan yang disiarkan oleh media massa cetak dapat dengan canggih (*sophisticated*) dan ilmiah. Ciri-ciri khas itu pulalah yang menyebabkan media massa cetak lebih tinggi daya persuasinya daripada media massa elektronik karena pesan-pesan persuasif melalui media cetak lebih banyak ditujukan kepada rasio atau pikiran sedangkan pesan-pesan persuasif melalui media elektronik lebih banyak ditujukan kepada perasaan.

Pers mempunyai peran sebagai penyalur pikiran dan perasaan masyarakat, karena seretnya saluran melalui birokrasi maka khalayak memalingkan perhatiannya kepada pers yang menyediakan rubrik-rubrik khusus untuk menyalurkannya. Dari rubrik-rubrik yang disajikan koran dan majalah itu dapat ditelaah pikiran khalayak berupa informasi, pendapat, gagasan atau saran; juga perasaan khalayak berupa kekecewaan, kesedihan, kebingungan, harapan, keinginan bahkan kemarahan.

Situasi kehidupan pers di Indonesia sekarang ini menggembirakan semua pihak, baik pemerintah maupun pers sendiri dan masyarakat. Kebebasan pers dan tanggung jawab pers yang pernah menjadi kendala, kini sudah tidak menjadi permasalahan lagi. Terjadinya perbedaan interpretasi terhadap “pers bebas dan bertanggung jawab” itu tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Dalam hubungan ini PerMonsen, Direktur Internasional Press Institute di Zurich mengatakan bahwa wartawan pers yang bebas khawatir dengan dituntutnya mereka harus bertanggung jawab, mereka diharapkan selalu setuju dengan pihak yang berwenang. Mereka khawatir ketika didesak untuk bertanggung jawab sebenarnya mereka ditekan untuk mendukung kegiatan pemerintah tanpa kritik

Menurut Floyd G Arpan (Effendy, 1992: 164) bahwa kecenderungan-kecenderungan ini bergantung kepada empat faktor yakni :

1. Stabilitas pemerintah serta toleransinya dan ketangguhannya terhadap kritik;
 2. Derajat determinasi diri pada masyarakat dan hasratnya akan informasi yang benar.
 3. Tingkat pendidikan penduduk;
 4. Stabilitas finansial yang dicapai pers.
- Berdasarkan keempat butir itu tampaknya mengandung kebenaran. Jelaslah

bahwa masyarakat kita tidak menginginkan pers Indonesia mengorbankan idealismenya

disebabkan kehutangan budi (*obligated press*). Apabila pers Indonesia menjadi *obligated press* berarti makna demokrasi dari Demokrasi Pancasila akan terpusus.

Pesan politik melalui media massa sangat kuat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Pentingnya perilaku politik dalam menunjang keberhasilan pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik yang tetap besar terhadap masalah ini. Asumsi umum menunjukkan bahwa demokrasi bisa dipelihara dan dipertahankan karena terdapat partisipasi warga negara yang aktif dalam urusan kewarganegaraan. Partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan rasa tanggung jawab kewarganegaraan yang tersebar luas. Informasi akan tersebar luas jika terjadi proses komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi menjadi tulang punggung utama bagi berjalannya demokrasi.

Tolok ukur demokrasi adalah kriteria komunikasi, yaitu adanya wacana publik, pertukaran pendapat, gagasan dan perbedaan secara terbuka, arus informasi yang tidak dibatasi, serta hak dan kebebasan memilih. Peranan media massa sangat besar dalam penyampaian informasi politik karena media massa mempunyai beberapa keunggulan antara lain media massa memiliki jangkauan luas dalam penyampaian pesan kepada khalayak dan berpengaruh langsung serta segera terhadap penerima pesan.

Menurut Dedy N Hidayat, media massa berfungsi memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan dalam penentuan sikap dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen di mana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan.

Media massa bukanlah institusi yang *value-free* atau bebas nilai. Media massa dibentuk dan dijalankan dengan dilandasi suatu visi ideologi tertentu. Guna

mengembangkan ideologi yang dibawa media memakai atribut-atribut tertentu yang dapat mengkondisikan pesan-pesan yang dikomunikasikan. Seperti yang dikatakan oleh Marshall McLuhan " *the medium is the message* " artinya media itu sendiri merupakan pesan. Apa yang dikatakan oleh media ditentukan secara mendalam oleh media. Terlebih jika disadari bahwa dibalik pesan yang disampaikan lewat media tersembunyi mitos yaitu kepentingan media itu sendiri. (Dedy N Hidayat dalam pengantar Agus Sudibyo, 2001).

Melalui opininya surat kabar menawarkan definisi-definisi tertentu mengenai kehidupan manusia seperti siapa pahlawan dan siapa penjahat. Apa yang buruk bagi rakyat, apa yang layak dan apa yang tidak layak untuk dilakukan seorang pemimpin, tindakan apa yang disebut perjuangan (dengan membela kebenaran dan keadilan) dan pemberontakan atau terorisme, isu apa yang masuk akal atau tidak dan solusi apa yang harus diambil dan ditinggalkan.

Persoalan makna dalam penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas hasilnya sebab bahasa mengandung makna. Pada setiap kata, kata, angka, dan simbol lain tentulah mengandung makna. Begitu juga dengan rakitan antara satu kata (angka) dengan kata (angka) lain menghasilkan suatu makna. Penampilan secara keseluruhan sebuah wacana bahkan bisa menimbulkan makna tertentu. (Ibnu Hamad, 2004: 13)

Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini bahkan bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan realitas (Ibnu Hamad, 2004 : 13) Elemen dasar seluruh isi

media massa entah itu hasil liputan seperti berita, laporan pandangan mata atau hasil analisis berupa opini adalah bahasa (verbal dan nonverbal) dengan demikian bahasa adalah nyawa kehidupan media massa. (Ibnu Hamad, 2004 : 15)

Selain itu, media massa mempengaruhi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Sayangnya peranan komunikasi yang banyak didukung media yang memiliki akses terhadap khalayak tidak diimbangi dengan upaya pembebasan (media massa). Di beberapa negara, seperti di Indonesia, sebelum reformasi, media massa masih dibelenggu oleh sistem politik. Padahal peranan media massa sangat ditentukan oleh sistem politik tempat media massa itu berkembang. Di Indonesia, ketergantungan media massa terhadap sistem politik tercermin dari kewajiban pers nasional sebagaimana diatur dalam UU No.11/1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Ketergantungan sistem pers Indonesia terhadap sistem politik tersebut terus berlanjut kendati undang-undang yang mengatur kehidupan pers berubah.

Di dalam UU No.21/1982 perubahan dari UU No.11/1966 yang selanjutnya diubah lagi menjadi UU No.40/1999, ketergantungan sistem pers terhadap sistem politik tampak dari tugas dan kewajiban pers nasional dalam melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila, di samping memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat serta kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab serta menggelorakan semangat pengabdian juga memperkuat persatuan dan kesatuan.

Ketergantungan itu pun berimplikasi pada pembinaan pribadi wartawan. Pembinaan wartawan dipengaruhi oleh ideologi yang dianut sistem politik, seperti tampak dalam Kepribadian Wartawan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Jurnalistik. Pembelengguan seperti itu memperlihatkan bahwa ketergantungan

sistem pers pada sistem politik secara berlebihan dapat berakibat tidak baik terhadap pilihan jenis dan kandungan materi berita. Berita yang disajikan dapat dipastikan sulit keluar dari kerangka ideologis dan kebijakan yang digariskan pemegang kekuasaan. Jika menyimpang berbagai kemungkinan kurang menguntungkan akan menimpa kehidupan pers tersebut, misalnya mendapat teguran keras, gugatan melalui pengadilan. Kalau pada masa orde baru terjadi pembredelan seperti yang menimpa Majalah Sastra tahun 1968, Harian Sinar Indonesia Baru 1976, Majalah Monitor 1991 dan yang terakhir menimpa Majalah Tempo (Hikmat, 2010: 66)

Sebelum masa reformasi, kebijakan politik terhadap pembelengguan pers tampaknya terlalu berlebihan. Pemberitaan politik yang disodorkan media massa sering dianggap sebagai ancaman stabilitas penguasa. Oleh karena itu, banyak sekali tindakan pemerintah baik berupa kebijakan maupun kebijaksanaan yang justru banyak membelenggu kehidupan pers nasional. Baru pada masa reformasi ini disadari bahwa pembangunan di bidang politik sangat penting dilakukan dalam upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat ke arah pemahaman politik yang lebih rasional dan demokratis. Sejak reformasi bergulir pada akhir tahun 90-an, sangat tampak media massa memiliki peranan besar dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Peranan ini dimainkan secara dominan oleh media massa dengan cara memuat dan memberitakan berbagai berita politik, baik berupa debat terbuka, opini, editorial, laporan berbagai kasus politik, wawancara tokoh maupun aksi demonstrasi.

Pada saat yang sama, posisi tawar media massa tampak makin kuku Bermula dari dimudahkannya pengurusan SIUPP yang sebelumnya hanya sebanyak 270-an, pada era reformasi mencapai lebih kurang 1000 SIUPP. Sebelum tahun 1998, televisi hanya

mencapai 6 stasiun nasional, kini lebih dari 11 stasiun (RCTI, MNCTV, TVOne, Indosiar, SCTV, Trans7, TransTV, TVRI, ANTV, MetroTV dan lain-lain), tidak termasuk stasiun televisi daerah yang masuk kategori provincial TV seperti JTV di Jawa Timur, Papua TV di Papua, MQ TV di Bandung. Jumlah radio pun meningkat pesat. Sebelum 1998, ada sekitar 700 stasiun radio. Saat ini lebih dari 1000 stasiun radio (Hikmat, 2010: 67). Bukan hanya itu, dari sisi kualitas penyajian berita pun media massa tidak kalah gesit. Dulu berbagai berita politik yang tampaknya "tabu" untuk diekspos, kini menjadi komoditas utama penyajian media massa. Pers melihat konflik tak ubahnya sebagai ideologi, sebuah ideologi komoditas dan dagang. Kontroversi dan konflik sering dilihat sebagai isu-isu politik yang nyata bagi wartawan. Melihat kecenderungan ini, paling tidak ada dua orientasi pemberitaan, (1) media yang berorientasi pada peristiwa (*event-centered*); (2) media yang berorientasi pada gagasan (*idea-centered*). Tak berlebihan bila posisi dan peran pers sekarang sebagai *watch dog* bagi penguasa. Ada tiga alasan terhadap peran dan posisi pers tersebut yaitu (1) posisi dan fungsi pers selama orba ditekan hingga "tiarap" (2) kompetisi industri media yang makin marak dan tajam mengharuskan mereka menampilkan dan mengemas berita sedemikian menarik dan eksklusif; (3) situasi keterbukaan politik di era reformasi yang salah satu dampaknya mengkaji ulang format UU Pokok Pers yang ada sekarang (Hikmat, 2010: 68-69)

Surat kabar yang tergolong besar / mapan memiliki halaman yang diperuntukkan secara khusus untuk laporan pemilihan (termasuk kampanye) selain pemberitaan tentang kampanye atau pemilihan pada halaman muka yang biasanya dapat dinilai istimewa. Misalnya pada tahun 2009, surat kabar KOMPAS menghususkan halaman 37-44 untuk laporan pemilihan dengan nama rubrik Pemilihan Umum 2009 Selain berisi kampanye

partai politik berupa (issue) penting seperti kemiskinan, pendidikan kesehatan, kestabilan ekonomi dan politik. Pada halaman in juga dimuat jajak pendapat serta pandangan para ahli mengenai persoalan-persoalan politik dan pemilihan umum. REPUBLIKA mempunyai halaman khusus untuk pemilihan umum dengan nama Koran Pemilu pada halaman 4-5. Sedangkan MEDIA INDONESIA mempunyai halaman khusus *Election Media* pada halaman 3-4.

Penyediaan halaman khusus untuk laporan pemilihan (termasuk kampanye) memiliki dampak terhadap strategi dan jalannya kampanye setidaknya dalam 3 hal. Pertama, para elite partai politik dipaksa untuk berhitung dengan lebih sungguh-sungguh tentang agenda kampanye mengingat kenyataannya bahwa penonjolan-penonjolan dalam pemberitaan oleh media massa berkenaan dengan kegiatan kampanye biasanya lebih ditentukan oleh kemungkinan luasnya pengaruh dari kegiatan. Hal ini berarti bahwa media massa relatif lebih memprioritaskan kegiatan yang memiliki nilai peristiwa besar atau luas melibatkan komponen-komponen di dalam masyarakat. Mengagendakansuatu kegiatan kampanye yang besar dengan sendirinya lebih membutuhkan persiapan-persiapan dan kecermatan di samping masalah dana.

Kedua, bahwa penyediaan halaman khusus untuk pemberitaan kampanye memberikan peluang kepada calon pemilih untuk lebih mencermati setiap perkembangan partai politik atau kandidat sehingga preferensi-preferensi calon pemilih menjadi lebih dipengaruhi oleh kecukupan memilih pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional.

Ketiga, dampak dari penyediaan halaman khusus untuk pemberitaan kampanye tidak lain adalah mendorong publik untuk lebih aktif mencari informasi dan

mediskusikan kejadian-kejadian dan hal-hal penting terkait dengan politik dan pemilihan sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat lebih tinggi dan lebih rasional.

Ada 4 kategorisasi terhadap pemuatan tulisan-tulisan di ketiga surat kabar yaitu Kompas, Media Indonesia, Republika yaitu : 1. Tajuk rencana (editorial), 2. Artikel/Opini, 3. *Headline*, 4. Berita (*news*). Pengertian Tajuk Rencana (editorial) ialah ” karya tulis yang merupakan pandangan editor terhadap suatu topik.” (Effendy 1992 :71). Dalam penelitian ini hanya akan mengkaji kategori artikel/opini yang dimuat di ketiga surat kabar yaitu Kompas, Media Indonesia dan Repulika. Adapun pola baku (*standard pattern*) untuk tajuk rencana ialah :

1. Judul yang menghimbau kepada pembaca
2. Kalimat untuk *lead* yang tidak terlalu panjang.
3. Kalimat pada paragraf terakhir yang menggemakan judul dan *lead* serta problema yang dikupas.(Effendy, 1992 : 72)

Pengertian Artikel/Opini ialah aktualisasi perbedaan pendapat, pandangan, aspirasi atas persoalan sosial di masyarakat. Hal ini terwujud dalam halaman opini yang biasanya disediakan dalam halaman tersendiri bersama tajuk dan surat pembaca. Ini merupakan wujud dari pelaksanaan peran, fungsi serta tanggung jawab pers terhadap masyarakat. (Dedy N Hidayat dalam pengantar Agus Sudibyo, 2001)

Menurut AS Haris Sumadiria (2009 : 1) pengertian artikel adalah :

Tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memeritahu (informatif), memengaruhi dan meyakinkan (persuasif argumentatif) atau menghiur khalayak pembaca (rekreatif). Disebut lepas karena siapa pun boleh menulis artikel dengan topik bebas sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Selain itu juga artikel yang ditulis tersebut tidak terikat dengan berita atau laporan tertentu. Ditulisnya pun boleh kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja.

Secara teknis jurnalistik, artikel adalah salah satu bentuk opini yang terdapat dalam surat kabar atau majalah. Disebut salah satu karena masih ada bentuk opini yang

lain. Analoginya sederhana, kalau orang membuka halaman demi halaman surat kabar atau majalah, maka secara umum isinya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah berita (*news*), kelompok kedua disebut opini (*views*) dan kelompok ketiga dinamakan iklan (*advertising*).

Kelompok opini meliputi tajuk rencana atau editorial, karikatur, pojok, artikel, kolom dan surat pembaca. Untuk memisahkan secara tegas antara berita (*news*), dan opini (*views*), maka tajuk rencana, karikatur, pojok, artikel dan surat pembaca ditempatkan dalam suatu halaman khusus. Inilah yang disebut halaman opini (*opinion page*) (AS Haris Sumadiria, 2009 : 2) Pemisahan secara tegas berita dan opini tersebut merupakan konsekuensi dari norma dan etika luhur jurnalistik yang tidak menghendaki berita sebagai fakta objektif, diwarnai atau dibaurkan dengan opini sebagai pandangan yang sifatnya subjektif (AS Haris Sumadiria, 2009 : 2).

Adapun karakteristik artikel ada 7 yaitu (1) Ditulis dengan nama (*by line story*), (2) Mengandung gagasan aktual dan atau kontroversial, (3) Gagasan yang diangkat harus menyangkut kepentingan sebagian terbesar khalayak pembaca, (4) Ditulis secara referensial dengan visi intelektual, (5) Disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer, komunikatif, (6) Singkat dan tuntas, (7) Orisinal. (AS Haris Sumadiria, 2009 : 4)

Berdasarkan ke-7 karakter dalam artikel itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang koalisi antarpolitik dalam artikel di surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika.

Pengertian *Headline* ialah Pengertian *headline* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu judul berita yang paling menonjol di surat kabar (DEPDIKNAS , 2002: 1301). Sedangkan menurut Onong Uchjana Effendy (1989: 160) dijelaskan bahwa

headline (judul berita) adalah inti dari suatu kisah berita pada surat kabar yang ditampilkan dengan susunan kalimat yang amat singkat serta dengan bentuk huruf yang besar dan mencolok guna memikat perhatian khalayak agar membacanya.

Pengertian Berita (*news*) ialah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting atau kedua-duanya bagi sejumlah penduduk."(Effendy, 1992: 68) Jadi berita merupakan laporan yang sangat cepat (*timely*) dan mengenai kepentingan umum (*public interest*).

Di sini peneliti hanya memfokuskan pada artikel-artikel/opini yang telah diterbitkan oleh ketiga surat kabar tersebut mulai dari bulan April sampai dengan Mei 2009. Artikel-artikel/opini ini penting untuk dikaji karena di dalamnya terkandung aktualisasi dari berbagai pakar atau ahli yang berkompeten di bidangnya juga mencakup perbedaan pendapat, pandangan, aspirasi atas persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi dan agama di masyarakat.

Di dalam artikel-artikel yang dimuat di surat kabar terdapat tema-tema penting yang berkaitan dengan wacana pembagian kekuasaan (*power sharing*) dalam koalisi antar partai politik yang dimuat di ketiga media massa yaitu Kompas, Media Indonesia dan Republika. Tema merupakan gagasan yang disampaikan secara tertulis maupun lisan (Eriyanto, 2001: 229). Tematik ini baru dipahami ketika kita membaca teks secara keseluruhan. Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan atau utama dari suatu teks. Tema menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh penulis dalam wacananya.

Dalam penelitian ini dilakukan analisis wacana (*discourse analysis*). Pengertian analisis wacana (*Discourse Analysis*) adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain

analisis isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan " apa " (*what*), sedangkan analisis wacana lebih menekankan pada " bagaimana " (*how*) dari pesan atau teks komunikasi. Melalui analisis wacana, selain dapat diketahui bagaimana isi teks berita tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frase, kalimat, metafora macam apa suatu berita itu disampaikan. Sehingga dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. (Eriyanto, 2001:xv).

Wacana yang dikembangkan dalam fenomena koalisi antar partai politik disini adalah wacana tentang pembagian kekuasaan (*power sharing*) baik di kabinet maupun di parlemen (DPR). Alasan koalisi biasanya dikualifikasikan menjadi dua bagian yaitu koalisi taktis dan koalisi strategis (Dedy Maward, 2008). Koalisi strategis dibangun guna pemenuhan kepentingan visi dan ideologi partai politik. Tujuan dari koalisi strategis biasanya ada dua bagian yakni pertama adalah secara bersama-sama membentuk satu pemerintahan kuat dan tahan lama. Yang kedua adalah membagi kekuasaan yang adil dan demokratis untuk tujuan pemenuhan harapan-harapan rakyat. Koalisi strategis terbentuk bukan karena calon presiden belum dapat "perahu" tetapi terbentuk atas dasar kepentingan politik partai secara kelembagaan. Dalam koalisi strategis soal pembagian kekuasaan diputuskan secara bersama-sama dengan anggota koalisi. Karena koalisi ini dibangun atas dasar nilai-nilai politik yang strategis, maka terbentuknya pun melalui proses yang sangat hati-hati dan memakan waktu yang panjang. Hal itu dikarenakan pembentukan koalisi itu bukan soal pembagian jatah kekuasaan di kabinet ataupun di

parlemen, akan tetapi soal pemenuhan harapan-harapan rakyat (terutama kesejahteraan) setelah memegang tampuk kekuasaan.

Koalisi taktis dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologis dari partai politik yang bergabung. Koalisi ini dibangun tidak berdasarkan pada asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Biasanya motivasi berkoalisi itu sangat pragmatis. Menurut Syarif Makhya, bahwa pragmatisme bisa dalam bentuk politik uang (*money politics*) dan juga politik "dagang sapi". Di sini koalisi terbangun lebih dikarenakan kentalnya keputusan elite kekuasaan tertinggi partai.

Jadi pengertian koalisi dapat dibagi menjadi 2 yaitu secara makro dan mikro. Secara makro, pengertian atau makna koalisi antar partai politik berarti penggabungan atau menyatunya berbagai partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya pembagian jatah kekuasaan di kabinet ataupun di parlemen atau soal pemenuhan harapan-harapan rakyat terutama kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Secara mikro, maksud koalisi dapat mengandung 2 makna yaitu makna pragmatis (taktis) dan makna strategis. Makna koalisi strategis dibangun guna pemenuhan kepentingan visi dan ideologi partai politik. Tujuan dari koalisi strategis biasanya ada 2 bagian, pertama secara bersama-sama membentuk satu pemerintahan kuat dan tahan lama. Tujuan kedua adalah membagi kekuasaan (*power sharing*) yang adil dan demokratis untuk tujuan memenuhi harapan-harapan rakyat pada umumnya. Makna pembagian kekuasaan (*power sharing*) di sini bukan secara pragmatis untuk membagi jatah pos-pos kementerian yang strategis di pemerintahan tetapi para partai politik secara bersama-sama melakukan koalisi untuk kepentingan bangsa dan negara yang kokoh.

Makna koalisi taktis adalah koalisi yang dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologi dari partai politik yang bergabung. Motivasi berkoalisi itu sangat pragmatis yaitu pembagian kekuasaan (*power sharing*), tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*), pembicaraan-pembicaraan politik (*lobbying*) ataupun pertentangan antara kelas dominan dengan kelas subordinat.

Pembagian kekuasaan (*Power sharing*) artinya soal pembagian kekuasaan diputuskan secara bersama-sama dari anggota koalisi. Koalisi ini dibangun atas dasar nilai-nilai politik yang strategis, maka terbentuknya pun memakan waktu yang panjang. Misalnya pembagian jatah kursi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Nasional diminta oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB dan PAN)

Tawar-menawar kekuasaan (*Power Bargaining*) maksudnya adalah adanya tawar-menawar kekuasaan antara partai terbesar atau partai pemenang pemilu legislatif dengan partai-partai lainnya. Biasanya ada kontrak politik. Misalnya Partai Demokrat membuat kontrak politik bagi partai-partai lain yang ingin berkoalisi dengan partai terbesar itu.

Pembicaraan-pembicaraan politik (*lobbying*) maksudnya adalah pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada politik atau pembagian kekuasaan. Misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan serangkaian komunikasi politik kepada Partai Demokrat (PD) dalam proses pencalonan wakil presiden.

Pertentangan antara kelas dominasi dan kelas subordinat (*dominant class versus subordinate class*) maksudnya adalah koalisi yang dibangun tidak berdasarkan pada asas keseimbangan antara partai terbesar (*dominant class*) dengan partai menengah atau kecil (*subordinate class*) sehingga terlihat adanya dominasi kekuasaan antara partai-partai besar

dan partai-partai kecil atau menengah. Misalnya Partai terbesar (Partai Demokrat) ingin berkoalisi dengan PDIP. Di sini akan muncul wacana dominasi antara Partai Demokrat terhadap PDIP sebagai kelas subordinat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang:

KOALISI ANTARPARTAI POLITIK DALAM UPAYA MENJARING CALON PRESIDEN (CAPRES) DAN WAKIL PRESIDEN (CAWAPRES) REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009-2014

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yaitu :

1. Fenomena koalisi partai-partai politik terhadap ketiga pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014 itu diwacanakan oleh media massa (Kompas, Media Indonesia dan Republika).
2. Pentingnya koalisi itu diwacanakan oleh ketiga media massa itu (Kompas, Media Indonesia dan Republika)?

C. Pembatasan Masalah

Berkenaan dengan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi pada permasalahan yaitu tentang koalisi partai-partai politik terhadap ketiga pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014 itu diwacanakan oleh media massa (Kompas, Media Indonesia dan Republika).

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa wacana koalisi antarpantai politik terhadap ketiga pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014 direpresentasikan secara makro maupun mikro dalam artikel/opini di surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika?
2. Bagaimana wacana koalisi pragmatis (*power sharing, power bargaining, lobbying* dan *domination versus subordinate*) direpresentasikan dalam surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui analisa wacana koalisi antar partai politik terhadap ketiga pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 direpresentasikan secara makro maupun mikro dalam artikel/opini di surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika.
2. Untuk mengetahui wacana koalisi pragmatis (*power sharing, power bargaining, lobbying* dan *domination versus subordinate*) direpresentasikan dalam surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika.

F. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademik maupun paktis.

a. Secara akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan cakrawala pemikiran ilmiah baik bagi kalangan dosen, peneliti, mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya yang

concern pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan koalisi antar partai politik di Indonesia

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S2 pada program studi komunikasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu (Effendy, 1992:158).

Menurut Dan Nimo bahwa yang dimaksud Komunikasi politik adalah komunikasi atau kegiatan yang dianggap politis atas dasar konsekuensi-konsekuensi aktual dan potensial yang menata perilaku manusia dalam kondisi konflik.

Menurut Denis McQuail (1992) bahwa institusi politik dari yang paling primitif sampai kepada yang kompleks tidak dapat eksis tanpa adanya komunikasi yang pada dasarnya untuk merepresentasikan simbol-simbol dari kekuasaan dan untuk berkompetisi.

a. Sejarah komunikasi politik

Berdasarkan sejarah, surat kabar merupakan instrumen utama dalam komunikasi politik seperti yang sekarang digunakan banyak orang dari abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20. Selama periode ini surat kabar menyajikan beberapa variabel seperti seorang reporter meliput kejadian-kejadian politik dan pelaporan pada prkumpulan politik ; suatu platform untuk mengekspresikan tentang pendapat yang berkaitan dengan politik ; suatu instrumen untuk organisasi partai politik dan mobilisasi terhadap ideologi palsu, sebagai senjata pada konflik partai secara internal, kritik dan tontonan pada aksi pemerintah. Semuanya ini merupakan dasar-dasar fungsi politik media massa pada masa sekarang ini.

b. Munculnya Media komunikasi modern

Komunikasi politik merupakan suatu organisasi yang menggunakan media massa modern untuk tujuan-tujuan politik khususnya dalam pemilihan kampanye dan menunjukkan pengembangan pada penyelidikan yang sistematis dalam komunikasi politik dan telah memberikan topik kontemporer yang utama. Dalam istilah Seymour-Ure (1974) bahwa komunikasi politik mempunyai dua dimensi yaitu dimensi horisontal dan dimensi vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi berada diantara persamaan-persamaan apakah para anggota ini mempunyai kesamaan elite politik atau warga negar yang mempunyai berinteraksi dan berkumpul secara bersama-sama. Komunikasi vertikal menempatkan diantara pemerintah (partai) dan masyarakat.

Penekanan pertama pada kampanye difokuskan pada arus "*top-down*" dalam arus vertikal (dari pemerintah atau partai kepada warga negara dan pengikutnya). Hal ini berarti mengabaikan komunikasi dengan para elite politik dan komunikasi antar individu. Arus komunikasi seharusnya juga sebaiknya "*upwards*" (naik ke atas) atau ke puncak politik dalam bentuk pengaruh voting, pendapat umum, bentuk-bentuk lain pada pengumpulan pengetahuan oleh politisi dan pemerintah.

Komunikasi politik menunjukkan seluruh proses informasi (termasuk fakta, pendapat, kepercayaan dan lain-lain) dipancarkan, diubah dan digunakan oleh partisipan dalam kegiatan politik institusi. Secara praktis, komunikasi politik membahas mengenai :

1. Kegiatan-kegiatan yang merujuk kepada formasi, mobilisasi dan pengembangan partai-partai dan gerakan politik yang sejenis.

2. Semua bentuk organisasi yang telah didesain untuk mendukung keuntungan suatu partai.
3. Banyak proses meliputi ekspresi, pengukuran, penyebaran manajemen pendapat publik (meliputi komunikasi informal dan komunikasi antar individu).
4. Kegiatan-kegiatan yang tetap pada media massa dalam melaporkan atau mengomentari pada kejadian-kejadian politik.
5. Proses pada informasi publik dan debat yang berhubungan dengan kebijakan politik.
6. Sosialisasi politik secara informal, formasi dan kesadaran politik.

c. Media massa dan Politik massa.

Studi pada komunikasi politik selama abad ke-20 mempunyai cerita yang muncul pada surat kabar politik yang telah dibentuk oleh suatu trend menuju politik massa yang didasarkan pada hak pilih yang universal dengan skala birokrasi yang besar dalam mengorganisir masyarakat. (Mills, 1955).

Trend ini menempatkan suatu keuntungan pada kapasitas pimpinan politik untuk mengatur perintah pilihan individu pada sejumlah warga negara. Hal yang melatarbelakangi kenyataan ini adalah isu-isu sentral yang berhubungan antara :peranan dan pengaruh pada komersialisasi media massa khususnya yang mempengaruhi keseimbangan dan kekuasaan diantara kestabilan pemerintah 'bourjouis', sosialis atau perubahan radikal.

d. Media massa dan Partai politik

Menurut Seymour-Ure (1974) bahwa ada 3 hal yang mendasari dalam kaitannya dengan hubungan politik diantara suatu surat kabar dan sebuah partai politik yaitu:

2. Korespondensi organisasi – kertas milik sebuah partai dan didesign untuk melayani tujuan suatu partai.
3. Mendukung tujuan suatu partai – suatu surat kabar dapat memutuskan untuk memilih editorial guna mendukung sebuah partai dan konsistensi politiknya.
4. Korespondensi diantara pembaca dalam memberikan dukungan kepada partai – suatu surat kabar dapat menggambarkan pembacanya dan satu kelas atau sektor sosial yang condong pada kepentingan politik secara langsung tanpa adanya suatu kesadaran politik yang telah dibuat.

Pada kondisi yang pertama (sebuah surat kabar aktif mendukung terhadap tujuan suatu partai) adalah ciri-ciri umum suatu surat kabar di Amerika Serikat dan ada kesamaan-kesamaan umum di Eropa sampai pada Perang Dunia II . Ada kemunduran besar sebagai akibat daripada trend-trend umum menuju ideologi dan bentuk politik pragmatis ; banyak komersialisasi press (netralitas atau keseimbangan politik dalam ketertarikan untuk memperluas pasar) ; kemunduran dalam persaingan dan pilihan (monopoli surat kabar dalam mempertahankan sedikit keterbukaan partai) dan meningkatkan profesionalisme jurnalistik , yang juga menjaga obyektivitas dan informatif melebihi advokasi atau propaganda peranan press. Karena trend ini dapat mempengaruhi press dan sebab-sebab perubahan ini mengarahkan pada suatu diversifikasi. Sekarang ini sedikit ditemukan surat kabar yang memiliki kegiatan dalam partai politik. Munculnya channel alternatif dalam komunikasi telah

ditawarkan oleh radio dan televisi dapat mengurangi adanya kekhawatiran adanya kapitalisme monopoli press.

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiyah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publications*).

Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran dan televisi siaran sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak yakni surat kabar, majalah dan buletin kantor berita.

Seperti diketahui bahwa ciri-ciri komunikasi massa yakni komunikasi dengan menggunakan media massa adalah prosesnya berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan dan komunikannya heterogen. Ciri-ciri tersebut dipenuhi baik oleh media massa cetak surat kabar dan majalah maupun media massa elektronik radio dan televisi. Kendatipun demikian antara media massa cetak dan media massa elektronik itu terdapat perbedaan yang khas yakni pesan-pesan yang disiarkan oleh media massa elektronik diterima oleh khalayak hanya sekilas dan khalayak harus selalu berada di depan pesawat televisi. Sedangkan pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat diulangkaji dan dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada tiap kesempatan.

Ciri-ciri khas itulah yang menyebabkan pesan-pesan yang disiarkan oleh media massa elektronik harus mudah dicerna oleh pendengar dan pemirsa sedangkan pesan-pesan yang disiarkan oleh media massa cetak dapat dengan canggih (*sophisticated*)

dan ilmiah. Ciri-ciri khas itu pulalah yang menyebabkan media massa cetak lebih tinggi daya persuasinya daripada media massa elektronik karena pesan-pesan persuasif melalui media cetak lebih banyak ditujukan kepada rasio atau pikiran sedangkan pesan-pesan persuasif melalui media elektronik lebih banyak ditujukan kepada perasaan.

Pers adalah lembaga kemasyarakatan (*social institution*). Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian maka pers tidak dapat hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara karena eksistensi pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup.

Menurut Freud S Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam bukunya yang terkenal berjudul *Four Theories of the Press* dinyatakan bahwa pers dunia sekarang dapat dikategorikan menjadi empat yaitu :

1. *Authoritarian Press*
2. *Libertarian Press*
3. *Social Responsibility Press*
4. *Soviet Communist Press.*

Authoritarian theory menjadi dasar perkembangan *Soviet Communist Theory* yang tertua, yang muncul setelah mesin cetak ditemukan. Pada waktu itu, apa yang disebut kebenaran (*truth*) adalah milik beberapa gelintir penguasa saja. Oleh karena itu, pers

digunakan untuk memberi informasi kepada rakyat mengenai apa yang dipikirkan oleh penguasa dan harus didukung oleh rakyat.

Sedangkan *Libertarian Theory* merupakan kebalikan dari *Authoritarian Theory* dalam hal hubungan posisi manusia terhadap negara. Kebenaran bukan lagi milik penguasa.

Selama dua ratus tahun pers Amerika dan Inggris menganut teori liberal ini, bebas dari pengaruh pemerintah dan bertindak sebagai *fourth estate* (kekuasaan keempat) dalam proses pemerintahan setelah kekuasaan pertama: lembaga eksekutif, kekuasaan kedua : lembaga legislatif, kekuasaan ketiga : lembaga yudikatif. Dalam perkembangan selanjutnya pada abad ini muncul *new authoritarianism* di negara-negara komunis sedangkan negara-negara non komunis timbul *new libertarianism* yang disebut *social responsibility theory* atau teori tanggung jawab sosial.

Bagaimana dengan pers di Indonesia? Pengertian pers di Indonesia sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1966. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.

Berdasarkan definisi pers itu menunjukkan bahwa pers di Indonesia tegas-tegas merupakan lembaga kemasyarakatan (*social institution*) , bukan lembaga pemerintah ataupun bukanlah suatu corong pemerintah. Mengenai hal ini secara tegas

dicantumkan bahwa pers Indonesia merupakan alat perjuangan nasional, bukan sekedar penjual berita untuk mencari keuntungan.

Idealisme yang melekat pada pers dijabarkan dalam pelaksanaan fungsinya, selain menyiarkan informasi juga mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*)

Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang pertama dan utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal di muka bumi ini tentang peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain dan sebagainya

b. Fungsi mendidik (*to educate*)

Sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*) surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya.

c. Fungsi menghibur (*to entertain*)

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Misalnya cerita pendek, cerita bersambung, teka-teki silang, karikatur dan sebagainya.

d. Fungsi mempengaruhi (*to influence*)

Fungsi mempengaruhi (persuasif) ini secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel .

Selanjutnya menurut McQuail dijelaskan bahwa fungsi media massa yaitu :

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang dapat menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan industri tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak institusi media diatur oleh masyarakat.
2. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol manusia dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.
3. Media merupakan lokasi (forum) yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
4. Media acapkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara mode gaya hidup dan norma-norma.
5. Media telah menjadi sumber di mana bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif, menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif dengan berita dan hiburan.

Menurut Dedy N Hidayat, media massa berfungsi memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan dalam penentuan sikap dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen di mana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan.

Media massa bukanlah institusi yang *value-free* atau bebas nilai. Media massa dibentuk dan dijalankan dengan dilandasi suatu visi ideologi tertentu. Guna mengembangkan ideologi yang dibawa media memakai atribut-atribut tertentu yang dapat mengkondisikan pesan-pesan yang dikomunikasikan. Seperti yang dikatakan oleh Marshall McLuhan " *the medium is the message* " artinya media itu sendiri merupakan pesan. Apa yang dikatakan oleh media ditentukan secara mendalam oleh media. Terlebih jika disadari bahwa dibalik pesan yang disampaikan lewat media tersembunyi mitos yaitu kepentingan media itu sendiri. (Dedy N Hidayat dalam pengantar Agus Sudibyo, 2001)

Melalui opininya surat kabar menawarkan definisi-definisi tertentu mengenai kehidupan manusia seperti siapa pahlawan dan siapa penjahat. Apa yang buruk bagi rakyat, apa yang layak dan apa yang tidak layak untuk dilakukan seorang pemimpin, tindakan apa yang disebut perjuangan (dengan membela kebenaran dan keadilan) dan pemberontakan atau terorisme, isu apa yang masuk akal atau tidak dan solusi apa yang harus diambil dan ditinggalkan.

Persoalan makna dalam penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas hasilnya sebab bahasa mengandung makna. Pada setiap kata, kata, angka, dan simbol lain tentulah mengandung makna. Begitu juga dengan rakitan antara satu kata (angka) dengan kata (angka) lain menghasilkan suatu makna. Penampilan secara keseluruhan sebuah wacana bahkan bisa menimbulkan makna tertentu. (Ibnu Hamad, 2004: 13)

Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian

suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini bahkan bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan realitas (Ibnu Hamad, 2004 : 13) Elemen dasar seluruh isi media massa entah itu hasil liputan seperti berita, laporan pandangan mata atau hasil analisis berupa opini adalah bahasa (verbal dan nonverbal) dengan demikian bahasa adalah nyawa kehidupan media massa. (Ibnu Hamad, 2004 : 15)

Ciri dan sifat media massa amat berpengaruh kepada komponen-komponen proses komunikasi lainnya. Karena yang menjadi fokus perhatian di sini adalah surat kabar, maka yang akan dibahas hanyalah media tersebut. Ada 3 ciri surat kabar yaitu :

1. Publisitas

Pengertian publisitas ialah bahwa surat kabar diperuntukkan umum; karenanya berita, tajuk rencana, artikel dan lain-lain harus menyangkut kepentingan umum.

2. Universalitas

Universalitas menunjukkan bahwa surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia.

3. Aktualitas

Aktualitas ialah kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak.

Sedangkan sifat surat kabar ialah :

1. Terekam

Artinya berita-berita yang disiarkan oleh surat kabar tersusun dalam alinea, kalimat dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf yang dicetak pada kertas. Setiap peristiwa atau hal yang diberitakan terekam sedemikian rupa sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat diulang-kaji bisa dijadikan dokumentasi dan bisa dipakai sebagai bukti untuk keperluan tertentu.

2. Menimbulkan perangkat mental secara aktif

Karena berita surat kabar yang dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa dengan huruf yang tercetak mati di atas kertas, maka untuk dapat mengerti maknanya pembaca harus menggunakan perangkat mentalnya secara aktif.

3. Pesan menyangkut kebutuhan komunikasi

Mengingat sifat media massa adalah satu arah (*one-way traffic communication*) dan tidak memungkinkan diketahuinya tanggapan pembaca pada saat wartawan menyampaikan pesannya sehingga umpan baliknya terjadi secara tertunda (*delayed feedback*). Sebagai konsekuensinya si wartawan harus melakukan perencanaan jurnalistiknya (*communication planning*) secara matang.

4. Efek sesuai dengan tujuan

Efek yang diharapkan dari pembaca surat kabar bergantung pada tujuan si wartawan sebagai komunikator.

5. Tergantung dari kemampuan dan ketrampilan wartawannya.

Dalam kedudukannya di masyarakat sebagai insan yang penuh idealisme, ketika menangani berita, seorang wartawan harus bisa menyajikannya sedemikian

rupa sehingga hasil karyanya menarik, akurat, obyektif dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Media massa memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan politik karena media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat (Firmanzah, 2007 : 43).

Cakupan (*coverage*) yang luas dalam masyarakat membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkomunikasikan program kerja, pesan politik, pembentukan image partai atau seseorang. Media yang memiliki cakupan luas ini dapat berupa koran, majalah, TV, radio dan internet. Oleh karena itu tidak dipungkiri lagi bahwa media massa memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam pemilihan capres/cawapres RI 2009-2014. Orang yang sebelumnya jarang mengikuti perkembangan politik melalui media massa tiba-tiba membaca satu atau dua penerbitan sekaligus setiap harinya dan masih juga menyimak berita dan talk show melalui radio, televisi atau internet guna mengikuti program (platform) partai atau kandidat di mana posisi partai atau kandidat terkait dengan persoalan-persoalan pelik yang dihadapi bangsa, bagaimana jalannya kampanye, bagaimana hasil sementara pemilihan, dan bagaimana sosok serta penampilan para kandidat.

Dalam hubungannya dengan demokratisasi komunikasi di Indonesia, dari sekian banyak jenis media massa adalah pers yang paling berperan karena berfungsi sebagai penyalur pikiran dan perasaan masyarakat. Karena seretnya saluran melalui birokrasi maka khalayak memalingkan perhatiannya kepada pers yang menyeduakan rubrik-rubrik khusus untuk menyalurkannya.

Dari rubrik-rubrik yang disajikan koran dan majalah itu dapat ditelaah pikiran khalayak berupa informasi, pendapat, gagasan atau saran; juga perasaan khalayak berupa kekecewaan, kesedihan, kebingungan, harapan, keinginan bahkan kemarahan.

Situasi kehidupan pers di Indonesia sekarang ini menggembirakan semua pihak, baik pemerintah maupun pers sendiri dan masyarakat. Kebebasan pers dan tanggung jawab pers yang pernah menjadi kendala, kini sudah tidak menjadi permasalahan lagi.

Terjadinya perbedaan interpretasi terhadap “pers bebas dan bertanggung jawab” itu tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Dalam hubungan ini PerMonsen, Direktur Internasional Press Institute di Zurich mengatakan bahwa Wartawan pers bebas khawatir bahwa dengan dituntutnya mereka harus bertanggung jawab, mereka diharapkan selalu setuju dengan pihak yang berwenang. Mereka khawatir ketika didesak untuk bertanggung jawab sebenarnya mereka ditekan untuk mendukung kegiatan pemerintah tanpa kritik

Menurut Floyd G Arpan (Effendy, 1992: 164) bahwa kecenderungan-kecenderungan ini bergantung kepada empat faktor yakni :

1. Stabilitas pemerintah serta toleransinya dan ketangguhannya terhadap kritik;
2. Derajat determinasi diri pada masyarakat dan hasratnya akan informasi yang benar.
3. Tingkat pendidikan penduduk;
4. Stabilitas finansial yang dicapai pers.

Berdasarkan keempat butir itu tampaknya mengandung kebenaran. Jelaslah bahwa masyarakat kita tidak menginginkan pers Indonesia mengorbankan idealismenya disebabkan kehutangan budi (*obligated press*). Apabila pers Indonesia menjadi *obligated press* berarti makna demokrasi dari Demokrasi Pancasila akan terpusus.

Surat kabar yang tergolong besar / mapan memiliki halaman yang diperuntukkan secara khusus untuk laporan pemilihan (termasuk kampanye) selain pemberitaan tentang kampanye atau pemilihan pada halaman muka yang biasanya dapat dinilai istimewa. Misalnya pada tahun 2009, surat kabar KOMPAS menghususkan halaman 37-44 untuk laporan pemilihan dengan nama rubrik Pemilihan Umum 2009 Selain berisi kampanye partai politik berupa (issue) penting seperti kemiskinan, pendidikan kesehatan, kestabilan ekonomi dan politik. Pada halaman ini juga dimuat jajak pendapat serta pandangan para ahli mengenai persoalan-persoalan politik dan pemilihan umum. REPUBLIKA mempunyai halaman khusus untuk pemilihan umum dengan nama Koran Pemilu pada halaman 4-5. Sedangkan MEDIA INDONESIA mempunyai halaman khusus *Election Media* pada halaman 3-4..

Penyediaan halaman khusus untuk laporan pemilihan (termasuk kampanye) memiliki dampak terhadap strategi dan jalannya kampanye setidaknya dalam 3 hal. Pertama, para elite partai politik dipaksa untuk berhitung dengan lebih sungguh-sungguh tentang agenda kampanye mengingat kenyataannya bahwa penonjolan-penonjolan dalam pemberitaan oleh media massa berkenaan dengan kegiatan kampanye biasanya lebih ditentukan oleh kemungkinan luasnya pengaruh dari kegiatan. Hal ini berarti bahwa media massa relatif lebih memprioritaskan kegiatan yang memiliki nilai peristiwa besar atau luas melibatkan komponen-komponen di dalam masyarakat. Mengagendakan suatu kegiatan kampanye yang besar dengan sendirinya lebih membutuhkan persiapan-persiapan dan kecermatan di samping masalah dana.

Kedua, bahwa penyediaan halaman khusus untuk pemberitaan kampanye memberikan peluang kepada calon pemilih untuk lebih mencermati setiap perkembangan partai politik atau kandidat sehingga preferensi-preferensi calon pemilih menjadi lebih dipengaruhi oleh kecukupan memilih pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional.

Ketiga, dampak dari penyediaan halaman khusus untuk pemberitaan kampanye tidak lain adalah mendorong publik untuk lebih aktif mencari informasi dan mendiskusikan kejadian-kejadian dan hal-hal penting terkait dengan politik dan pemilihan sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat lebih tinggi dan lebih rasional.

2. Pengertian Koalisi Partai

Secara harfiah pengertian koalisi adalah penggabungan. Namun dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama-sama dalam satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multipartai seperti di negara Indonesia ini. Ada banyak alasan bagi partai politik dalam melakukan koalisi. Alasan koalisi biasanya dikualifikasikan menjadi dua bagian yaitu koalisi taktis dan koalisi strategis (Dedy Mawardi, 2008).

Koalisi taktis dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologis dari partai politik yang bergabung. Koalisi ini dibangun tidak berdasarkan pada asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Biasanya motivasi

berkoalisi itu sangat pragmatis. Menurut Syarif Makhya, bahwa pragmatisme bisa dalam bentuk politik uang (*money politics*) dan juga politik "dagang sapi". Di sini koalisi terbangun lebih dikarenakan kentalnya keputusan elite kekuasaan tertinggi partai.

Menurut Bambang Eka Wijaya (BEW) mengatakan koalisi ini cenderung mengesampingkan aspirasi konstituen partai di basis massa (Lampung Post, 19 Februari 2008). Janganlah banyak berharap terhadap koalisi taktis ini karena koalisi model ini sangat tidak konsisten untuk berpikir dan bertindak dalam memenuhi harapan-harapan rakyat.

Sedangkan koalisi strategis dibangun guna pemenuhan kepentingan visi dan ideologi partai politik. Tujuan dari koalisi strategis biasanya ada dua bagian yakni pertama adalah secara bersama-sama membentuk satu pemerintahan kuat dan tahan lama. Yang kedua adalah membagi kekuasaan yang adil dan demokratis untuk tujuan pemenuhan harapan-harapan rakyat. Koalisi strategis terbentuk bukan karena calon presiden belum dapat "perahu" tetapi terbentuk atas dasar kepentingan politik partai secara kelembagaan. Dalam koalisi strategis soal pembagian kekuasaan diputuskan secara bersama-sama dengan anggota koalisi. Karena koalisi ini dibangun atas dasar nilai-nilai politik yang strategis, maka terbentuknya pun melalui proses yang sangat hati-hati dan memakan waktu yang panjang. Hal itu dikarenakan pembentukan koalisi itu bukan soal pembagian jatah kekuasaan di kabinet ataupun di parlemen, akan tetapi soal pemenuhan harapan-harapan rakyat (terutama kesejahteraan) setelah memegang tampuk kekuasaan.

Jadi pengertian koalisi dapat dibagi menjadi 2 yaitu secara makro dan mikro. Secara makro, pengertian atau makna koalisi antar partai politik berarti penggabungan atau menyatunya berbagai partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya pembagian jatah kekuasaan di kabinet ataupun di parlemen atau soal pemenuhan harapan-harapan rakyat terutama kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Secara mikro, maksud koalisi dapat mengandung 2 makna yaitu makna pragmatis (taktis) dan makna strategis. Makna koalisi strategis dibangun guna pemenuhan kepentingan visi dan ideologi partai politik. Tujuan dari koalisi strategis biasanya ada 2 bagian, pertama secara bersama-sama membentuk satu pemerintahan kuat dan tahan lama. Tujuan kedua adalah membagi kekuasaan (*power sharing*) yang adil dan demokratis untuk tujuan memenuhi harapan-harapan rakyat pada umumnya. Makna pembagian kekuasaan (*power sharing*) di sini bukan secara pragmatis untuk membagi jatah pos-pos kementerian yang strategis di pemerintahan tetapi para partai politik secara bersama-sama melakukan koalisi untuk kepentingan bangsa dan negara yang kokoh.

Makna koalisi pragmatis (taktis) adalah koalisi yang dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologi dari partai politik yang bergabung. Motivasi berkoalisi itu sangat pragmatis yaitu dalam bentuk politik "dagang sapi" (*power sharing*), tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*), pembicaraan-pembicaraan politik (*lobbying*) ataupun pertentangan antara *dominant class* dengan *subordinate class*.

Dominasi (*dominant class*) versus subordinasi (*subordinate class*) maksudnya koalisi yang dibangun tidak berdasarkan pada asas keseimbangan antara partai besar (kelas yang dominan) dengan partai kecil (kelas yang subordinat) sehingga terlihat adanya dominasi kekuasaan antara partai-partai besar dan partai-partai kecil atau menengah. Misalnya Partai-partai besar (Partai Demokrat, Golkar, PDIP yang ingin berkoalisi dengan partai-partai kecil yang tidak masuk dalam *Parliamentary Threshold* (PT), karena perolehan suaranya di Pemilu Legislatif kurang dari 2,5 % seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU), Partai Marhaenisme dan sebagainya. Partai-partai menengah misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang memperoleh suara minimal 2,5 % dari ketentuan *Parliamentary Threshold* (PT) dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembagian kekuasaan (*Power sharing*) artinya soal pembagian kekuasaan diputuskan secara bersama-sama dari anggota koalisi. Koalisi ini dibangun atas dasar nilai-nilai politik yang strategis, maka terbentuknya pun memakan waktu yang panjang. Misalnya pembagian jatah kursi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Nasional diminta oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB dan PAN)

Tawar-menawar kekuasaan (*Power Bargaining*) artinya adalah upaya-upaya dari pemenang hasil Pemilu 2009 untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan kepada para parpol yang termasuk dalam koalisi partainya Tawar-

menawar ini bisa berupa kontrak tertulis yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan koalisi. Salah satu hal yang esensial diatur adalah koalisi yang tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di parlemen.

Pembicaraan-pembicaraan politik (*Lobbying*) maksudnya adalah koalisi yang dibangun antar partai politik untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan serangkaian lobi, silaturahmi politik, komunikasi politik dan lain-lain. Misalnya komunikasi yang dilakukan antara Partai Demokrat dengan PDIP, Golkar dengan PKS, PPP dengan PDIP, Partai Demokrat dengan PKB, Gerindra dengan PAN dan lain-lain.

Lantas bagaimana dengan koalisi yang dibangun oleh partai politik dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2009-2014? Melihat perkembangan dan pendapat para pakar politik yang bertebaran di media massa, ada kecenderungan koalisi partai politik yang terbentuk sekarang ini lebih cenderung bersifat taktis.

Di samping itu, salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk berkoalisi adalah hasil persentase perolehan suara dari partai politik yang berkoalisi. Partai-partai politik dan calon presiden yang diusungnya beranggapan kalau didukung dengan koalisi dari partai A dan B maka si calon sudah mempunyai modal sekian persen suara. Cara berpikir seperti ini sangatlah tidak logis dalam dunia politik yang sangat tidak pasti ini.

3. Berita tentang Koalisi Politik dalam Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014.

Minat-minat terhadap penelitian mengenai berita dalam kaitannya dengan politik khususnya dalam konteks kontemporer sekitar PD II, dirintis oleh tokoh-tokoh dari Chicago University yang kemudian dikenal dengan Madhab Chicago (*Chichago School*). Diantara tokoh-tokoh yang terkenal adalah Robert Park, George Hebert Mead, Harry Stack Sullivan, dan Herbert Blumer yang kebanyakan adalah ahli Sosiologi Kualitatif

Beberapa konsep yang dihasilkan oleh Mazhab Chicago adalah teori mengenai khalayak yang dikonseptualisasikan dengan audience dan publik yang keduanya saling bertolak belakang. Konsep *audience* lebih dekat dengan selera, tuntutan dan kepentingan pasar. Sedangkan konsep publik lebih dekat dengan tuntutan atau kepentingan rakyat yang lebih berkonotasi politik.

Bagi Mazhab Chicago konsep-konsep audience mengimplikasikan mudahnya khalayak dimanipulasi oleh elite untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian dapat menimbulkan suasana *chaos*. Pengaruh Mazhab Chicago memudar seiring dengan semakin menguatnya pengaruh kelompok *Columbia School*. Kelompok atau mazhab ini lebih banyak menggunakan teknik kuantitatif terutama survey di samping analisis isi, dengan melibatkan informan atau responden yang lebih besar jumlahnya. Tokoh-tokohnya adalah Lazarfeld, Berelson, Merton, Klapper selama periode 1950 dan 1960-an. Kelompok ini menggarisbawahi lemahnya pengaruh (*effect*) media massa dan cenderung berpandangan bahwa media massa (terutama surat kabar dan radio) kurang efektif untuk upaya-upaya merubah sikap dan pilihan-pilihan.

Berkembangnya Teori Elite Pluralis (*elite Pluralist Theory*) seolah-olah menggeser pengaruh Mazhab Columbia. Teori ini berusaha menggabungkan kedua Mazhab sebelumnya. Teori ini memberikan titik berat pada persoalan pluralisme yang ditakankan oleh Mazhab Chicago dengan kecenderngan pemilih yang apatis seperti yang dikemukakan oleh kalangan *Columbia School*.

Menurut Dennis K Davis (Pawito, 2008:104) ada 5 pendekatan yang masih relevan dalam kajian tentang berita dalam kaitannya dengan politik (a) perspektif *cultural studies*, (b) Perspektif konstruksi realitas sosial, (c) Perspektif organisasional/institusional, (d) perspektif narasi berita, dan (e) perspektif agenda *building* atau *agenda setting*.

Menurut kalangan *cultural studies* bahwa pengaruh media terhadap berbagai aspek budaya dalam masyarakat termasuk bahasa memang dapat melanggengkan *status-quo* tetapi dalam kaitan ini para wartawan pada umumnya bekerja secara netral dan obyektif.

Menurut perspektif konstruksi realias sosial bertolak dari pandangan bahwa manusia hidup di dalam kehidupan sosial yang pada dasarnya memiliki sifat ambigu yakni di sebuah dunia di mana orang, obyek dan tindakan tidak memiliki makna-makna yang inheren atau esensial. Karena makna tidak inheren dengan obyek maka makna harus dicipta atau dikonstruksi yakni dengan cara merujuk pada tindakan, peristiwa atau obyek-obyek yang lain melalui tindakan manusia.

Ada 2 teori terkemuka dalam pendekatan konstruksi realitas ini yaitu teori *agenda setting theory* dan *teori spiral of silence*. Berdasarkan pendapat dari McCombs dan Show bahwa teori *Agenda Setting* diasumsikan sebagai cara media

memberikan prioritas pada isu-isu tertentu berpengaruh secara langsung terhadap pemberian prioritas khalayak mengenai isu-isu yang berkembang atau dengan kata lain agenda media berpengaruh terhadap agenda khalayak (Pawito, 2008: 107). Kemudian Teori *Spiral of Silence* seperti yang dikemukakan oleh Noelle-Neuman bahwa ” *press coverage that predicts trends in public opinion can actually create such trends or serve as a catalyst for them.*” (liputan pers yang biasanya memberikan prediksi-prediksi tentang kecenderungan yang dimaksud atau bertindak sebagai katalis untuk terwujudnya prediksi bersangkutan) (Pawito, 2008 : 107).

Perspektif organisasional dalam studi terhadap berita beranggapan bahwa organisasi media terutama bagian pemberitaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk birokrasi dimana pengambilan keputusan terpusat di tangan para editor dan produser. Di sini dewan redaksi menentukan isu yang dijadikan berita utama serta kalangan yang dapat dijadikan sumber berita. Para reporter bekerja secara lebih terbatas dalam mengumpulkan berita dan menulis *draft* berita. Jadi berita dapat dipandang sebagai komoditas yang layak dijual kepada konsumen.

Perspektif Narasi Berita memberikan kontribusi adanya kajian tentang berita yang lebih menekankan kepada struktur-struktur berita misalnya *hardnews*, dramatisasi dalam pemberitaan dan personalisasi berita (pemberitaan dengan frame aktor sentral).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif narasi berita dimana kajian-kajian tentang beritanya lebih menekankan kepada struktur-struktur berita misalnya *hardnews*, dramatisasi dalam pemberitaan dan personalisasi berita dalam

frame aktor sentral misalnya pimpinan Partai Politik. Berita-berita yang akan dikaji bersumber dari 3 media massa yang berskala Nasional yaitu surat kabar Kompas, Republika dan Media Indonesia. Adapun pertimbangan diambilnya ketiga surat kabar tersebut adalah jumlah oplahnya yang sudah cukup banyak, usia penerbitannya cukup tua dan berskala nasional.

4. Artikel

a. Pengertian Artikel

Menurut Dedy N Hidayat bahwa Pengertian Artikel/Opini ialah : Aktualisasi perbedaan pendapat, pandangan, aspirasi atas persoalan sosial di masyarakat. Hal ini terwujud dalam halaman opini yang biasanya disediakan dalam halaman tersendiri bersama tajuk dan surat pembaca. Ini merupakan wujud dari pelaksanaan peran, fungsi serta tanggung jawab pers terhadap masyarakat (Dedy N Hidayat dalam pengantar Agus Sudibyo,2001).

Menurut AS Haris Sumadiria (2009 : 1) bahwa Pengertian artikel adalah :

Tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu (informatif), mempengaruhi dan meyakinkan (persuasif argumentatif) atau menghibur khalayak pembaca (rekreatif). Disebut lepas karena siapa pun boleh menulis artikel dengan topik bebas sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Selain itu juga artikel yang ditulis tersebut tidak terikat dengan berita atau laporan tertentu. Ditulisnya pun boleh kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja.

Jadi pengertian artikel/opini adalah Tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu (informatif), mempengaruhi dan meyakinkan (persuasif argumentatif) atau menghibur khalayak pembaca (rekreatif).

b. Karakteristik Artikel

Artikel yang ditulis untuk konsumsi surat kabar atau majalah memiliki tujuh karakteristik:

(1) Ditulis dengan atas nama (*by line story*);

Artikel adalah karya individual yang biasanya mencantumkan nama penulis di atas, di bawah judul.

(2) Mengandung gagasan aktual dan kontroversial;

Artikel hendaknya mengandung gagasan aktual, kontroversial atau kedua-duanya. Gagasan aktual berarti gagasan yang sifatnya baru, belum banyak ditulis, diketahui atau dibicarakan orang, sesuatu yang berada di luar batas yang biasa atau yang lazim

(3) Gagasan yang diangkat harus menyangkut kepentingan sebagian terbesar khalayak pembaca;

Artikel yang ditulis harus memberikan lebih banyak manfaat bagi kepentingan mayoritas masyarakat sesuai dengan pangsa pasar surat kabar atau majalah yang memuat artikel tersebut.

(4) Ditulis secara referensial dengan visi intelektual;

Artikel bukanlah karya fiksi seperti halnya cerita pendek yang lebih banyak mengandalkan imajinasi. Artikel adalah karya nonfiksi yang bertumpu pada dunia kognisi. Sebagai karya intelektual seseorang, artikel apa pun yang ditulis haruslah didukung oleh seperangkat bacaan, pengetahuan dan teori yang relevan.

(5) Disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer, komunikatif;

Ciri utama bahasa jurnalistik adalah sederhana, jelas, lugas, singkat, menarik, segar, ringan dicerna, gampang diingat, mudah dimengerti dan dipahami arti, maksud dan arahnya.

(6) Singkat dan tuntas;

Artikel bercirikan singkat maksudnya bahwa artikel yang ditulis harus ringkas, langsung pada pokok persoalan. Secara teknis, berarti disesuaikan dengan kapling atau ruangan yang tersedia yang relatif berbeda untuk setiap surat kabar (15-20 paragraf).

(7) Orisinal.

Orisinal mengandung 2 hal. Pertama, artikel yang ditulis harus merupakan karya asli, bukan hasil menjiplak atau membajak. Kedua, artikel yang ditulis dan dikirimkan ke surat kabar harus asli, bukan fotocopi.

c. Jenis-jenis Artikel

Secara umum, artikel dapat dibedakan menurut jenis serta tingkat kesulitan yang dihadapinya, antara lain :

(1) Artikel praktis

Artikel praktis lebih menekankan pada aspek ketelitian dan ketrampilan daripada masalah pengamatan dan pengembangan pengetahuan serta analisis peristiwa. Artikel praktis biasanya ditulis dengan menggunakan pola kronologis artinya pesan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan pekerjaan. Artikel praktis lebih banyak bersifat petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu (*how to do it*) misalnya petunjuk membuka internet, kiat ramping dan cantik dalam 15 hari.

(2) Artikel ringan

Artikel ringan dikemas dengan gya paduan informasi dan hiburan (*infotainment*). Artikel ringan lazim ditemukan pada rubrik anak-anak, remaja, wanita dan keluarga. Artikel jenis ini lebih banyak mengangkat topik bahasan yang ringan dengan cara penyajiannya yang ringan pula. Artikel ringan tak ubahnya makanan mie saji atau permen karet yang bisa dikunyah kapan dan di mana saja. Topik bahasan seperti kiat sukses belajar di perguruan tinggi, sepuluh ciri wanita setia, sembilan kelemahan pria di mata wanita termasuk dalam kategori artikel ringan.

(3) Artikel halaman opini

Semua artikel termasuk opini (*views*) sifatnya sebagai pandangan subyektif. Jadi berbeda dengan berita (*news*) sebagai fakta objektif. Jika memang demikian mengapa harus ada yang diberi nama artikel halaman opini? Penamaan artikel halaman opini dimaksudkan terutama untuk memudahkan kita dalam mengenali jenis-jenis artikel yang terdapat dalam surat kabar, tabloid atau majalah. Selain itu untuk mengenali karakteristik isinya, cara pendekatannya dan topik-topik yang dikupasnya. Sebagai contoh artikel yang membahas cara cepat mengatasi jerawat, tidak akan ditemukan di halan opini.

Artikel opini lazim ditemukan pada halaman khusus opini bersama tulisan opini yang lain yakni tajuk rencana, karikatur, pojok, kolom dan surat pembaca. Artikel opini mengupas suatu masalah secara serius dan tuntas dengan merujuk pada pendekatan analitis akademis. Sifatnya relatif berat. Karena itulah, artikel

opini kerap ditulis oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian atau pengalaman memadai di bidangnya masing-masing.

(4) Artikel analisis ahli

Artikel analisis ahli biasa ditemukan pada halaman muka, halaman-halaman berita atau halaman dan rubrik-rubrik tertentu. Sesuai dengan namanya, artikel jenis ini ditulis oleh ahli atau pakar di bidangnya dalam bahasa yang populer dan komunikatif. Artikel analisis ahli mengupas secara tajam dan mendalam suatu persoalan yang sedang menjadi sorotan dan bahan pembicaraan hangat masyarakat. Topik yang diangkat dan dibahas macam-macam, seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial, agama, budaya, industri dan iptek (Sumadiria, 2009:10).

d. Kedudukan dan Fungsi Artikel

Dalam surat kabar, tabloid, majalah, jurnal atau buletin, kedudukan artikel sangat strategis. Artikel termasuk salah satu dari tiga kelompok menu utama pers. Dua kelompok menu utama yang lain adalah kelompok berita (*news*) dan kelompok iklan (*advertising*). Reputasi suatu surat kabar atau majalah terbangun karena sajian berita-beritanya yang aktual melainkan juga karena ditunjang dengan kehadiran artikel-artikelnya yang ditulis oleh pakar dari latar belakang disiplin ilmu, profesi dan keahlian yang sangat beragam.

Ada dua fungsi artikel dalam surat kabar, tabloid dan majalah.

(1) Sebagai penafsir dan penerjemah berita bagi surat kabar.

Bagi surat kabar, tabloid atau majalah, artikel yang ditulis oleh para pakar di bidangnya masing-masing, berfungsi sebagai pendamping sekaligus sebagai

penerjemah, penafsir dan penganalisis berita. Berita datang begitu cepat, begitu banyak, berlangsung terus-menerus, namun sering hanya sepotong-sepotong, terpecah-pecah dan berserakan. Artikel berfungsi untuk menggabungkan atau menyatukan serpihan fakta-fakta dalam berita yang berserakan itu ke dalam satu bangunan satu cerita yang utuh, jelas, tegas dan enak dibaca.

Oleh karena itu, para pembaca yang ingin mengetahui suatu persoalan secara mendalam dan tajam, semestinya juga membaca artikel tentang topik yang sedang menjadi pusat perhatian dan pembicaraan berbagai lapisan masyarakat. Hanya topik-topik aktual yang muncul dan dibahas dalam artikel surat kabar, tabloid atau majalah. Sekali lagi, fungsi artikel adalah sebagai pendamping sekaligus penerjemah berita.

Jadi memang bagi surat-surat kabar berkualitas, kehadiran artikel merupakan suatu keharusan sebagai syarat mutlak dan bukan sebagai pilihan. Tetapi bagi surat kabar bermodal kecil dengan tiras maksimal 5000 eksemplar sekali terbit, artikel opini, kolom dan karikatur sering ditiadakan. Terdapat tiga mazhab pendapat dengan penganutnya masing-masing tentang peniadaan rubrik opini tersebut.

Mazhab pertama berpendapat artikel adalah karya individual pembaca yang harus dibayar secara layak. Karena masih dihadapkan pada keterbatasan modal dan keuangan, maka efisiensi menjadi pilihan mutlak dan untuk sementara rubrik opini lebih baik ditiadakan. Para pengelola khawatir dicap tidak menghargai karya intelektual para penulis yang seharusnya memperoleh imbalan yang memadai.

Mazhab kedua berpendapat, bagi surat kabar yang baru atau belum lama terbit atau baru seumur jagung dengan dukungan modal dan finansial yang sangat terbatas, pas-pasan, halaman khusus opini yang memuat tajuk rencana, karikatur, artikel, kolom dan surat pembaca, lebih baik digunakan untuk berita atau rubrik-rubrik tertentu yang dirancang untuk mencari, memperluas dan meningkatkan jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, atau ormas dan perusahaan swasta seperti rubrik laporan khusus, infotorial, advertorial, sponsorship.

Mazhab ketiga berpandangan, artikel, kolom dan karikatur termasuk "rubrik pemborosan" yang tidak mendatangkan uang atau iklan. Dalam perspektif bisnis penerbitan pers, setiap rubrik yang berpotensi melahirkan pemborosan atau efisiensi mutlak harus dikaji-ulang secara seksama atau bahkan tak ada pilihan lain, harus ditiadakan. Pandangan demikian sebenarnya tidak tepat, karena kehadiran artikel memang tidak berbanding lurus dengan perolehan iklan sesaat. Kehadiran artikel berkaitan dengan reputasi, kredibilitas atau citra suatu surat kabar secara keseluruhan.

(2) Sebagai wahana diskusi dan sosialisasi gagasan, kontribusi pemikiran dalam kerangka mencari solusi, serta proses sarana aktualisasi dan eksistensi diri bagi penulis.

Bagi para penulis, artikel yang ditulisnya dan dimuat pada surat kabar, tabloid atau majalah, terutama dimaksudkan untuk mencapai tiga hal :

(a) Wahana diskusi dan sosialisasi gagasan kepada masyarakat luas

Sebagai seorang intelektual, penulis adalah orang selau resah atas berbagai hal yang dibaca, dilihat, didengar dan bahkan dialaminya sendiri. Keresahan itu lalu dituangkan dalam artikel. Penulis artikel biasanya memaparkan fenomena yang mengusik dan menganalisis pokok persoalannya, lalu memberikan penilaian dan menentukan sikap. Sebagai seorang intelektual, penulis artikel bersikap atas nama kebenaran, kejujuran, keadilan, demokrasi, penegakan hukum, norma-norma sosial agama, atau sesuatu yang sifatnya sangat normatif dan diakui secara universal. Dalam proses diskusi terbuka itu, terserah pembaca, apakah akan mengikuti dan turut menyebarkan atau bahkan menolak gagasan yang ditawarkan oleh penulis tersebut.

(b) Kontribusi pemikiran dalam kerangka mencari solusi

Bagi penulis artikel atau kolom jenis ini, menulis untuk media massa terutama didorong oleh tekadnya memberikan kontribusi pemikiran dalam kerangka mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dan bangsa. Berdasarkan ilmu, pengetahuan, kedudukan dan pengalaman yang dimilikinya, penulis bisa memberi penjelasan dan masukan secara aktual, akurat dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan) terhadap suatu departemen pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau terhadap pihak-pihak yang sedang menghadapi persoalan cukup berat.

(c) Sarana proses aktualisasi dan eksistensi diri.

Tidak sedikit orang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, profesi dan pekerjaan yang dengan penuh kesadaran sengaja menulis artikel konsumsi pers sebagai sarana aktualisasi sekaligus menunjukkan eksistensinya kepada

mesyarakat luas. Biasanya para mantan pejabat pemerintah seperti gubernur atau walikota dan bupati, mantan pejabat militer seperti jenderal purnawirawan, mantan pejabat negara seperti menteri, mantan *public figur* seperti bintang film berusia senja atau atlet-atlet nasional yang pernah mengukir sejarah pada masa jayanya terpanggil atau mencari kesibukan dengan cara menjadi penulis atau kolumnis media massa terbitan ibukota dan daerah.

5. Ideologi Media

a. Pengertian Ideologi Media

Ada sejumlah definisi ideologi. Raymond Williams (1977) menemukan tiga penggunaan utama :

(1). Suatu sistem keyakinan yang menandai kelompok atau kelas tertentu.

Penggunaan definisi ini lebih dekat diterapkan di kalangan psikologi. Para psikolog menggunakan "ideologi" dengan diacukan pada cara sikap diorganisasikan ke dalam pola-pola yang koheren. Misalnya ada seorang yang menganut sejumlah sikap tertentu tentang anak muda. Dia yakin bahwa menjalani tugas beberapa tahun dalam wajib militer akan memberi anak muda tu "kekuatan" dan memecahkan hampir semua masalah sosial. Adanya keyakinan itu mungkin meramalkan sikap seperti orang tadi akan ditujukan pada subjek-subjek seperti kejahatan dan hukuman, kelas, ras dan agama. Bila ramalan itu tepat, kita akan bisa menyatakan bahwa orang itu berideologi sayap kanan dan otoriter. Jadi ideologi di sini adalah sesuatu yang memberi dan koherensi pada sikapnya dan memungkinkannya untuk menyesuaikan diri secara memuaskan. Namun seperti yang ditegaskan beberapa psikolog bahwa ideologi itu ditentukan masyarakat,

bukan oleh serangkaian sikap dan pengalaman individu yang mungkin saja khas. Marxis yang cenderung memandang istilah ini sebagai miliknya yang khusus selalu menghubungkan ideologi dengan relasi sosial. Ia ditentukan secara sosial, bukan secara individualistik. Bagi Marxis, fakta sosial yang menentukan ideologi adalah kelas dalam bentuk pembagian kerja.

(2). Suatu sistem keyakinan ilusioner-gagasan palsu atau kesadaran palsu yang bisa dikontraskan dengan pengetahuan sejati atau pengetahuan ilmiah.

Di sini Williams menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penggunaan 1 dan 2 akan berbaur. Karena itu ideologi menjadi kategori-kategori ilusi dan kesadaran palsu yang berdasarkan hal itu, kelas yang berkuasa menjaga dominasinya terhadap kelas pekerja. Karena kelas yang berkuasa mengontrol sarana-sarana pokok tempat ideologi digandakan dan disebarluaskan pada seluruh masyarakat, maka ideologi bisa membuat kelas pekerja melihat subordinasinya itu sebagai hal yang "alami" dan karena "alami" maka benar. Di sinilah terletak kekeliruannya. Media ideologis tersebut mencakup sistem-sistem pendidikan, politik dan hukum serta media massa dan penerbitan buku.

(3). Proses umum produksi makna dan gagasan.

Inilah yang paling mendominasi dari ketiganya. Bahkan, tiga penggunaannya mungkin hampir bisa dimodelkan sebagai kotak Cina-1 ada di dalam 2 yang keduanya ada di dalam 3. Ideologi di sini merupakan istilah yang digunakan untuk melukiskan produksi sosial atas makna. Inilah cara Barthes menggunakan istilah ini tatkala dia berbicara tentang pengkonotasi (*connotator*), yakni penanda konotasi sebagai "retorika ideologi". Dalam penggunaannya yang

seperti ini, ideologi merupakan sumber pemaknaan tatanan kedua. Mitos dan nilai-nilai konotatif adalah ideologi karena ideologi itulah maka mitos dan konotasi mewujudkan kegunaannya (Fiske, 2010:228-231)

Dalam penelitian akan menggunakan penggunaan 3 bahwa ideologi itu merupakan istilah yang digunakan untuk melukiskan produksi sosial atas makna. Dalam penggunaannya yang seperti ini, ideologi merupakan sumber pemaknaan tatanan kedua. Mitos dan nilai-nilai konotatif sebagai "retorika ideologi".

b. Teori-teori ideologi media

(1). Teori "Interpelasi" dari Louis Althusser (1971)

Teori ideologi sebagai sebuah praktik dikembangkan oleh Louis Althusser (1971), Marxis generasi kedua yang dipengaruhi gagasan-gagasan Saussure dan Freud, dan orang yang membawa teori-teori struktur dan teori ketaksadaran untuk menunjang teori-teori Marx yang lebih bersifat ekonomistik.

Bagi Marx, ideologi merupakan suatu konsep yang relatif langsung. Ideologi merupakan sarana yang digunakan untuk ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai alami dan wajar. Semua pengetahuan adalah berbasis kelas, pengetahuan dituliskan di dalam asal usul kelasnya dan bekerja untuk melebih-lebihkan kepentingan kelasnya. Marx memahami bahwa para anggota kelas subordinat, yakni kelas pekerja, digiring untuk memahami pengalaman sosial dan relasi sosial mereka sehingga memahami mereka sendiri dengan menggunakan serangkaian gagasan yang bukan miliknya sendiri, yang datang dari kelas yang kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial serta politiknya bertentangan.

Menurut Marx, ideologi bourgeois menjaga para pekerja atau kaum proletar, tetap berada dalam kesadaran palsu. Kesadaran manusia tentang siapa dirinya, bagaimana mereka berrelasi dengan bagian lain dari masyarakat dan karena itu pengertian mereka tentang pengalaman sosialnya dihasilkan oleh masyarakat, bukan oleh alam atau biologi. Kesadaran kita ditentukan oleh masyarakat tempat kita dilahirkan, bukan oleh alam atau psikologi individu.

Konsep ideologi sebagai kesadaran palsu sangatlah penting dalam teori Marx karena tampaknya hal ini menjelaskan mengapa mayoritas dalam masyarakat kapitalis menerima sebuah sistem sosial yang tak menguntungkan mereka. Namun Marx meyakini bahwa "realitas" ekonomi lebih berpengaruh, setidaknya dalam jangka panjang, dibandingkan dengan ideologi dan pada akhirnya pastilah para pekerja akan meruntuhkan kelas borjuis itu dan melahirkan sebuah masyarakat yang di dalamnya suatu kelas tidak mendominasi dan mengeksploitasi mayoritas, sehingga tak perlu lagi menjaga mereka yang berada dalam kesadaran palsu. Dalam masyarakat yang setara dan fair tidak diperlukan ideologi karena setiap orang akan memiliki kesadaran "sejati" tentang diri mereka sendiri dan relasi sosial mereka. Guna membantu menelaah hal ini, para pemikir Marxis seperti Althusser (1971) mengembangkan suatu teori ideologi yang lebih piawai yang melepaskan teorinya dari relasi sebab-akibat yang erat dengan basis ekonomi masyarakat. Selain itu merumuskan kembali ideologi sebagai sekumpulan praktik yang terus berlangsung dan meresap yang dilakukan semua kelas dan bukannya sekumpulan gagasan yang dipaksakan oleh satu kelas pada kelas-kelas yang lain. Kenyataan bahwa semua kelas berpartisipasi dalam praktik-

praktik tersebut tidaklah berarti bahwa praktik-praktik mereka sendiri tak lagi diabdikan untuk kepentingan kelas dominan. Ideologi jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang dibahas Marx karena ideologi bekerja dari dalam bukan dari luar kelas.

Misalnya seorang wanita mengenakan sepatu berhak tinggi, tak dipaksakan oleh pihak wanita dari gagasan-gagasan gender yang tak berkuasa (pria). Tetapi wanita itu mengenakannya sebagai sebuah praktik ideologi patriarki yang di dalamnya para wanita itu sendiri berpartisipasi, bahkan mungkin lebih dari yang diminta ideologi itu sendiri. Mengenakan sepatu hak tinggi dapat mngaksentiasi bagian-bagian tubuh wanita yang menarik bagi pria yaitu pinggul, paha dan payudara. Mengenakan sepatu tinggi sesungguhnya membatasi dan mengurangi kekuatan dan aktivitas fisik sehingga dapat disebut sebagai praktik subordinasi wanita dalam patriarki.

Salah satu praktik yang sangat banyak terdapat di mana-mana dan tersembunyi adalah apa yang disebut Althusser "interpelasi" atau "panggilan." Hal ini yang relevan dengan yang dipraktikkan dalam setiap tindakan komunikasi. Semua komunikasi ditujukan pada seseorang dan dalam menyampaikannya tentu saja menempatkan orang itu dalam relasi sosial. Dalam mengakui diri kita sendiri sebagai sasaran dan dalam memberi respons pada komunikasi, maka kita berpartisipasi dalam konstruksi sosial kita sendiri, sehingga karenanya bersifat ideologis. Bila kita mendengar orang memanggil di jalan, "Hei" kita bisa membalikkan badan karena yakin bahwa kitalah yang menjadi sasaran teriakan itu. Semua komunikasi menginterpelasi atau memanggil kita dengan beberapa

cara: sepasang sepatu tinggi misalnya memanggil wanita (atau pria) yang menjawabnya dengan menyukai atau mengenakan sepatu hak tinggi itu sebagai subjek patriarki. Wanita yang mengakui dirinya sendiri sebagai sasaran yang bersepatu hak tinggi, memposisikan dirinya sendiri dalam relasi gender. Pria yang menyukai wanita yang bersepatu hak tinggi diposisikan sebagai orang yang memiliki kekuasaan.

Begitu juga halnya bila kita dipanggil oleh iklan berarti kita mengambil sebuah posisi sosial dari suatu subjek kelas menengah maskulin. Menerima gagasan feminim secara murni dan gagasan maskulin sebagai koruptor seperti ular dan memandang sebagai "anggapan umum" bahwa pria adalah penggoda dan wanita digoda merupakan sebuah praktik patriarki. Jadi iklan mengajak kita, pria atau wanita untuk mengidentifikasi diri kita dengan cara maskulin memahami ular, alkohol dan godaan dan memahami diri kita sendiri menjadi pembaca yang dipanggil iklan. Inilah butir pentingnya yaitu menunjukkan bahwa interpelasi bisa memposisikan kita dalam suatu kategori ideologi yang bisa dibedakan dari posisi sosial aktual kita. Begitu juga halnya dengan wanita bisa diposisikan "sebagai pria" untuk membuat pemahaman maskulin atas dirinya sendiri dan relasi sosialnya. Misalnya orang kulit hitam bisa diposisikan sebagai kulit putih, kelas pekerja sebagai kelas menengah dan seterusnya. Komunikasi merupakan suatu proses sosial dan karena itu pasti ideologis: interpelasi merupakan bagian kunci dan praktik ideologisnya.

Teori Althusser tentang ideologi sebagai praktik merupakan pengembangan dari teori Marx tentang ideologi sebagai kesadaran palsu, namun

dengan tetap menekankan peran ideologi dalam jaga kekuasaan minoritas atau mayoritas.

(2). Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci

Marxis generasi kedua dari Eropa lainnya adalah Antonio Gramsci yang memperkenalkan bidang ini dalam istilah lainnya yaitu hegemoni yang berarti ideologi sebagai perjuangan. Secara singkat hegemoni melibatkan memenangkan dan memenangkan kembali secara terus-menerus kesepakatan di kalangan mayoritas terhadap sistem yang menempatkan mereka sebagai subordinat. Ada dua unsur yang lebih ditekankan Gramsci dibandingkan Marx atau Althusser yakni resistensi dan instabilitas.

Hegemoni diperlukan karena pengalaman sosial kelompok-kelompok subordinat (baik berdasarkan kelas, gender, ras, usia atau pun faktor lain) terus-menerus memberi gambaran yang bertentangan dengan lukisan ideologi dominan yang dibuat untuk mereka oleh mereka sendiri dan relasi sosialnya. Dengan kata lain, ideologi dominan terus-menerus berhadapan dengan resistensi yang harus diatasi namun tidak pernah bisa dihilangkan. Jadi setiap kemenangan hegemonis, setiap kesepakatan itu tak pernah bisa siap pakai, sehingga harus diraih kembali dan diperjuangkan terus-menerus.

Salah satu strategi hegemoni yang penting adalah mengkonstruksi "anggapan umum" (*common sense*). Artinya bila gagasan kelas berkuasa bisa diterima sebagai anggapan, maka tujuan ideologisnya tercapai dan kerja ideologisnya pun tersembunyi. Karena itu misalnya "anggapan umum" dalam masyarakat kita bahwa kriminal itu adalah individu yang jahat atau kurang baik

sehingga perlu dihukum atau dipenjara. Anggapan umum seperti itu menyembunyikan fakta bahwa pelanggar hukum adalah manusia yang berasal dari kelompok-kelompok sosial yang dirugikan atau dilemahkan secara tidak proporsional bahwa mereka adalah bagian dari kelompok ras, kelas atau usia yang "salah." Oleh karena itu, anggapan umum mengabaikan kemungkinan bahwa penyebab itu lebih bersifat sosial ketimbang individual. Anggapan umum bahwa kriminalitas merupakan sebuah fungsi dari individu yang jahat ketimbang masyarakat yang tak adil merupakan bagian dari ideologi borjuis dan sejauh ini diterima oleh kelompok subordinat (bahkan oleh para kriminal sendiri yang merasa pantas memperoleh hukuman dan karena itu sistem peradilan kriminal gagal) itulah hegemoni.

Teori-teori ideologis menekankan bahwa semua komunikasi dan semua makna memiliki dimensi sosio-politik dan bahwa komunikasi dan makna itu tak bisa dipahami di luar konteks sosialnya. Kerja ideologis ini selalu mendukung status quo, mendukung kelas-kelas dengan kuasa dominsi produksi dan distribusi bukan hanya barang tapi juga gagasan dan makna. Sistem ekonomi pun diorganisasikan sesuai dengan kepentingannya. Sistem ideologi bersumber dari sistem ekonomi itu dan bekerja untuk mendorong, menaturalisasikan dan menyembunyikan kepentingan tadi. Apapun perbedaannya, semua teori ideologi sepakat bahwa ideologi bekerja untuk menjaga dominasi kelas; perbedaan di antara teori-teori ideologi itu hanya berkenaan dengan cara-cara menjalankan dominasi tersebut, yaitu derajat efektivitasnya dan meluasnya resistensi yang dihadapinya.

Untuk menyimpulkannya secara ringkas, kita bisa menyatakan bahwa teori Marx tentang ideologi sebagai kesadaran palsu terkait erat dengan basis ekonomi masyarakat dan menempatkan kepalsuannya itu pada kondisi-kondisi material kelas pekerja yang tak pelak lagi merupakan hasil dari runtuhnya tatanan ekonomi yang memproduksinya. Marx melihat beban gagasan minoritas dominan yang ditimpakan pada mayoritas subordinat. Kelompok mayoritas ini pada akhirnya mesti melihat melalui kesadaran palsu ini dan merubah tatanan sosial yang dipaksakan terhadap mereka.

Teori Althusser tentang ideologi sebagai praktik, tampaknya melihat tak ada batas-batas pada ideologi, baik dalam jangkauannya terhadap semua aspek kehidupan kita maupun secara historis. Kekuatan ideologi terletak pada kemampuannya untuk melibatkan kelompok subordinat dalam praktiknya sehingga membawa mereka untuk mengkonstruksi identitas sosial atau subjektivitas untuk mereka sendiri dan melawan kepentingan-kepentingan sosial politik mereka sendiri. Kesimpulan logis dari teorinya adalah bahwa tak ada cara untuk melarikan diri dari ideologi, walaupun pengalaman sosial materialnya mungkin bertentangan dengan hal itu, satu-satunya sarana yang dimiliki untuk memahami bahwa pengalaman selalu bermuatan ideologis (*ideologically loaded*). Oleh karena itu, satu-satunya pemahaman yang bisa dilakukan adalah memahami diri sendiri, relasi sosial yang di dalamnya dipraktikkan ideologi dominan.

Namun teori Gramsci tentang hegemoni atau ideologi sebagai perjuangan memberikan tekanan yang jauh lebih besar pada resistensi. Sembari banyak setuju dengan Althusser bahwa kelompok subordinat bisa saja sepakat pada ideologi

dominan sehingga berpartisipasi dalam penyebarluasannya, teori Gramsci juga menegaskan bahwa kondisi sosial material mereka bertentangan dengan yang dominan sehingga melahirkan resistensi. Gramsci memberi penekanan yang lebih besar pada resistensi bahwa ideologi bisa mengatasi namun tak pernah bisa menghapuskan resistensi itu. Oleh karena itu, teorinya akhirnya lebih memuaskan karena memasukkan lebih banyak kontradiksi yang membentuk pengalaman sosial. Teori Gramsci membuat perubahan sosial itu tampak mungkin terjadi, sedangkan Marx menyebutnya tak terelakkan dan bagi Althusser mustahil.

c. Cara kerja ideologi media

Ideologi bekerja untuk menghasilkan makna melalui tanda. Oposisi biner mendalam yang menjadi struktur program adalah antara ilmu dan non-ilmu. Struktur dalam program, dengan kerangka ideologisnya bisa dinyatakan sebagai ilmu dan non-ilmu. Ideologi ilmu adalah apa yang memang benar-benar dinyatakan dalam program acara tertentu. Contohnya ada 2 gambar yang merupakan penanda yang berbeda namun memiliki kesamaan petanda. Jelas di sini ada perbedaan marjinal dalam penanda namun inti petandanya adalah sama bagi kedua tanda. Seorang anggota budaya non-ilmu di sebelah kanan pastilah memiliki konsep yang berbeda dengan kita. Penandanya akan sama bagi kedua budaya, namun petandanya akan berbeda secara signifikan. Perbedaan dalam petanda merupakan perbedaan dalam ideologi.

Pada tatanan kedua pertandaan, ilmu dipahami melalui mitos Barthesian yang mencakup konsep-konsep seperti pemecah masalah yang utama, kemampuan manusia memahami dan mendominasi alam, meningkatkan

kesejahteraan material dan keamanan dan menunjukkan puncak-puncak prestasi manusia. Oleh karena itu, konotasi ilmu adalah nilai fungsional dan moral yang positif: ilmu itu berfaedah dan baik. Tentu saja di sini ada kontradiksi dengan konotasi lainnya yang tepat yang berkembang di kalangan subkultur ekologi/konservasionis. Tatanan kedua pemaknaan ilmu tersebut diperoleh melalui ideologi dominan dari kebudayaan kita, yang melihat sejarah sebagai kemajuan, perubahan sebagai hal yang tak terhindarkan, dan menuju keadaan yang lebih baik, yang memberi prioritas yang tinggi pada perbaikan kesejahteraan materi

6. Teori Wacana

Wacana atau *discourse* berasal dari bahasa latin *discursus* yang berarti "lari kian kemari" yang diturunkan dari *dis* "dari dalam arah yang berbeda" dan *currere* "lari".

Alex Sobur memberikan definisi wacana sebagai berikut yaitu :

- a. Komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi dengan kata-kata, ekspresi, ide-ide, gagasan, konversasi kata percakapan.
- b. Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu objek studi atau pokok telaah.
- c. Risalah tulis, disertasi formal, kuliah, ceramah maupun khotbah (Alex Sobur, 2001: 9-10)

Menurut Littlejohn (1996) membagi teori wacana menjadi dua aliran besar.

Pertama, teori kaidah (*rule theory*). Teori ini memandang manusia dalam aktivitasnya dilingkupi oleh segenap aturan atau kaidah kebahasaan, wacana dan

tindakan sosial. Manusia dengan bahasanya tidak dapat menggunakan kalimat pesan secara sembarangan karena di atunduk pada kaidah-kaidah bahasa (gramatikal) di luar dirinya. Aturan-aturan tersebut telah menjadi kesepakatan bersama (konvensi) dan telah menjadi milik publik. Orang yang tidak menggunakan kaidah-kaidah bahasa tersebut akan berusaha menghindarinya pasti akan dianggap "asing" oleh masyarakat di mana kaidah itu berlaku.

Kedua, teori tindak bicara (*speech-act theory*). Ludwig Wittgenstein seorang ahli filsafat Jerman mengemukakan bahwa makna bahasa tergantung pada penggunaan aktualnya. Bahasa sehari-hari merupakan sebuah permainan bahasa. Masing-masing mempunyai aturan main sendiri sebagaimana kita bermain kartu. (Alex Sobur, 2001: 10).

Menurut Eriyanto bahwa :

Analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa terutama politik bahasa. Karena bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya, maka aspek inilah yang dipelajari dalam analisis wacana (Eriyanto, 2001 : 3).

Dalam ilmu linguistik, wacana merupakan satuan bahasa yang utuh dan lengkap. Selain itu wacana yang juga disebut sebagai satuan gramatikal tertinggi dan terbesar mempunyai sifat kohesif dan koheren. Wacana memiliki alat pembentuknya yang terdiri dari dua aspek yaitu alat gramatikal dan semantik. Alat gramatikal dari wacana ialah :

- a. Konjungsi yaitu alat untuk menghubungkan-hubungkan bagian-bagian kalimat atau paragraf. Hal ini menunjukkan hubungan menjadi lebih eksplisit.
- b. Kata ganti dia, nya, mereka, ini dan itu sebagai rujukan anaforis.
- c. Menggunakan ellipsis, yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama yang bagian kalimat atau isi terdapat pada kalimat yang lain. (Eriyanto, 2001)

Sedangkan dari aspek semantik , alat wacana antara lain :

- a. Menggunakan hubungan pertentang pada kedua bagian kalimat.
- b. Menggunakan hubungan generik-spesifik atau sebaliknya, spesifik-generik.
- c. Menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua kalimat.
- d. Menggunakan hubungan sebab-akibat di antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua kalimat.
- e. Menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana.
- f. Menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana.

Menurut Abdul Chaer bahwa :

Jenis wacana dalam ilmu linguistik dibedakan menjadi sarana, penggunaan bahasa uraian dan penyampaian isi. Menurut sarana yang digunakan wacana dibagi menjadi dua yaitu wacana lisan dan tulis. Menurut penggunaan bahasa ada wacana prosa dan puisi. Sedangkan untuk penyampaian isinya wacana dibagi menjadi empat yaitu wacana yang bersifat menceritakan sesuatu topik atau hal. Kedua, wacana ekposisi yaitu wacana yang bersifat memaparkan topik atau fakta. Ketiga, wacana persuasi yaitu wacana yang bersifat memberi argumen atau alasan terhadap suatu hal. (1994: 269)

Ada beberapa tokoh dan pemikirannya tentang teori wacana yaitu :

a. Sara Mills

Sara Mills menitikberatkan perhatiannya terutama pada wacana mengenai feminisme, bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto ataupun dalam berita. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Sara Mills sering disebut sebagai perspektif feminis. Fokus dari perspektif wacana feminis adalah menunjukkan bagaimana teks bias dalam menampilkan wanita.

b. Theo van Leeuwen

Menurut Eriyanto (2001: 171) bahwa :

Theo memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana suatu kelompok dominan (*dominant class*) lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain (*subordinate class*) yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Jadi ada kelas dominan dan kelas *subordinate*

Contoh beberapa kelompok yang termasuk subordinat yaitu kelompok petani, buruh, nelayan, imigran gelap, wanita dan sebagainya. Kelompok ini adalah kelompok yang bukan hanya secara riil tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan tetapi juga dalam wacana pemberitaan sering digambarkan secara buruk. Disini ada kaitan antara wacana dengan kekuasaan atau pertentangan antara kelas dominan dengan kelas subordinat.

c. Norman Fairlough

Analisis Norman Fairlough didasarkan pada pertanyaan besar bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Fairlough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya.

Menurut Eriyanto(2001:285) bahwa :

Titik perhatian besar dari Fairlough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Guna melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu dibutuhkan analisis yang menyeluruh. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu.

Fairlough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi yaitu *teks*, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Teks di sini dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Di samping itu juga dimasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian.

Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sebuah teks berita pada dasarnya dihasilkan lewat proses produksi teks yang berbeda seperti bagaimana pola kerja dan rutinitas dalam menghasilkan berita. Proses konsumsi teks bisa jadi berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. Misalnya ketika seseorang mengkonsumsi teks puisi atau peraturan perundang-undangan.

Sociocultural practice adalah dimensi yang berhubungan dengan kontek di luar teks. Konteks di sini memasukkan banyak hal seperti konteks situasi dari praktik institusi media, ekonomi media, budaya media yang berpengaruh terhadap berita yang dihasilkan. (Eriyanto, 2001 :286-288).

d. Teun A van Dijk

Model yang dipakai oleh van Dijk sering disebut sebagai "kognisi sosial". Menurut van Dijk (Eriyanto, 2001: 221) bahwa :

Penelitian atas wacana tidak cukup hanya berdasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga dapat diperoleh suatu pengetahuan tentang teks tersebut.

Misalnya ada suatu teks berita yang memarjinalkan wanita, maka dibutuhkan suatu penelitian yang melihat bagaimana produksi teks itu bekerja, mengapa teks berita itu memarjinalkan wanita. Proses produksi itu melibatkan suatu proses yang disebut dengan kognisi sosial, yaitu suatu istilah yang diadopsi ilmu psikologi sosial terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Suatu teks yang cenderung memarjinalkan posisi wanita, misalnya lahir karena kognisi/kesadaran mental di antara wartawan bahkan kesadaran dari masyarakat yang memandang wanita secara rendah.

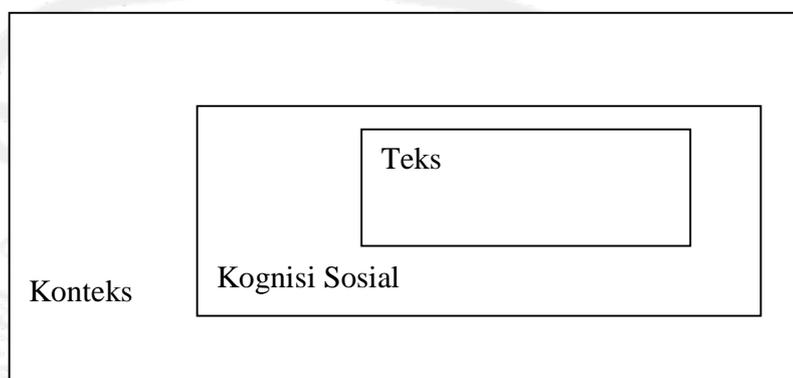
Kalau ada teks berita yang memarjinalkan wanita, bukan berarti teks tersebut suatu ruang hampa, bukan pula sesuatu yang datang dari langit. Teks itu hadir dan bagian dari representasi yang menggambarkan masyarakat yang patriarkhal. Di sini ada dua bagian yaitu teks yang mikro merepresentasikan marjinalisasi terhadap wanita dalam berita, dan elemen besar berupa struktur sosial yang patriarkhal.

Van Dijk membuat suatu jembatan yang menghubungkan elemen besar berupa struktur sosial tersebut dengan dengan elemen wacana yang mikro dengan sebuah dimensi yang dinamakan kognisi sosial.

Kognisi sosial itu mempunyai 2 arti. Di satu sisi menunjukkan bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh wartawan/media, di sisi lain menggambarkan bagaimana nilai-nilai masyarakat yang patriarkhal itu menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan, dan akhirnya digunakannya untuk membuat teks berita.

Van Dijk tidak mengeksklusi modelnya semata-mata dengan menganalisis teks semata. Ia juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu. Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan yaitu teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis.

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Model dari analisis van Dijk ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam penelitian ini peneliti juga berusaha menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan tema tentang koalisi antarpolitik dalam pemilihan kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang terdapat dalam *headline*, artikel/opini, tajuk rencana/editorial dan berita. Sedangkan dalam aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang akan suatu masalah-masalah yang berkaitan dengan koalisi antarpolitik, misalnya mengenai makna koalisi pragmatis (taktis) seperti , *power sharing*, *power bargaining*, *lobbying*, dominasi (*dominant class*) versus subordinat (*subordinate class*).

Dalam penelitian ini menggunakan teori wacana yang digunakan oleh Teun A van Dijk karena teori ini mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis disamping dengan teorinya Norman Fairclough dan Wodak.

7. Analisis Wacana

Dalam analisis wacana, wacana di sini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis ini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteksnya. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktek kekuasaan (Eriyanto, 2001 : 7).

Analisis wacana melihat bahasa sebagai faktor penting yakni bagaimana bahasa untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi.

Ada beberapa pendekatan dalam analisis wacana yakni :

- a. Analisis bahasa kritis (*critical linguistics*)
Di sini memusatkan perhatian analisis wacana pada bahasa dan menghubungkannya dengan ideologi. Inti dari gagasan pendekatan ini adalah bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu.
- b. Analisis wacana pendekatan Perancis (*French discourse analysis*)
Menurut Pecheux, bahasa adalah medan pertarungan melalui mana berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya.
- c. Pendekatan kognisi sosial
Tokoh utama dari pendekatan ini adalah Teun A van Dijk. Ia melihat faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana. Jadi wacana dilihat tidak hanya dari struktur wacana, tetapi juga bagaimana wacana itu diproduksi.
- d. Pendekatan perubahan sosial

Di sini memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Jadi ada hubungan dialektis antara praktik diskursif tersebut dengan identitas dan relasi sosial. Artinya wacana juga melekat pada situasi, institusi dan kelas sosial tertentu.

- e. Pendekatan wacana sejarah (*discourse historical approach*)
Menurut tokohnya yaitu Wodak, bahwa analisis wacana harus menyertakan konteks sejarah tentang suatu kelompok atau komunitas yang digambarkan.

Karakteristik penting dari analisis wacana mengutip pendapat Teun A van Dijk adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan

Di sini wacana sebagai sebuah tindakan (*action*). Konsekuensi yang pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi dan sebagainya. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

- b. Konteks

Di sini wacana diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Mengikuti Guy Cook, analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi : siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi dan hubungan untuk setiap masing pihak. Sebagaimana Guy Cook menyebut ada 3 hal sentral dalam wacana, yakni teks, konteks dan wacana. Wacana di sini dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama.

Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama dalam banyak relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, setting sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana.

- c. Historis

Pemahaman mengenai wacana hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Bagaimana situasi sosial politik, suasana pada saat itu. Oleh karena itu pada saat melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu dan seterusnya.

- d. Kekuasaan

Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Hal ini mengimplikasikan analisis wacana kritis tidak membatasi dirinya pada detail teks atau struktur wacana saja tetapi

dihubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya tertentu.

Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana penting untuk melihat apa yang disebut dengan kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain lewat wacana. Kontrol di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung tetapi juga kontrol secara mental atau psikis. Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut bisa berupa kontrol dan konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, sementara siapa pula yang hanya bisa mendengar dan mengiyakan. Selain konteks, kontrol tersebut juga diwujudkan dalam bentuk mengontrol struktur wacana. Ini dapat terlihat dari penonjolan atau pemakaian kata-kata tertentu.

e. Ideologi

Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentang ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.

Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted*. Wacana dalam pendekatan ini dipandang sebagai medium melalui kelompok yang dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga tampak absah dan benar.

Van Dijk menjelaskan fenomena yang disebut sebagai "kesadaran palsu", bagaimana kelompok yang dominan memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye disinformasi melalui kontrol media dan sebagainya.

Sedangkan ciri dan sifat analisis wacana menurut Syamsuddin AR (Alex Sobur, 2001: 49) adalah sebagai berikut :

- a. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat.
- b. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks dan situasi
- c. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik
- d. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa.
- e. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional.

Menurut van Dijk, analisis wacana teks tertulis tidak terbatas pada struktur-struktur tekstual karena struktur-struktur semacam ini telah memberikan atau mengekspresikan beberapa makna, opini dan ideologi untuk menunjukkan bagaimana makna-makna ini dihubungkan dengan

teks. Sehingga dibutuhkan analisis lain yang membantu untuk lebih memahami teks tersebut seperti analisis kognisi dan konteks sosial. Analisis kognisi menjadi penting karena pendekatan kognitif ditentukan pada fakta bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu ditujukan pada penggunaan bahasa atau lebih tepatnya dengan proses mental dari penggunaan bahasa.

Jadi mengkaji pesan media dengan menggunakan analisis wacana berarti mengungkap makna tersembunyi yang hendak disampaikan media.

8. Representasi

Istilah representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok atau gagasan ditampilkan sebagaimana mestinya. Kata semestinya ini mengacu pada apakah seseorang atau kelompok itu diberitakan apa adanya atau diburukkan. Penggambaran yang tampil bisa saja penggambaran yang buruk dan cenderung memarjinalkan seseorang atau kelompok tertentu. Di sini hanya citra yang buruk saja yang ditampilkan sementara citra atau sisi yang baik luput dari pemberitaan. Dalam kata lain, berarti dengan kata, kalimat, aksentuasi dan bantuan foto macam apa seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan dalam pemberitaan kepada khalayak.

Menurut John Fiske, saat menampilkan objek, peristiwa, gagasan, kelompok atau seseorang paling tidak ada 3 proses yang dihadapi oleh wartawan. Pada level pertama, adalah peristiwa yang ditandakan (*encode*) sebagai realitas. Misalnya dalam bahasa gambar (terutama televisi) berhubungan dengan pakaian, lingkungan, ucapan dan ekspresi. Pada level kedua, bagaimana realitas itu digambarkan. Misalnya dalam bahasa gambar (terutama televisi) alat itu berupa kamera, pencahayaan, editing atau musik. Pada level ketiga, bagaimana peristiwa tersebut diorganisir ke dalam konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis. Bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam koherensi sosial seperti kelas sosial atau

kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat (patriarkhi, materialisme, kapitalisme dan sebagainya). Menurut Fiske, ketika kita melakukan representasi tidak bisa dihindarkan kemungkinan menggunakan ideologi tersebut. Misalnya ada peristiwa pemerkosaan, bagaimana peristiwa tersebut digambarkan? Dalam ideologi patriarkal, kode representasi yang muncul itu misalnya digambarkan dengan tanda posisi laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan wanita.(Eriyanto, 2001: 113-115)

Pentingnya Representasi ini digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana media massa menggunakan bahasa (baik kata, kalimat, ungkapan, peribahasa dan sebagainya) untuk menampilkan tentang koalisi antar partai politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden RI periode 2009-2014 dalam opini yang dimuat di Kompas, Media Indonesia dan Republika.

B. Hasil Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa tesis atau hasil penelitian tentang kaitannya antara berita-berita politik dengan media massa. diantaranya Gigih Ardhana (Tesis, 2009) yang menulis tentang berita-berita politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008. Dalam tulisan itu diperoleh data bahwa secara analisa framing pemilihan Gubernur itu menghasilkan suasana yang demokratis walaupun terdapat kecurangan-kecurangan di lapangan. Selain itu proses pemilihan yang dilakukan sampai dua putaran itu telah menghabiskan milyaran rupiah. Demokratisasi di Indonesia memang masih harus dibayar mahal.

Selain itu juga Nurdianto (Skripsi, STAIN Surakarta, 2009) yang berjudul Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pesta Demokrasi (Analisa Framing di

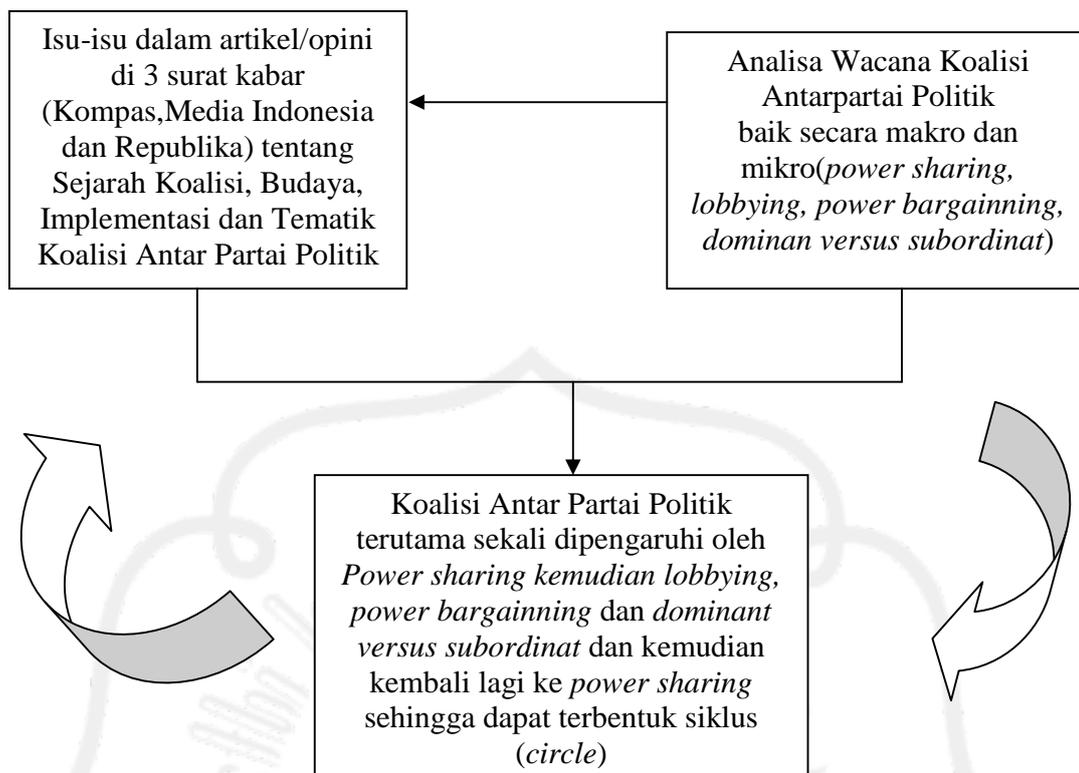
suratkabar Solopos). Di sini juga diterapkan analisa framing pada surat kabar Solopos tentang pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

Di samping itu, Amri Syarif Hidayat (Tesis, 2009) yang berjudul Komunikasi Politik dalam Konsepsi Daerah Pemilihan Pemilu tahun 2004 (Analisis Deskriptif Implementasi Konsepsi Daerah Pemilihan oleh Anggota Legislatif Hasil Pemilu tahun 2004 Di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan secara mendalam mengenai hubungan komunikasi politik antara anggota Legislatif hasil Pemilu tahun 2004 dengan konstituennya di Kabupaten Sukoharjo.

Jadi ada titik perbedaan penelitian dengan beberapa penelitian sebelumnya dimana pada penelitian ini akan mengkaji berita-berita tentang koalisi antar partai dalam pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dimuat pada ketiga surat kabar yaitu Kompas, Republika dan Media Indonesia menjelang Pemilu Presiden Republik Indonesia di bulan April sampai dengan Juli 2009 yang akan datang. Penelitian ini akan menerapkan analisa wacana (*discourse analysis*) pada ketiga media tersebut.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami kedudukan wacana koalisi pragmatis dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden periode 2009-2014 di ketiga surat kabar yaitu Kompas, Media Indonesia dan Republika, peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Wacana koalisi antarpantai politik dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 menjadi hal yang banyak dibahas oleh beberapa pakar di surat kabar dari berbagai institusi baik akademisi maupun lembaga-lembaga yang lain selama bulan April sampai dengan Mei 2009 menjelang batas waktu pendaftaran (10 – 16 Mei 2009) calon Presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam penelitian ini surat kabar yang dipilih adalah Kompas, Media Indonesia dan Republika yang notabeneanya merupakan surat kabar yang berskala nasional karena pemilihan Presiden dan Wakil presiden merupakan permasalahan nasional.

Untuk mengetahui bagaimanakah wacana koalisi pragmatis dalam rangka pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014, peneliti

melakukan kajian-kajian terhadap isu-isu artikel/opini tentang sejarah, budaya dan implementasi dan tematik koalisi antar partai politik di ketiga surat kabar yaitu Kompas, Media Indonesia dan Republika. Setelah itu, baru dilakukan analisa wacana (*discourse analysis*) koalisi antar partai politik baik secara makro maupun mikro (*power sharing, lobbying, power bargaining, dominan versus subordinat*).

Secara makro, pengertian atau makna koalisi antar partai politik berarti penggabungan atau menyatunya berbagai partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya pembagian jatah kekuasaan di kabinet ataupun di parlemen atau soal pemenuhan harapan-harapan rakyat terutama kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Secara mikro, koalisi yang dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologi dari partai politik yang bergabung. Motivasi berkoalisi itu dalam bentuk politik "dagang sapi" (*power sharing*), tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*), Pembicaraan-pembicaraan (*Lobbying*) ataupun pertentangan antar partai politik (*dominant class* dengan *subordinate class*).

Berdasarkan kedua hal tersebut disimpulkan bahwa *power sharing* merupakan faktor yang paling utama dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya seperti *power bargaining, lobbying*, maupun *dominan versus subordinat*.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan-pendekatan dalam membahas isi media komunikasi (*media content*)

Penelitian ini akan menerapkan analisa wacana (*discourse analysis*) pada ketiga media tersebut. Melalui analisis wacana (*discourse analysis*), analisis semiotik (*Semiotic analysis*) atau analisis framing (*framing analysis*) dapat diketahui isi media dapat dipengaruhi oleh berbagai komponen yang terdapat dalam institusi media itu sendiri. Ketiga analisis tersebut tergolong baru dalam khazanah penelitian empirik di Indonesia. Posisi ketiganya berada bersama-sama dalam membahas isi media (*media content*) khususnya yang memakai pendekatan kualitatif.

Adanya ketiga pendekatan tersebut tampaknya sudah mulai meninggalkan pendekatan analisis isi tradisional yang telah ada selama ini. Padahal apa yang disebut analisis tradisional itu (*content analysis*) mempunyai keterbatasan dalam menganalisis isi media.

Menurut Woolacott (Sobur, 2001 : 4) bahwa Analisis isi ini dioperasikan oleh seperangkat kategori-kategori konseptual yang berkaitan dengan isi media dan secara kuantitatif menghitung ada atau tidak kategori-kategori tersebut dengan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, analisis isi memiliki keterbatasan untuk menganalisis isi pesan, apalagi sampai ke tingkat ideologis. Padahal pesan di media selalu dibangun atas struktur bahasa yang terdiri atas lambang-lambang (*sign*) sedangkan lambang selalu menghadirkan ideologi di dalamnya.

Pemberian label tradisional itu disebabkan karena metode ini merupakan metode analisis yang paling awal lahirnya. Pendekatan dasar untuk menerapkan teknik ini adalah: (1) Memilih contoh (*sampel*) atau keseluruhan isi; (2) menetapkan kerangka kategori acuan eksternal yang relevan dengan tujuan pengkajian (misalnya sekelompok partai politik atau negara); (3) memilih satuan analisis isi (kata, kalimat, alinea, kisah, gambar, urutan dan sebagainya); (4) menyesuaikan isi dengan kerangka kategori, per satuan unit yang terpilih; (5) mengungkapkan hasil sebagai distribusi menyeluruh dari semua satuan atau percontoh dalam hubungannya dengan frekuensi keterjadian hal-hal yang dicari untuk acuan.

Menurut McQuail (1991:181), praktik analisis isi tradisional berkembang secara sistematis, kuantitatif dan deskriptif. Sedangkan secara teoritis, pendekatan analisis wacana kontemporer terhadap representasi media, lebih canggih dibandingkan pendekatan isi. Di dalam pendekatan analisis wacana (*discourse analysis*) tidak hanya kata-kata atau aspek-aspek lainnya yang dapat dikodekan dan dihitung, tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat dianalisis pada beberapa tataran deskripsi.

Sementara itu kelebihan Semiotik adalah kemampuan menelisik lekuk liku teks secara lebih detail dan merasakan getaran-getaran halus dari sinyal-sinyal yang tersembunyi. Jika analisis isi konvensional difokuskan pada muatan isi teks komunikasi yang manifes, sedangkan analisis framing lebih difokuskan pada komentar-komentar interpretatif di sekitar isi manifes itu. Dengan kata lain, analisis framing lebih terfokus untuk menganalisis muatan-muatan tekstual yang bersifat tersembunyi/implisit (laten).

Tabel 1 Perbedaan antara Metode Analisis Isi Tradisional, Semiotik, Framing dan Wacana (Sobur, 2001: 3-5)

No	Analisis Isi	Semiotik	Framing	Wacana
1.	Pendekatannya sistematis, kuantitatif dan deskriptif	Pendekatannya kualitatif	Pendekatannya kualitatif	Pendekatannya kualitatif
2.	Ada keterbatasan dalam menganalisis isi pesan dari struktur sampai ideologis.	Lebih luas dalam pemberian makna terhadap isi pesan.	Lebih luas dalam pemberian makna terhadap isi pesan	Lebih luas dalam pemberian makna terhadap isi pesan
3.	Hanya kata-kata atau aspek-aspek lainnya (manifes) yang dapat dikodekan dan dihitung	kemampuan menelusuri lekuk teks secara detail dan merasakan getaran-getaran halus dari sinyal-sinyal yang tersembunyi.	Difokuskan pada komentar-komentar interpretatif di sekitar isi manifes itu. Dengan kata lain lebih menganalisis muatan-muatan tekstual yang bersifat laten Merupakan elaborasi terhadap pendekatan analisis wacana khususnya untuk memahami pelbagai fenomena media mutakhir. Merupakan suatu tradisi dalam ranah studi komunikasi yang menonjolkan pendekatan multidisipliner (sosiologis, politik, kultural) dalam menganalisis pesan-pesan tertulis maupun lisan.	Selain melihat kata-kata juga struktur wacana yang kompleks dapat dianalisis

Menurut Eriyanto (2001:337-341), ada 4 perbedaan yang membedakan antara analisis wacana dengan analisis isi kuantitatif yaitu :

Tabel 2 Perbedaan antara Analisis Wacana dan analisis isi kuantitatif

No.	Analisis Wacana	Analisis Isi Kuantitatif
1	Lebih bersifat kualitatif, Lebih menekankan pada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori Dasar dari analisis wacana adalah interpretasi dari peneliti.	Pada umumnya bersifat kuantitatif, Lebih menekankan pada penjumlahan unit kategori Dasar dari analisis isi adalah lembar koding yang dibuat oleh peneliti.
2.	Proses kerjanya tidak memerlukan lembar koding yang mengambil beberapa item atau turunan dari konsep tertentu. Lebih memfokuskan pada pesan <i>latent</i> (tersembunyi)	Memerlukan lembar koding yang mengambil beberapa item atau turunan dari konsep tertentu. Digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat <i>manifest</i> (nyata)
3.	Lebih mementingkan penafsiran. Tanda dan elemen yang ada dalam teks dapat ditafsirkan secara mendalam oleh peneliti. Tidak mementingkan apa yang dikatakan (<i>what</i>) oleh media tetapi bagaimana (<i>how</i>) dan dengan cara apa pesan itu dikatakan. Sebab di sini bukan sekedar bergerak dalam level makro (isi dari suatu teks) tetapi juga bergerak pada level mikro yang menyusun suatu teks seperti kata, kalimat, ekspresi dan retorika. Bukan hanya kata atau aspek isi lainnya yang dapat dikodekan, tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat dianalisis pada beberapa tingkatan deskripsi.	Lebih mementingkan objektivitas, validitas dan reliabilitas. Tidak boleh ada penafsiran dari peneliti. Peneliti hanya membaca apa yang disajikan dalam teks (sumber berita, ukuran berita, letak berita). Hanya dapat mempertimbangkan " apa yang dikatakan " (<i>what</i>), tetapi tidak dapat menyelidiki bagaimana ia dikatakan (<i>how</i>). Hanya kata atau aspek isi yang dapat dikodekan.
	Misalnya mengkaji keseluruhan topik dalam pemberitaan berita seperti yang terlihat dalam <i>headline</i> yang kemudian disifikan secara detail dalam teks; makna kalimat dan relasi koheren antar kalimat, makna-makna yang tersembunyi (<i>latent</i>), selain itu juga dapat melihat bagaimana suatu	

	peristiwa bisa digambarkan dengan sedikit atau banyak detail dalam teks.	
4.	Tidak melakukan generalisasi, karena beranggapan setiap peristiwa pada dasarnya bersifat unik. Oleh karena itu tidak dapat diperlakukan prosedur yang sama yang diterapkan untuk isu atau kasus yang berbeda.	Pengambilan sampel, uji statistik bertujuan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat menggambarkan fenomena keseluruhan dari isu /peristiwa (generalisasi) bahkan memprediksi.

Sumber : Alex Sobur (2001:70-71)

2. Pengertian Analisis Wacana (*Discourse Analysis*)

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi, lebih tepatnya telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Tanpa adanya konteks, tanpa adanya hubungan-hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan suprakalimat, kita sukar berkomunikasi satu sama lain (Sobur, 2001 : 48). Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana.

Dalam upaya menganalisis unit bahasa yang lebih besar dari kalimat tersebut, analisis wacana tidak terlepas dari pemakaian kaidah berbagai cabang ilmu bahasa, seperti halnya semantik, sintaksis, morfologi dan fonologi.

Dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat (*rule of use*)
- b. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks dan situasi.
- c. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik.
- d. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa.
- e. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional (*functional use of language*).

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan analisa wacana melalui interpretasi semantik (pemaknaan).

3. Analisis Wacana (*Discourse Analysis*) sebagai sebuah alternatif analisis teks media

Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan " apa " (*what*), sedangkan analisis wacana lebih menekankan pada " bagaimana " (*how*) dari pesan atau teks komunikasi. Melalui analisis wacana, selain dapat diketahui bagaimana isi teks berita tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frase, kalimat, metafora macam apa suatu berita itu disampaikan. Sehingga dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. (Eriyanto, 2001:xv).

Jika merujuk pada pendapat Ann N Crigler, analisis wacana termasuk dalam pendekatan konstruksionis. Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas politik. Kedua, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang terus-menerus dan dinamis. Perhatian justru lebih ditekankan pada sumber dan khalayak. Dari sisi sumber (komunikator), pendekatan konstruksionis melihat pembentukan bagaimana pesan ditampilkan, dan dalam sisi penerima memandang bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan.

5. Kerangka Analisis Wacana (*Discourse Analysis*)

Dari sekian banyak model analisis wacana, model van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Hal ini dikarenakan van Dijk mengelaborasi elemen-elemen

wacana sehingga bisa diaplikasikan secara praktis. Melalui berbagai karyanya, van Dijk (Eriyanto, 2000:6-7), membuat kerangka analisis wacana yang dapat didayagunakan. Ia melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur/tingkatan yang masing-masing saling mendukung. Van Dijk membaginya menjadi 3 tingkatan yaitu :

- (1) Struktur makro yang merupakan makna global/umum dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa.
- (2) Superstruktur adalah kerangka suatu teks : bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh.
- (3) Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, anak kalimat, parafrase yang dipakai dan sebaliknya.

Struktur/elemen wacana yang dikemukakan van Dijk dapat digambarkan berikut ini:

Tabel. 3 Elemen Wacana Van Dijk

Struktur Wacana	Hal yang diamati	Elemen
Struktur makro	TEMATIK (Apa yang dikatakan?)	Topik
Superstruktur	SKEMATIK (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?)	Skema
Struktur Mikro	SEMANTIK (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?)	Latar,detail, maksud, pranggapan, nominalisasi
Struktur Mikro	SINTAKSIS (Bagaimana pendapat disampaikan)	Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti Leksikon
Struktur Mikro	STILISTIK (Pilihan kata apa yang dipakai?)	
Struktur Mikro	RETORIS (Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan?)	Grafis, Metafora, Ekspresi

Sumber : Alex Sobur, 2001: 74

Sedangkan menurut Pawito (2007:181-182) bahwa melakukan penelitian dengan menggunakan analisis wacana dapat dilakukan dengan mengikuti urutan prosedur sebagai berikut :

a. Memilih topik.

b. Merumuskan pertanyaan penelitian.

Pertanyaan penelitian membawa implikasi pada area penelitian dengan metode analisis wacana.

c. Melakukan studi pustaka berkenaan dengan topik dan fokus yang dipilih sebagaimana tersurat dalam pertanyaan penelitian.

Studi pustaka akan menghasilkan penjelasan tentang konsep-konsep dan simbol-simbol yang terdapat dalam teks yang sedang diteliti serta pandangan-pandangan teoritik yang relevan.

d. Menentukan metode penelitian

Jika berkaitan dengan kekuasaan dan ideologi maka akan lebih tepat apabila digunakan jenis metode analisis wacana sosiokultural yang memandang wacana sebagai tindakan atau praktik sosial.

e. Mengumpulkan data dan analisisnya dengan merujuk pandangan-pandangan teoritik yang diperoleh dengan telaah pustaka.

Kalau seandainya ada data yang dianggap penting, namun belum dapat ditemukan, maka peneliti disarankan untuk kembali mencari dengan menjelajah teks yang ada.

Kembali melakukan telaah pustaka, melakukan reduksi data, mencari kembali data yang masih dibutuhkan merupakan konsekuensi yang lazim dalam penelitian kualitatif, terutama berkenaan dengan tuntutan validitas hasil penelitian yang mengimplikasikan pentingnya teknik triangulasi.

f. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengacu pada pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan adalah hasil interaksi antara kesan peneliti terhadap kecenderungan-kecenderungan yang ada pada data serta pilihan rujukan berupa pandangan teoritis yang diambil yang kemudian meringkaskan analisis.

g. Penyusunan laporan penelitian

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISA

A. DESKRIPSI SURAT KABAR

1. KOMPAS

Kompas adalah nama surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Kompas adalah bagian dari Kelompok Kompas Gramedia. Guna memudahkan akses bagi pembaca di seluruh dunia, Kompas juga menerbitkan edisi Kompas Cyber Media (<http://www.kompas.com>) yang berisi berita-berita yang diperbarui secara aktual.

Ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel dan independen. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, P.K Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama. Ojong langsung menyetujui ide itu dan menjadikan Jakob Oetama sebagai editor *in-chief* pertamanya.

Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat. Atas usul Presiden Soekarno, namanya diubah menjadi Kompas sebagai media pencari fakta dari segala penjuru. Kompas mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965 berkantor di Jakarta Pusat dengan tiras 4.800 eksemplar. Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khusus untuk edisi Minggunya malah mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. Seperti kebanyakan surat kabar yang lain, harian Kompas dibagi menjadi tiga halaman bagian, yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan serta bagian berita olahraga.

Seiring dengan semakin meningkatnya pembaca, selain rubrik tetap pada edisi Nasional, saat ini Kompas juga menambahkan edisi daerah antara lain Sumatra Bagian Selatan, Sumatra Bagian Utara, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kompas juga menerbitkan Kompas *e-paper* atau koran digital Kompas yaitu versi elektronik dari koran Kompas yang diluncurkan Kelompok Kompas Gramedia pada tanggal 1 Juli 2009. Inovasi ini sebenarnya telah ada dari tahun 2008 akan tetapi setelah melalui beberapa perbaikan barulah Kompas *e-paper* ini dapat benar-benar diakses. Kompas *e-paper* ini tidaklah sama dengan Kompas.com (<http://www.kompas.com>). Apabila pada Kompas.com, informasi-informasi yang diberikan berbeda dengan Kompas cetak maka Kompas *e-paper* memiliki berita yang sama dengan Kompas cetak akan tetapi Kompas *e-paper* berbentuk digital. (www.kompas.com, 1/18/2010)

Adapun visi dan misi Kompas Gramedia 2020 meliputi *Caring* (peduli terhadap sesama) dan *Credible* (dapat dipercaya dan diandalkan) dapat diibaratkan sebagai akar pohon yang merupakan landasan utama dari seorang karyawan Kompas Gramedia. Selain itu juga *Competence* (prasyarat minimum seorang karyawan untuk dapat berprestasi adalah cakap dan trampil dalam pekerjaannya sehingga produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan berkualitas dan mampu memuaskan pelanggannya). Oleh karena itu seorang karyawan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan tugasnya, mampu menganalisis masalah secara arif dan bertindak dengan cepat dalam menyelesaikannya, dan selalu memiliki semangat belajar tiada henti untuk perbaikan terus-menerus.

Terakhir adalah *Competition* (selalu dinamis dan mampu bersaing dibandingkan karyawan yang lain). Ciri-ciri dari karyawan yang berdaya saing adalah kreatif, inovatif,

berani bersaing secara sehat dan juga terbuka dengan masukan dan saran dari pihak lain. Karyawan yang kompetitif secara tidak langsung akan meningkatkan produk dan jasa bagi pelanggan. (www.kompas.yahoo.com, 8/7/2010)

2. REPUBLIKA

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin oleh ex wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah. Republika terbit perdana pada tanggal 4 Januari 1993.

Koran ini terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir tahun 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media.

PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi *holding company* dan Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan majalah *Golf Digest*, koran berbahasa Mandarin Harian Indonesia, majalah Parents, majalah a+, radio Jak FM, dan JakTV. Mahaka Media juga melakukan kolaborasi dengan kelompok radio Prambors, terutama radio Female dan Delta.

Walau berganti kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi maupun visi maupun misi. Namun harus diakui, ada perbedaan gaya dibandingkan dengan

sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini terus berkembang. Republika menjadi makin profesional dan matang sebagai koran nasional untuk komunitas muslim (www.Republika.yahoo.com, 1/8/2010)

3. MEDIA INDONESIA

Media Indonesia pertama kali diterbitkan pada tanggal 19 Januari 1970. Sebagai surat kabar umum pada masa itu, Media Indonesia baru bisa terbit 4 halaman dengan tiras yang amat terbatas. Berkantor di Jalan MT Haryono, Jakarta disitulah sejarah panjang Media Indonesia berawal. Lembaga yang menerbitkan Media Indonesia adalah Yayasan Warta Indonesia.

Tahun 1976, surat kabar ini kemudian berkembang menjadi 8 halaman. Sementara itu perkembangan regulasi di bidang pers dan penerbitan terjadi. Salah satunya adalah perubahan SIT (Surat Izin Terbit) menjadi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Karena perubahan ini penerbitan dihadapkan pada realitas bahwa pers tidak semata menanggung beban idealnya tapi juga harus tumbuh sebagai badan usaha.

Dengan kesadaran untuk terus maju, pada tahun 1988 Teuku Yousli Syah selaku pendiri Media Indonesia bergandeng tangan dengan Surya Paloh, mantan Pemimpin Umum dan Pemimpin Perusahaan dipegang oleh Lestary Luhur. Sementara itu markas usaha dan redaksi dipindahkan ke Jalan Gondandia Lama no.46 Jakarta.

Awal tahun 1995 bertepatan dengan usianya yang ke-25, Media Indonesia menempati kantor barunya di kompleks Delta Kedoya, Jalan Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Di gedung baru ini semua kegiatan di bawah satu atap

baik Redaksi, Usaha, Percetakan, Pusat Dokumentasi, Perpustakaan, Iklan, Sirkulasi, Distribusi serta fasilitas penunjang karyawan.

Sejak Media Indonesia ditangani oleh tim manajemen baru di bawah payung PT Citra Media Nusa Purnama, banyak pertanyaan tentang apa yang menjadi visi harian ini dalam industri pers nasional. Terjun pertama kali dalam industri pers tahun 1986 dengan menerbitkan harian Prioritas. Namun Prioritas memang kurang bernasib baik, karena belum cukup lama menjadi koran alternatif bangsa, SIUPP-nya dibatalkan oleh Departemen Penerangan.

Surya Paloh sebagai penerbit Harian Umum Media Indonesia, tetap gigih berjuang mempertahankan kebebasan pers. Wujud kegigihan ini ditunjukkan dengan mengajukan kasus penutupan Harian Prioritas ke pengadilan, bahkan menuntut Menteri Penerangan untuk mencabut Peraturan Menteri no.01/84 yang dirasakan membelenggu kebebasan pers di tanah air.

Tahun 1997, Djafar H Assegaff yang baru menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar di Vietnam dan sebagai wartawan yang pernah memimpin beberapa harian dan majalah, serta menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum LKBN Antara, oleh Surya Paloh dipercayai untuk memimpin harian Media Indonesia sebagai Pemimpin Redaksi. (www.mediaindonesia.yahoo.com, 1/8/2010)

B. KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK KOALISI ANTARPARTAI POLITIK

1. SEJARAH KOALISI ANTAR PARTAI POLITIK

Sejarah Koalisi Antar Partai Politik maksudnya bahwa koalisi merupakan praktik politik yang umum berlaku di negara demokrasi. Bahkan dalam kondisi

tidak diharapkan adanya distribusi kekuasaan diantara partai yang terlibat. Namun senantiasa dilakukan atas dasar kesamaan ideologi atau platform politik. Dengan demikian memungkinkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan berbasis pada kesamaan kepentingan.

Dalam praktik koalisi di Indonesia, terutama sejak era reformasi terlihat lebih mendasarkan pada kepentingan pragmatisme. Yang menonjol adalah transaksi kekuasaan (jabatan) ketimbang agenda bersama untuk menciptakan konstruksi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Adapun yang termasuk dalam sejarah koalisi antar partai politik adalah :

a. Praktek politik di negara-negara demokrasi.

Koalisi merupakan praktik politik yang umum berlaku di negara demokrasi seperti di Indonesia, Jerman, Swiss dan lain-lain. Pemilu demokratis bukanlah hanya soal prosedur, tetapi juga harus berdampak pada kesejahteraan rakyatnya.

Pengalaman bernegara selama lima tahun terakhir adalah komplikasi politik. Kebijakan eksekutif kerap tersandera di parlemen. Namun di mata rakyat, koalisi selama ini tidak lebih dari oligarki kekuasaan. Daulat elite politik bukan daulat rakyat. Koalisi hanya menyempurnakan persekongkolan yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif. Praktik koalisi antar partai politik dilakukan tidak berdasarkan kesamaan ideologi atau platform parpol tetapi hanya distribusi kekuasaan di antara partai politik.

a.1 Praktik koalisi di negara demokrasi tidak berpengaruh pada masyarakat.

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Oleh karena itu, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi (Sardini, 2011 :1)

Hal ini seperti diungkap dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh Yonky Karman:

Koalisi tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa...Indonesia memang bukan Vietnam, India, Kamboja atau Thailand. Jalan demokrasi telah dipilihnya, namun demokrasinya belum menyejahterakan rakyat. (Kompas, 27 April 2009)

a.2. Pragmatis koalisi dilakukan tidak berdasarkan kesamaan ideologi atau platform partai politik.

Sepanjang Pemilu 1977 sampai dengan 1997, jumlah partai politik yang ikut ambil bagian sebagai kontestan menciut dari 10 partai politik menjadi 3 kontestan. Penyederhanaan partai politik dilakukan dengan melihat dasar ideologi partai dan basis dukungan masyarakat. Partai-partai yang berhaluan ideologi dan berbasis massa Islam misalnya oleh Pemerintah Orde Baru digabungkan dalam satu gerbong yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara partai-partai yang berhaluan nasionalis dan berbasis massa abangan dan non muslim oleh Orde Baru digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Terakhir, Orde Baru juga menggabungkan organisasi kekaryaan yang dileburkan menjadi Golongan

Karya. Ketiga kontestan inilah yang menjadi peserta Pemilu 1977 sampai Pemilu 1997 (Sardini, 2011: 17)

Selain memiliki kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, dalam pemilu tersebut juga hasilnya selalu sama Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi dan militer (Sardini, 2011: 18).

Pada Pemilu 1999 diikuti oleh banyak sekali peserta. Pada masa itu dimungkinkan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Sebanyak 48 parpol menjadi kontestan pada Pemilu 1999. Sebelumnya yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu di Departemen kehakiman dan HAM tercatat 141 partai. Sistem Pemilu pun mulai menjadi perdebatan. Ini terkait dengan metode pembagian kursi di parlemen. Pada Pemilu 1999, pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan (dapil). Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi. Kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan. Dengan demikian, seorang calon meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, dialah yang terpilih. Pada Pemilu 2004, sistem Pemilu di Indonesia hadir dengan wajah

baru melalui sistem kepartaian yang digandengakan dengan sistem Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2003.

Sejatinya praktik koalisi berdasarkan kesamaan ideologi atau platform partai politik, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini terlihat dalam artikel di Kompas, 1 Mei 2009 oleh Suhardi Suryadi :

Koalisi merupakan praktik politik yang umum berlaku di negara demokrasi. Oleh karena itu, dalam koalisi tidak diharapkan adanya distribusi kekuasaan di antara partai yang terlibat. Namun senantiasa dilakukan atas dasar kesamaan ideologi atau platform politik.

Hal ini terlihat dalam artikel di Kompas, 30 April 2009 oleh Syamsuddin Haris :

Konteks koalisi seharusnya berbasis kesamaan platform politik antarpartai, sedangkan konteks capres-cawapres adalah soal potensi kerja sama yang bisa dijalin di antara para kandidat. (Kompas, 30 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh Eko Prasajo :

Idealnya koalisi parpol dibangun berdasarkan kesamaan platform ideologi. Tetapi seperti diketahui, sulit membangun koalisi berbasis platform ideologi karena hampir semua parpol di Indonesia tidak memiliki kejelasan ideologi...

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 5 Mei 2009 oleh Sugiyono :

Pada kasus Fauzi Bowo, tesis perlunya kesamaan platform politik, kesamaan ideologi dasar parpol dapat bekerja secara efektif, sekalipun koalisi dibangun atas dasar pluralitas. (Republika, 5 Mei 2009).

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 4 Mei 2009 oleh Nurul S

Hamami :

Idealnya koalisi sejati sudah terbangun jauh sebelum pemilu. Parpol-parpol yang ingin bergabung dalam koalisi dapat menyatukan sikap, visi, misi dan ideologi yang sama sebagai dasar kesepakatan berkoalisi. (Republika, 4 Mei 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 13 Mei 2009 oleh Ichwan

Ishak :

Perkembangan politik nasional menunjukkan bahwa politik koalisi saat ini tidak lagi didasari oleh kesamaan faktor ideologi, melainkan faktor kepentingan. (Republika, 13 Mei 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 12 Mei 2009 oleh Fitra Arsil :

Padahal, di sisi lain masyarakat menyaksikan bahwa koalisi terjadi antarpantai yang berbeda basis ideologis, haluan politik, strategi perjuangan dan kultur kadernya. (Republika, 12 Mei 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Media Indonesia, 30 April oleh R Siti

Zuhro :

Ibarat seekor burung mereka bisa hinggap di mana saja tanpa terbebani oleh perbedaan ideologi, platform, dan misi partai masing-masing. (Media Indonesia, 30 April 2009)

Jadi dalam praktik koalisi di negara demokrasi tidak berpengaruh pada masyarakat dan tidak berdasarkan kesamaan ideologi atau platform partai politik melainkan faktor kepentingan partai politik atau ketua umum partai.

b. Elektabilitas SBY yang cukup tinggi

Sebuah dasar yang menjadi petunjuk adalah konteks struktur sosial dan khususnya pengawasan sosial serta hubungan sosial antara para aktor yang ada atau yang diharapkan akan terjadi. Hal ini merupakan pengaruh yang penting terhadap tanggapan mereka dalam menghadapi situasi atau masalah serta interaksi mereka dalam situasi tersebut. Misalnya semakin positif sifat interrelasi di antara para aktor yang berupa solidaritas atau semangat kemasyarakatan, semakin cenderung untuk semakin saling memperhatikan keinginan masing-masing dalam tindakan mereka untuk mencapai akibat yang sama-sama disenangi.

Kerjasama yang dibangun masyarakat modern saat ini termasuk sebagian masyarakat Indonesia di beberapa daerah cenderung mengalami disharmonisasi apalagi kondisi riil pada masyarakat politik setempat terkadang tidak mengedepankan kepentingan yang lebih luas. Terkadang struktur pengambilan

keputusan di tingkat pusat tidak mengadopsi pengertian-pengertian di ranah bawah. Hal ini seringkali menjadi masalah yang sangat krusial bagi pihak penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu.

Dalam kasus ini, seharusnya elite politik menempatkan diri sebagai aktor politik yang mampu memberikan pencerahan pendidikan politik bagi warga masyarakat. Begitu juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya menggunakan pilihan politik sebagai bagian dari elemen bangsa menjadi sangat penting (Sardini, 2011: 142-143)

b.1 Elektabilitas SBY didukung dari beberapa survey yang ada

Beberapa survey dari beberapa lembaga survey mengungkap elektabilitas kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014. Berdasarkan hasil survey tersebut nampak bahwa elektabilitas SBY sebagai kandidat terkuat Presiden RI sebagai *incumbent* sangat kuat dibandingkan dengan kandidat yang lain seperti Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno Putri.

Hal ini dapat terlihat dalam artikel di *Republika*, 27 April 2009 oleh Asmar Oemar Saleh :

Survei Reform Institute pada Maret 2009 menemukan bahwa elektabilitas Yudhoyono berada pada angka 46,49 persen. Urutan berikutnya dengan selisih yang cukup jauh adalah Megawati 13,06 persen, Prabowo 6,75 persen, Sri Sultan Hamengkubuwono X 4,53 persen, Jusuf Kalla 4,29 persen, dan Hidayat Nurwahid 3,85 persen. (*Republika*, 27 April 2009)

Hal ini terungkap juga dalam artikel di *Republika*, 27 April 2009 oleh Harun Husein :

Kendati survei memperlihatkan tingginya elektabilitas SBY termasuk dari konstituen partai lain dan *swing voters*, tentu akan lebih aman bila menggandeng mesin politik lain untuk melipatgandakannya. Apalagi bila mesin politik itu berkinerja mumpuni seperti Golkar dan PKS (*Republika*, 27 April 2009)

b.2 Elektabilitas SBY dikarenakan adanya pergeseran metode kampanye.

Keberadaan pers di negara Indonesia, secara historis-empiris, tidak terlepas dari idealisme perjuangan. Di masa kolonial, pers tumbuh sebagai alat perjuangan untuk melawan tirani penjajahan, sekaligus memacu kesadaran motivatif rakyat untuk lepas dari pengaruh kekuasaan kolonial. Dalam kerangka historis, kita mengenal pers perjuangan yang kemudian menjadi salah satu komponen kekuatan, untuk mengantarkan bangsa kita ke gerbang pintu kemerdekaan.

Di masa awal kemerdekaan, pers sangat berperan menjadi alat perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Opini publik dibangun untuk menggalang kekuatan internasional melalui media cetak maupun elektronik (radio) sehingga pers menjadi salah satu wahana pembelajaran demokrasi politik. Pada masa itu, hampir setiap partai politik memiliki penerbitan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing ideologisnya, yang mempengaruhi sistem kenegaraan dengan terbangunnya demokrasi liberal yang melahirkan sistem pemerintah parlementer.

Dalam hubungannya dengan Pemilu, media seharusnya dapat menjalankan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari pemberitaan yang tidak obyektif selama masa kampanye partai politik saat Pemilu berlangsung. Walau media massa berhak untuk menerima iklan kampanye politik, perlu ada perbedaan antara berita dengan kampanye politik agar obyektivitas media tetap terjaga. Seharusnya pemberitaan media berorientasi kepada kepentingan publik, karena

pemilih akan mencoblos sesuai dengan informasi yang mereka peroleh. Melalui pemberitaan media massa memberikan informasi yang berguna dan obyektif kepada publik dan membeberkan apa adanya tentang parpol dan capres yang dapat dipilih rakyat. Dengan demikian, pemilih akan menjadi rasional dalam menentukan pilihan mereka.

Melalui pemberitaan media, lembaga pengawas Pemilu mendapatkan informasi tentang pelanggaran maupun kecurangan yang terjadi di lapangan, yang tidak mungkin bisa di-cover oleh personel lembaga karena keterbatasan jumlahnya. Tidak dapat dimungkiri bahwa peran media massa memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan Pemilu. Bahkan peran media massa tidak hanya sebatas memberikan informasi, akan tetapi berperan sebagai pengawas mulai dari tahapan Pemilu berlangsung sampai pada akhir pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung.

Sesuai fungsinya, media massa mempunyai berbagai macam peran antara lain :

1. Sebagai sumber informasi, baik itu tentang peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain.
2. Sebagai sarana pendidikan melalui pemberitannya dengan memberikan pencerahan, mencerdaskan dan meluaskan wawasan bagi pembacanya, pendengar atau pemirsanya. Baik itu dalam konteks politik sehingga dapat memberikan pendidikan berpolitik kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya kepada negara.
3. Berfungsi sebagai alat kontrol sosial, bukan saja terhadap penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer dan aparat penegak hukum

lainnya, akan tetapi juga berbagai hal yang terjadi di tengah masyarakat itu sendiri.

4. Mendorong partisipasi publik dalam Pemilu.
5. Mendidik pemilih bagaimana mereka menggunakan hak berpolitiknya (*political education*).
6. Berperan untuk menyuarakan aspirasi politik masyarakat.
7. Memberitakan perkembangan kampanye dan Pemilu pada umumnya.
8. Menyediakan platform partai politik sekaligus rekam jejak calon legislatif sehingga masyarakat bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam menggunakan hak pilihnya.
9. Memberikan wahana bagi partai politik, politisi, dan capres-cawapres untuk mendebatkan platform politik mereka.
10. Memantau hasil penghitungan suara sekaligus memberitakannya kepada masyarakat umum.
11. Meneliti dan mengevaluasi dengan cermat apakah proses Pemilu sudah dijalankan sesuai kaidah *fairness* (Sardini, 2011: 243-244)

Berangkat dari berbagai macam fungsi media massa tersebut, kiranya media massa tersebut, kiranya media massa tidak hanya sebatas memberikan informasi, akan tetapi juga berfungsi sebagai pengawas, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam perjalanannya mengawal pesta demokrasi di negeri Indonesia, media massa dalam pemberitaannya memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, karena melalui media, peserta Pemilu dapat menyampaikan visi, misi maupun cara pandang kepada masyarakat dan

merupakan sarana komunikasi politik bagi partai politik, calon anggota legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden. Terbukti, tidak sedikit partai politik, caleg dan capres memanfaatkan media massa untuk menyampaikan visi dan misi. Bahkan diantara mereka saling mengklaim bahwa keberhasilan yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, sebut saja seperti pemberantasan korupsi, penurunan harga BBM dan peningkatan untuk anggaran pendidikan, merupakan hasil kerja partai politik yang sedang berkampanye.

Selama ini metode kampanye yang dilakukan oleh partai politik biasanya melakukan dengan cara mengerahkan massa secara besar-besaran di tanah lapang, mempengaruhi para pemilih untuk memilih salah satu kandidat Presiden sampai ke tingkat ranting di desa-desa. Kemenangan Partai Demokrat disebabkan adanya pergeseran metode kampanye yang paling ampuh dalam menggiring pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. yaitu beriklan. Pemuatan iklan baik di surat kabar, spanduk, radio dan televisi sangat mempengaruhi image masyarakat untuk memilih SBY (M Qodari, 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas, 11 April 2009 oleh M Qodari :

Jika benar Partai Demokrat unggul dalam Pemilu 2009, seperti dindikasikan beberapa survei, dapat dikatakan telah terjadi perubahan amat signifikan dalam metode dan instrumen perpolitikan di tingkat nasional. Perubahan tersebut mencakup pergeseran metode kampanye yang paling ampuh dalam menggiring pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. (Kompas, 11 April 2009)

b.3 Elektabilitas SBY berdasarkan pada politik figur dan *incumbent*

Dalam diskursus ilmu politik, Pemilu adalah cara yang sah untuk berebut kekuasaan. Pemilu merupakan ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (*incumbent*), apakah sebagian besar rakyat pemilih akan memperpanjang

mandatnya? Dengan demikian, Pemilu merupakan eksekusi bagi penguasa yang dinilai rakyatnya tidak memuaskan. Bagi yang ingin menjadi penguasa, Pemilu merupakan sarana untuk memperoleh mandat rakyat. Bila berhasil, mandat tersebut akan digenggamnya hingga satu periode kekuasaan. Demikianlah bahwa demokrasi menetapkan suatu jangka Pemilu yang berlangsung secara reguler.

Figur SBY sebagai sosok yang terpercaya, populer, terkenal di mata para pemilih. Selama ini SBY dikenal sebagai orang yang tegas, terbuka dan responsif terhadap persoalan-persoalan rakyat pada umumnya. Sehingga tidak heran apabila figur seperti itu sangat dikagumi oleh banyak orang seperti layaknya artis atau selebriti.

Selain itu, saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu posisinya SBY adalah sebagai orang yang sedang berkuasa (*incumbent*) Hal ini tentunya mempengaruhi terhadap elektabilitas SBY dari rakyatnya karena keberhasilan program-program yang telah dijalankan selama pemerintahannya menjadi 'nilai plus' di mata para pemilihnya. Pengaruh kepercayaan rakyat kepada pemerintah mengacu pada pengalaman rakyat dengan pemerintah dan bagaimana pengalaman-pengalaman itu berdampak pada elektabilitas rakyat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa (*incumbent*) (Sumaryadi, 2010: 135).

Jelas Partai Demokrat amat bergantung pada ketokohan SBY (politik figur), yang dalam hal ini banyak diuntungkan karena posisinya sebagai *incumbent*. Maka suka tidak suka, Partai Demokrat pada masa lima tahun yang akan datang secara tak langsung bergantung pada langkah politik SBY.

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh

Yonky Karman :

Jelas PD amat tergantung pada ketokohan SBY (politik figur) yang dalam hal ini banyak diuntungkan karena posisinya sebagai *incumbent*. (Kompas, 27 April 2009)

Hal ini juga dibahas dalam artikel di Republika, 20 April 2009 oleh Nurul

S Hamami :

JK pastilah menjadi prioritas utama SBY. Bermodalkan pengalaman lima tahun memimpin pemerintahan secara bersama, SBY tentu tinggal meneruskan arah pembangunannya tidak dari nol lagi bila wapresnya adalah JK. (Republika, 20 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 5 Mei 2009 oleh Sugiyono :

Tesis bahwa figur individu yang superior kembali menjadi tesis yang semakin diunggulkan, terutama untuk kasus tingkat nasional sebagai fenomena baru terhadap pemilu secara langsung. (Republika, 5 Mei 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Media Indonesia, 13 April 2009 oleh R Siti

Zuhro :

Sosok SBY sebagai pembawa gerbong Demokrat tak jarang dikritik sebagai pemimpin yang sangat sensitif. Namun sensitivitasnya tersebut justru menguntungkan citranya yang dinilai santun, hati-hati dan mau mendengarkan. (Media Indonesia, 13 April 2009)

b.4 Elektabilitas SBY karena citra pemerintahan SBY

Citra pemerintahan SBY dianggap bersih dari budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). SBY berusaha mengusut tuntas terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam roda pemerintahannya. Termasuk pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga independen untuk memberantas korupsi yang terjadi di masyarakat.

Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 juga makin membuktikan kekuatan pemerintahan SBY. Meski pemilu dianggap mengandung kekeliruan, baik sistemik maupun karena ketiadaan kapasitas penyelenggara, sejauh ini dapat dinilai rakyat memilih bukan karena bagusya kinerja partai pemerintah, namun lebih karena citra pemerintahan SBY.

Hal ini terlihat dalam artikel di *Republika*, 15 April 2009 oleh Fahmi AP Pane :

Dalam konteks tidak ada manusia dan presiden yang sempurna, situasi ini memprihatinkan karena segalanya seperti tergantung seseorang. Keprihatinan itu kian terasa karena pemerintahan SBY tidak cukup kuat ketika menghadapi pemerintahan-pemerintahan daerah, terutama kepentingan asing dalam bentuk pemerintah dan perusahaan. (*Republika*, 15 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di *Media Indonesia*, 13 April 2009 oleh R Siti Zuhro :

Kemampuan partai Demokrat mengungguli Partai Golkar dan PDIP antara lain disebabkan oleh citra Demokrat yang cenderung lebih terbuka, aspiratif dan relatif bersih. (*Media Indonesia*, 13 April 2009)

Jadi Elektabilitas SBY yang cukup tinggi didasarkan pada hasil survei dari berbagai lembaga, pergeseran metode kampanye yaitu beriklan, politik figur (ketokohan) dan *incumbent*, citra pemerintahan SBY yang positif di mata pemilihnya.

c. Pendeskreditan Partai " Warisan Orde Baru "

Pendeskreditan Partai "Warisan Orde Baru" maksudnya adalah adanya upaya-upaya media khususnya surat kabar untuk menjatuhkan partai-partai "Warisan Orde Baru" seperti Golkar, PDIP dan PPP yang mengalami kegagalan dalam memangku roda pemerintahan selama ini.

c.1 Pendeskreditan Partai " Warisan Orde Baru " karena aspirasi dan kepentingan personal ketua umum yang terlalu mendominasi.

Ketika rezim Orde Baru tumbang, rakyat pun terlanjur tidak percaya pada sebagian yang berhubungan dengan Orde Baru, termasuk partai politik. Rakyat merasa bahwa partai politik telah eksis selama Orde Baru berkuasa, tetapi tak cukup mampu mewujudkan keinginan dan harapan rakyat selama ini. Sementara partai-partai baru pun belum sepenuhnya mereka pandang memiliki kredibilitas yang cukup (Sardini, 2010: 307)

Sebagai jawaban untuk mengoreksi keadaan tersebut, pada umumnya elite politik kita mendirikan partai politik, yang di satu sisi memang diefektifkan untuk memberdayakan kepentingan-kepentingan bangsa yang lebih luas, namun di sisi yang lain, berkembangnya orientasi pragmatis demi mendapatkan sumber-sumber daya politik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam melakukan kandidasi politik, partai politik cenderung menarik para tokoh yang selama sebelumnya bukan kader partai politiknya untuk dicalonkan sebagai caleg dalam Pemilu tahun 2009 yang lalu.

Sikap apa yang ditampilkan elite politik seperti itu mendorong masyarakat untuk menengok terhadap kinerja Pemilu terakhir, dengan konkretisasi sikap yang sama ditujukan terhadap pemerintah, sebagai satu paketnya kepemimpinan nasional hasil Pemilu demokratis. Kekecewaan terhadap kinerja para pemimpin rakyat hasil Pemilu sebelumnya semakin menguatkan harapan tersebut. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga independen maupun pendapat para pengamat politik, kinerja para pemimpin rakyat masih jauh dari yang diharapkan.

Alih-alih melaksanakan fungsinya dengan baik, para pemimpin bangsa justru lebih sering menampilkan perilaku yang dirasakan pemilih mengecewakan (Sardini, 2010: 308).

Dominasi Ketua Umum Partai Politik sangat kentara untuk berkuasa di dalam pemilihan Presiden RI. Hampir semua pimpinan partai politik menginginkan menjadi kandidat Presiden RI bukan sebagai kandidat Wakil Presiden RI.

Hal ini ditegaskan dalam artikel di Kompas, 30 April 2009) oleh Syamsuddin Haris :

Fenomena Golkar bisa menjadi mewakili persoalan krusial dan menahun yang acap kali dialami partai-partai di Indonesia. Yakni ketika aspirasi dan kepentingan personal ketua umum lebih mewarnai sikap dan keputusan partai secara institusi. (Kompas, 30 April 2009)

Hal ini diungkap dalam artikel di Media Indonesia, 13 April 2009 oleh R Siti Zuhro :

Selain itu, Partai Golkar juga kurang mampu menunjukkan dirinya sebagai partai terbuka yang memberikan akses sama kepada kader-kadernya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. (Media Indonesia, 13 April 2009)

c.2. Pendeskreditan Partai " Warisan Orde Baru " karena berakhirnya sistem mengambang.

Penyederhanaan partai politik memang sempat menjadi isu yang sangat kontroversial karena realitas politik Indonesia pasca reformasi sistem pemilihan umum menggunakan sistem multipartai. Penyederhanaan partai politik pun terformulasikan melalui undang-undang Pemilu tahun 2008 yang secara kontekstual menjadikan Parliamentary Threshold (PT) sebagai ketentuan mencapai ambang batas. Sistem Pemilu DPR pada Pemilu 2009 menerapkan sistem 2,5

persen PT. Artinya hanya parpol yang mencapai perolehan suara sah nasional yang akan berhak mendapatkan kursi di DPR. Selanjutnya parpol yang tidak mencapai suara terbesar 2,5 persen tersebut, suaranya akan hilang alias hangus dan tidak punya kursi DPR di Senayan.

Ambang batas di parlemen (Parliamentary Threshold) adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi oleh partai Pemilu 2009 untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam pasal 202 ayat (1) UU No10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara sah dalam Pemilu legislatif.

Materi ketentuan dalam Pasal 202 UU No.10 Tahun 2008 sebagai berikut :

Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Dengan ketentuan ini, maka partai politik yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen tidak berhak memiliki perwakilan di parlemen dan suaranya tidak dihitung alias hangus. Akan tetapi, ketentuan Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen 2,5% pada Pemilu 2009 tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Jadi Parliamentary Threshold hanya berlaku untuk calon legislator di DPR RI saja. Pada prakteknya, penerapan Parliamentary Threshold sebagai mekanisme penyederhanaan partai politik dalam Pemilu 2009 merupakan yang pertama kali dalam sejarah Pemilu yang dimulai sejak tahun 1955.

Pada Pemilu sebelumnya, ambang batas yang diterapkan adalah ambang batas Pemilu yang lebih populer dikenal dengan istilah Elektoral Threshold (ET) sebagaimana yang diterapkan pada Pemilu 1999 dan 2004. Adapun perbedaannya adalah dari tujuan dan pendasarannya. Pada Parliamentary Threshold, ambang batas bertujuan untuk membatasi partai dalam menempatkan wakilnya di lembaga legislatif (DPR). Sedangkan pada Elektoral Threshold, ambang batas bertujuan untuk membatasi partai sebagai peserta pemilihan umum. Batas minimal yang ditetapkan untuk Pemilu 1999 adalah 2 persen dan pada tahun 2004 sebesar 3 persen. Pendasaran berdasarkan kursi yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No.12 tahun 2003. Pasal tersebut menjelaskan bahwa partai politik peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya tiga persen jumlah kursi di DPR, empat persen jumlah kursi di DPRD provinsi yang tersebar di setengah provinsi Indonesia, dan empat persen jumlah kursi di kabupaten yang tersebar di setengah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Sardini, 2010: 67-71).

Sistem Mengambang maksudnya adalah konsep politik Orde Baru di mana parpol Golkar yang memiliki jejaring sampai di desa/kelurahan lewat aparat birokrasi dan militer saat itu dikonstruksi menjadi bagian yang berkuasa, tidak memperbolehkan PPP dan PDI memiliki susunan struktur yang lebih rendah dari level kecamatan.

Hal ini dikupas dalam artikel di Kompas, 11 April 2009 oleh M Qodari :

Setelah rezim Orde Baru menandai berakhirnya sistem massa mengambang. Setiap partai politik dapat membangun struktur sampai ke level yang terendah. (Kompas, 11 April 2009)

c.3 Pendeskreditan Partai " Warisan Orde Baru " karena mengarah kepada kedinastian.

Kedinastian maksudnya adalah turun-temurunnya kelompok orang yang berkuasa di pemerintahan selama ini. Misalnya kepemimpinan PDI dikuasai oleh keluarga Sukarno. Hal ini dibahas dalam artikel di Media Indonesia, 13 April 2009 oleh R Siti Zuhro :

Penurunan suara PDIP dalam pemilu legislatif 2004 dan 2009 tampaknya disebabkan oleh citra negatifnya yang semakin mengarah ke kedinastian. Seperti halnya Bung Karno, Megawati Soekarnoputri juga memperlihatkan *one man show*. (Media Indonesia, 13 April 2009)

Jadi pendeskreditan partai " warisan Orde Baru " seperti Golkar, PDIP dan PPP mengalami kegagalan negosiasi dan penajakan berkoalisi menjelang Pemilu Presiden disebabkan karena aspirasi dan kepentingan personal ketua umum yang mendominasi berakhirnya sistem mengambang yang selama ini dilakukan dan karena mengarah kepada kedinastian.

2. BUDAYA KOALISI ANTAR PARTAI POLITIK

Partai politik adalah peserta Pemilu yang memiliki kesempatan untuk menawarkan program yang telah disusun sebelumnya. Rakyat pemilih sama-sama bermaksud menilai atas program apa yang ditawarkan tersebut. Dalam konteks demokrasi yang terbuka, konstitusi kita telah menjamin kebebasan untuk berserikat, sehingga bagi setiap atau kelompok warga negara dapat mendirikan partai politik. Pada gilirannya, pendirian partai politik dimaksudkan untuk kontestasi keterpilihan para kader partai politik dalam jabatan-jabatan politik yang diinginkan. Termasuk dalam koalisi antar partai politik dalam memperebutkan

jabatan-jabatan dalam pemerintahan (seperti menteri-menteri, Dirjen-dirjen, Kepala BUMN) maupun parlemen (DPR). Akhirnya dapatlah terlihat bahwa pendirian partai politik belum dibarengi dengan optimalisasi kinerja politiknya. Partai-partai politik masih diyakini sebagian khalayak belum menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Selama Pemilu 2009, masih dijumpai konflik internal di sejumlah partai politik peserta Pemilu. Sumber konflik berada pada posisi ketua umum, sekretaris jenderal atau pengurus harian lainnya (Sardini, 2011: 301-302).

Budaya koalisi antar partai politik maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan partai-partai politik yang biasanya terjadi dalam setiap proses pemilihan presiden dan wakil presiden RI guna memenuhi kepentingan sesaat elite partai dengan pemenang Pemilu legislatif. Adapun yang termasuk dengan budaya koalisi antar partai politik misalnya :

a. Budaya koalisi antar partai adalah pragmatis

Budaya koalisi antarpolitical politik yang bersifat pragmatis itu maksudnya bahwa dalam praktik koalisi di Indonesia terutama sejak era reformasi, terlihat lebih mendasarkan pada kepentingan pragmatis (praktis) seperti pembagian kue kekuasaan (*power sharing*), tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*), pertemuan dan pembicaraan politik (*lobbying*) dan *dominasi versus subordinate*

a.1. Adanya pembagian kue kekuasaan (*power sharing*)

Pemilu yang terjadi di era reformasi merupakan Pemilu non-mobilisasi, sekaligus Pemilu dengan tujuan untuk menegakkan hak-hak politik masyarakat sipil, yang selama kurun tiga dekade sebelumnya kurang terakomodasi secara lebih memadai. Betapapun demokrasi lewat Pemilu pada waktu itu masih dinilai

sekedar "demokrasi prosedural" dari Pemilu. Pengertian "demokrasi prosedural" dari Pemilu adalah sistem kompetitif yang bukan saja merupakan wahana perebutan jabatan-jabatan publik (*official elected*), namun juga even untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, sesuai pemufakatan bersama yang dituangkan dalam konstitusi. Pemilu sebagai cara untuk memproduksi atau mereproduksi legitimasi sebesar-besarnya dari rakyat (pemilih) melalui kontestasi yang kompetitif (*competitiveness*) berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan serta bukan dari banyaknya agen sosial politik bernama partai politik semata. (Sardini, 2011: 3)

Pembagian kekuasaan (*Power sharing*) maksudnya adalah koalisi antarpartai politik itu biasanya dilakukan untuk pembagian kue kekuasaan mulai dari wakil presiden, menteri-menteri, dirjen, irjen, kepala BUMN dan lain-lain. Selain itu koalisi dagang sapi yang selama ini berlangsung ternyata hanya memberikan keuntungan bagi oligarkhi elite politik, manfaat bagi bangsa dan masyarakat nyaris terabaikan.

Hal ini terlihat dalam artikel di Kompas, 1 Mei 2009 oleh Suhardi Suryadi

Yang menonjol adalah transaksional kekuasaan (jabatan) ketimbang agenda bersama untuk menciptakan konstruksi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. (Kompas, 1 Mei 2009)

Hal ini juga nampak dalam artikel di Kompas, 30 April 2009 oleh Syamsuddin Haris :

Fenomena Golkar bisa jadi mewakili persoalan krusial dan menahun yang acap kali dialami partai-partai di Indonesia. Yakni aspirasi dan kepentingan personal ketua umum lebih mewarnai sikap dan keputusan partai secara institusi. (Kompas, 30 April 2009)

Hal ini terungkap pula dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh Yonky Karman :

Pragmatisme politik untuk berbagi kue kekuasaan. Koalisi hanya menyempurnakan persekongkolan yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif. (Kompas, 27 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh Eko Prasajo :

Koalisi antarpol dalam rangka menentukan calon presiden dan wakil presiden tak boleh hanya didasarkan hitung-hitungan kepentingan politik jangka pendek. (Kompas, 27 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas, 8 Mei 2009 oleh J Kristiadi :

Persoalan yang muncul dengan koalisi itu adalah bagaimana *power sharing* yang akan dilakukan. (Kompas, 8 Mei 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 16 April 2009 oleh KH Didin

Hafidhuddin dan Irfan Syauqy Beik :

Pembagian kekuasaan yang ada lebih didominasi oleh upaya pemenuhan syahwat politik pribadi dan golongan, dengan metode dagang sapi yang kental dan bukan dengan semangat memperbaiki bangsa ke arah yang lebih baik. (Republika, 16 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 27 April 2009 oleh Harun

Husein :

Mereka akan menukar dukungan politik dengan jabatan mulai dari kursi wapres, menteri dan pejabat setingkat menteri, dirjen, hingga kepala BUMN. (Republika, 27 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 12 Mei 2009 oleh Fitra Arsil :

Partai politik memang dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan-jabatan adalah salah satu bentuk kekuasaan yang sah didapatkan partai karena keberhasilannya dalam melakukan aktivitas politik. (Republika, 12 Mei 2009).

a.2. Adanya tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*)

Dalam kaitan dengan prosedur demokrasi, entitas lain bernama "demokrasi substansial" dilawankan. Dalam demokrasi ini, demokrasi tak sebatas legitimasi prosedural, karena makna terpenting dari demokrasi adalah apakah hasil-hasil Pemilu dapat bermanfaat bagi pencapaian kesejahteraan rakyat banyak. Demokrasi tidak akan banyak memberi makna tatkala nilai tambah dari demokrasi (prosedural) tak terbukti. Karena pada akhirnya, seperti yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini, Pemilu hanya digelar untuk mengatur sirkulasi kekuasaan dan kepemimpinan, sementara produk dari demokrasi bernama pemilu itu sendiri masih dipertanyakan. (Sardini, 2011 : 3)

Tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*) maksudnya adalah koalisi antarpartai politik biasanya terjadi tawar-menawar kekuasaan dalam bentuk kontrak politik antara partai pemenang Pemilu dengan partai-partai politik lainnya.

Kontrak politik itu misalnya pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional; terjadinya reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan politik masyarakat sebagai hak-hak asasi warga.

Hal ini nampak dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh Eko Prasjo :

Kontrak politik sebagai dasar koalisi seperti dilontarkan Presiden SBY. Kontrak politik tidak hanya berisi kewajiban dan hak parpol dalam koalisi, tetapi yang lebih penting adalah tujuan yang akan dicapai koalisi dalam pemerintahan. (Kompas, 27 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 20 April 2009 oleh Nurul S

Hamami :

Dengan keputusan tersebut, Golkar kini menurunkan posisi tawarnya dengan hanya mengajukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan disandingkan dengan capres dari partai lain. (Republika, 20 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 20 April 2009 oleh Nurul S

Hamami :

Namun, dengan kemenangan pada Pileg 2009 serta tingginya angka keterpilihan SBY sebagai capres pada Pilpres 2009 dalam survei-survei beberapa lembaga, SBY dan Demokrat lebih percaya diri dan memiliki posisi tawar yang tinggi untuk menentukan orang yang akan mendampingi sebagai wapres lima tahun ke depan. (Republika, 20 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 1 Mei 2009 oleh Sapto

Waluyo:

Selain membahas alternatif kepemimpinan nasional, PKS juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan mempersiapkan kontrak politik menyangkut masalah kedaerahan, politik domestik, internasional, manajemen koalisi dan *power sharing*. (Republika, 1 Mei 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 27 April 2009 oleh Harun

Husein :

Ijab kabul akan berupa kontrak tertulis yang mengikat. Salah satu yang esensial diatur adalah koalisi tak hanya di pemerintahan tapi juga di parlemen. (Republika, 27 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 13 Mei 2009 oleh Ichwan Ishak :

Bagi parpol, dalam konteks pemilihan presiden langsung tahun 2009 ini, posisi tawar partai secara otomatis pasti akan kian mengecil di mata konstituen. (Republika, 13 Mei 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 15 April 2009 oleh Fahmi AP Pane :

Yang ada baru sebatas wacana normatif untuk membentuk kontrak politik. (Republika, 15 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Media Indonesia, 27 April 2009 oleh

Iberamsjah :

Varian arah koalisi sangat banyak dan bergerak sangat dinamis dari waktu ke waktu dan sangat tergantung pada hasil lobi serta posisi tawar tiap-tiap partai politik. (Media Indonesia, 27 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Media Indonesia, 30 April 2009 oleh R

Siti Zuhro :

Karena itulah SBY sudah menyatakan hanya akan membangun koalisi dengan kontrak politik yang jelas. (Media Indonesia, 30 April 2009)

a.3. Adanya pertemuan dan pembicaraan politik (*lobbying*)

Pertemuan dan pembicaraan politik (*lobbying*) maksudnya adalah pertemuan dan pembicaraan politik (*lobbying*) antara partai-partai politik, terutama partai yang termasuk dalam *Parlementary Threshold (PT)*.

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas, 30 April 2009 oleh

Syamsuddin Haris:

Setelah kalah telak dari Partai Demokrat (PD), elite Golkar bernegosiasi dengan pimpinan PD dan mengusung kembali Kalla sebagai pendamping Yudhoyono. (Kompas, 30 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 1 Mei 2009 oleh Sapto Waluyo :

Sejumlah partai telah melakukan rapat pimpinan tingkat nasional pekan lalu untuk menyongsong pemilihan presiden. Satu diantaranya mendapat sorotan luas yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Republika, 1 Mei 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 16 April 2009 oleh KH Didin

Hafidhuddin dan Irfan Syauqi Beik :

Apalagi ketika koalisi ini melakukan pembicaraan mengenai power sharing nantinya, apakah pos-pos yang ada diserahkan berdasarkan 'jatah' partai semata ataukah pertimbangan kapabilitas, moralitas, dan integritas yang lebih dikedepankan....(Republika, 16 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 27 April 2009 oleh Harun

Husein :

Partai-partai yang meraup suara besar dalam pemilu, seperti Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, PDI Perjuangan dan PKS akan menggelar hajatan partai. Kenduri inilah mengutip istilah politik yang populer belakangan ini yang akan mengakhiri periode 'pacaran' partai-partai menjadi 'ijab kabul'. (Republika, 27 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Media Indonesia 14 April 2009 oleh Eko

Harry Susanto :

Hiruk pikuk pertemuan antarelite politik setelah pemilu legislatif dipastikan frekuensinya semakin meningkat. (Media Indonesia, 14 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Media Indonesia, 30 April 2009 oleh R

Siti Zuhro :

Lepas dari persoalan tersebut, yang menarik adalah bahwa sejak pengumuman hasil quick count pileg, semua parpol yang lolos *Parliamentary Threshold* (PT) khususnya sibuk melakukan komunikasi politik dan menjajaki pembentukan koalisi dengan sesama mereka, terutama guna menghadapi pilpres. (Media Indonesia, 30 April 2009)

a.4. Adanya dominasi versus subordinat

Materi ketentuan dalam Pasal 202 UU No.10 Tahun 2008 sebagai berikut :

Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Dengan ketentuan ini, maka partai politik yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen tidak berhak memiliki perwakilan di parlemen dan suaranya tidak dihitung alias hangus (Sardini, 2010: 68)

Dari 34 partai politik nasional peserta pemilu yang berlaga pada Pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 silam, hanya 9 partai yang memenuhi Parliamentary Threshold 2,5 persen dan 25 partai lainnya perolehan suaranya

kurang dari 2,5 persen, Dampak dari ketentuan Parliamentary Threshold ini, jumlah suara sebanyak 19.048.653 dari 25 partai politik yang tidak mencapai 2,5 persen dari total suara sah 104.099.785 menguap begitu saja.

Kesembilan partai politik yang lolos Parliamentary Threshold tersebut adalah :

1. Partai Demokrat
2. Partai Golkar
3. PDI Perjuangan
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. Partai Amanat Nasional (PAN)
6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8. Partai Gerindra
9. Partai Hanura

Sedangkan ke-25 partai politik yang tidak termasuk dalam Parliamentary Threshold adalah :

1. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
2. Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI)
3. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
4. Partai Barisan Nasional (PBN)
5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
6. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
7. Partai Kedaulatan
8. Partai Persatuan Daerah (PPD)

9. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
11. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
12. Partai Karya Perjuangan (PKP)
13. Partai Matahari Bangsa (PMB)
14. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
15. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)
16. Partai Republika Nusantara (PRN)
17. Partai Pelopor (PP)
18. Partai Damai Sejahtera (PDS)
19. Partai Nasional Banteng kerakyatan Indonesia (PNBKI)
20. Partai Bulan Bintang (PBB)
21. Partai Bintang Reformasi (PBR)
22. Partai Patriot
23. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
24. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
25. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). (Sardini, 2010: 86)

Hal ini menunjukkan adanya wacana dominasi versus subordinat antara partai politik yang lolos Parliamentary Threshold dengan partai politik yang tidak termasuk dalam Parliamentary Threshold (PT)

Dominasi versus subordinate maksudnya adalah pertentangan antara partai-partai besar dengan partai-partai kecil (gurem) dalam upaya mewujudkan

koalisi antarpartai guna menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014.

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh Yonky

Karman :

Memang perolehan suara partai Demokrat meningkat secara fenomenal, sementara partai-partai lain terkena degradasi (kecuali PKS). (Kompas, 27 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh Eko Prasajo :

Ketidaksiapan elite dan parpol untuk berada di luar ring kekuasaan dan menjadi oposisi melahirkan kesulitan tersendiri dalam membentuk koalisi pemerintahan. (Kompas, 27 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Kompas, 19 Mei 2009 oleh Mohammad

Fajrul Falaakh :

Sebanyak sembilan partai peserta Pemilu 2009 melampaui batas bawah perolehan suara (*Parliamentary Threshold*) 2,5 persen dari suara sah nasional. (Kompas, 19 Mei 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 20 April 2009 oleh Nurul S

Hamami :

Melihat perolehan suara Golkar dalam Pileg 9 April lalu, Demokrat tentu lebih aman dan nyaman mengajak Golkar berkoalisi sekaligus memberikan kompensasi kursi cawapres untuk mendampingi SBY dalam kandidasi pilpres. (Republika, 20 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 27 April 2009 oleh Asmar

Oemar Saleh :

Namun meski dinilai mampu mengimbangi Yudhoyono dalam membuat keputusan yang cepat, tanggap dan tegas, Kalla kerap melakukan manuver yang cukup berbahaya bagi keharmonisan hubungan presiden dan wakil presiden. (Republika, 27 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 4 Mei 2009 oleh Nurul S

Hamami :

Terbentur syarat *Parliamentary Treshold* di DPR, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei terhadap hasil pileg, hanya empat dari delapan parpol tersebut yang dapat berkoalisi di parlemen pusat (DPR) nantinya. Keempatnya adalah Golkar, PDIP, Gerindra dan Hanura. (Republika, 4 Mei 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 1 Mei 2009 oleh Sapto

Waluyo :

Tiba-tiba tokoh PKS Anis Matta mengancam akan meninggalkan koalisi, karena duet SBY-JK dinilai gagal menjalankan pemerintahan selama lima tahun ini. JK dipandang sebagai matahari kembar dalam pemerintahan dan Golkar yang bergabung paling akhir dalam kabinet bersatu justru lebih dominan mengarahkan kebijakan pemerintahan. (Republika, 1 Mei 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 27 April 2009 oleh Harun

Husein :

Idealnya koalisi menguasai 50 persen kursi atau minimal sepertiga agar presiden aman dari *impeachment*. (Republika, 27 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 15 April 2009 oleh Fahmi AP Pane :

Masalahnya kelompok pemenang pemilu DPR yang mempunyai peluang terkuat memimpin koalisi dan memenangkan pemilu presiden belum menjelaskan lebih jernih paradigma dan peta jalan pemerintahan periode 2009-2014. (Republika, 15 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 4 Mei 2009 oleh Nurul S

Hamami :

Parpol yang menang akan menggalang dukungan dari parpol kompetitornya, sementara parpol yang kalah juga mencari cara untuk menyatukan kekuatan dalam sebuah koalisi besar untuk menandingi kemenangan pesaingnya. (Republika, 4 Mei 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Media Indonesia, 13 April 2009 oleh R Siti

Zuhro :

Hasil *quick count* juga menunjukkan bahwa basis-basis utama kedua partai tersebut banyak yang tergerogoti oleh Partai Demokrat. (Media Indonesia, 13 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Media Indonesia, 27 April 2009 oleh

Iberamsjah :

Untuk menggambarkan peta kekuatan politik tersebut, dapat kita jelaskan dengan menganalisis perolehan dukungan suara pada dua partai politik besar yaitu Golkar dan PDIP serta lima partai menengah yaitu PKB, PPP, Demokrat, PKS dan PAN. (Media Indonesia, 27 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Media Indonesia 14 April 2009 oleh Eko

Harry Susanto :

Partai politik yang memiliki jumlah suara memadai maupun partai kecil yang minim suaranya umumnya tidak segera menetapkan orientasi koalisi dalam pemilihan presiden sejak dini. (Media Indonesia, 14 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Media Indonesia, 30 April 2009 oleh R

Siti Zuhro :

Berdasarkan hasil pileg yang ditetapkan KPU, Partai Demokrat memperoleh 20,85% (148 kursi), Golkar 14,45% (108 kursi), PDIP 14,03% (93 kursi), PKS 7,88% (59 kursi), PAN 6,01% (42 kursi), PPP 5,32% (39 kursi), PKB 4,94% (26 kursi), Hanura 3,77% (15 kursi). Adapun suara 29 parpol lainnya berada di bawah PT. (Media Indonesia, 30 April 2009)

3. IMPLEMENTASI KOALISI ANTAR PARTAI POLITIK

Secara etimologis, implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *'to implement'*. Dalam kamus Webster, *'to implement'* berarti *"to provide the means for carrying out"* (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu) dan *to give practical effect* (untuk menimbulkan efek/dampak). Implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik.

Berkaitan dengan definisi di atas, Marse mengartikan implementasi kebijakan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan. Van Meter dan Van Horn mengatakan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat

atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.(Sumaryadi, 2010: 85). Pendapat itu menunjukkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi dari koalisi antar partai politik maksudnya adalah perwujudan daripada adanya koalisi antar parpol dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009

a. Perlunya kontrak politik yang mengikat antara partai politik yang berkoalisi

Adanya sistem pemilihan presiden langsung di Indonesia mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6 A terutama dalam ayat (30) dan 4 bahwa calon dinyatakan sebagai pemenang bila memperoleh minimal 50+1 suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada yang mendapatkan suara itu, maka diadakan Pemilu ulang di antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak.

Menurut Smitha Notosusanto, pemilihan Presiden dan wakil presiden dengan dua putaran dijalankan dengan tujuan pokoknya membangun dukungan luas bagi Presiden, legislatif maupaun masyarakat Dengan demikian legitimasi politik Presiden dan wakil presiden lebih kokoh dan stabil, sehingga pemerintahannya lebih terjamin. (Sardini, 2011:34-35). Adanya proses pemilihan Presiden dan wakil presiden RI dengan melalui 2 putaran mengharuskan partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2009 pada saat itu yaitu Partai Demokrat

menggalang koalisi antar partai politik secara besar-besaran guna memenangkan Pemilu Presiden 2009. Guna mengikat tujuan diadakannya koalisi antar partai politik itu, dilakukanlah kesepakatan-kesepakatan kekuasaan antara Partai pemenang Pemilu Legislatif 2009 (Partai Demokrat) dengan partai-partai yang berkoalisi. Kontrak politik adalah kesepakatan-kesepakatan kekuasaan dalam bentuk tertulis antara partai pemenang Pemilu dengan partai-partai politik lainnya.

Kontrak politik itu dapat berisi tentang pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional; terjadinya reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan politik masyarakat sebagai hak-hak asasi warga.

Implementasinya maka amat penting mengembangkan kontrak politik sebagai dasar koalisi. Kontrak Politik tidak hanya berisi kewajiban dan hak parpol dalam koalisi tetapi yang lebih penting adalah tujuan yang akan dicapai koalisi dalam pemerintahan.

a.1. Kontrak politik untuk penyusunan kebijakan dan Undang-Undang

Peran partai politik masih dinilai kurang menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Agenda politik mereka belum paralel dengan agenda keresahan sebagian besar rakyat. Semata-mata mereka masih berkuat pada urusan domestik, sementara bila pun terdorong masuk ke agenda-agenda substansial lebih merupakan pengukuhan agenda-agenda domestik dimaksud. Oleh karena dalam koalisi antar partai politik seharusnya dilakukan untuk penyusunan kebijakan dan Undang-Undang bukan untuk kepentingan-kepentingan domestik partai politik

seperti pembagian kekuasaan, tawar-menawar kekuasaan, pembicaraan politik dan dominasi versus subordinat partai politik.

Hal ini dikupas dalam artikel di Republika, 15 April 2009 oleh Fahmi AP

Pane :

Ini ditegaskan oleh nominator capres terkuat yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono se usai memimpin pertemuan petinggi partai di Cikeas, Jumat (10 April) bahwa koalisi akan didasari aturan main (*rules based*) termasuk untuk penyusunan kebijakan, undang-undang dan sebagainya. (Republika, 15 April 2009)

a.2 Kontrak politik untuk memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

Menurut Larry Diamond (1995) bahwa demokrasi lewat Pemilu tidak bisa dinilai sekedar " demokrasi prosedural." Pengertian demokrasi prosedural adalah suatu sistem kompetitif yang bukan saja merupakan wahana perebutan jabatan-jabatan kekuasaan publik (*official elected*), namun juga even untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, sesuai pemufakatan bersama yang dituangkan dalam konstitusi. Kata kunci paling penting dari demokrasi prosedural adalah kapasitas Pemilu sebagai cara untuk memproduksi atau mereproduksi legitimasi sebesar-besarnya dari rakyat (pemilih) melalui kontestasi yang kompetitif (*competitiveness*) berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan serta bukan banyaknya agen sosial politik bernama partai politik (Sardini, 2011:3) Oleh karena itu, kontrak politik dalam koalisi antar partai politik dalam Pemilu Presiden 2009 seharusnya untuk memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan partai-partai politik.

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas, 27 April 2009 oleh Eko

Prasojo:

Esensi dasar pemerintahan adalah terselenggaranya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan kata lain, berpemerintahan adalah memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Kompas, 27 April 2009)

a.3. Kontrak politik sebagai ketidakpercaya dirinya Partai Demokrat

Adanya sistem pemilihan Presiden langsung di Indonesia yang mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6A terutama dalam ayat (3) dan 4 bahwa calon dinyatakan sebagai pemenang bila memperoleh minimal 50+1 suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia (Sardini, 2011: 34-35)

Sebenarnya Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2009 telah memperoleh 20 persen suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, hanya saja posisi tersebut dirasa masih kurang aman, karena bilamana partai-partai yang termasuk dalam Parliamentary Treshold (PT) lainnya melakukan koalisi antar partai maka Partai Demokrat akan mengalami kekalahan.

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 27 April 2009 :

Tapi perlunya kontrak juga dilatari kurang percaya diri-nya PD mengusung capres/cawapres sendiri. Sebabnya PD menang pemilu dengan suara sekitar 20 persen alias simple majority. (Republika, 27 April 2009)

b. Pemakzulan hanya bisa terjadi bila paripurna DPR dihadiri dua pertiga anggotanya artinya koalisi idealnya menguasai 50 persen kursi di Parlemen (DPR) menurut pasal 7B ayat (3) UUD 1945

Sejarah Pemilu kita di era reformasi ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan reformasi. Pemilu adalah produk reformasi yang didesakkan kalangan mahasiswa, intelektual dan kalangan partikelir lain terutama sejak tahun 1997 dan 1998. Seperti tampak pada era reformasi, Pemilu merupakan instrumen sirkulasi kepemimpinan nasional dan daerah. Formasi kekuasaan yang semula didominasi kekuatan Orde Baru berubah ke arah yang lebih variatif. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) pada Pemilu di era reformasi mengubah wajah formasi kekuasaan elite politik (*elite resettlement*) di hampir seluruh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif di Indonesia, dari pusat hingga ke daerah. Konstelasi kekuasaan yang semula didominasi kekuatan Orde Baru akhirnya tampak lebih variatif (Sardini, 2011: 2).

Dalam konteks reformasi, Pemilu adalah karya politik gerakan reformasi. Oleh karena melibatkan pula massa akar rumput, Pemilu yang terjadi di era reformasi merupakan Pemilu non-mobilisasi, sekaligus Pemilu dengan tujuan untuk menegakkan hak-hak politik masyarakat sipil, yang selama kurun tiga dekade sebelumnya kurang terakomodasi secara lebih memadai (Sardini, 2011: 3)

Sejarah Pemilu di Indonesia sejak digelar kali pertama hingga Pemilu kali terakhir pada tahun 2009 telah mengkayakan pemahaman kita akan praktik demokrasi. Telah sebanyak sembilan kali Pemilu digelar di Indonesia ini, Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 setelah untuk jangka waktu 16 (enam belas) tahun kemudian baru digelar kembali oleh Orde Baru pada tahun 1971. Pemilu 1971 merupakan Pemilu yang pertama sejak Soeharto menjabat sebagai (pj) presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa Majelis

Permasyarakatan Rakyat Sementara (SI MPR) pada 1967. Seperti diketahui akhirnya MPRS memberikan mandat kepada Soeharto untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan negara berdasarkan Ketetapan (TAP MPRS No.XI Tahun 1966) termasuk menyelenggarakan Pemilu. Status predikat Soeharto adalah sebagai Pejabat Presiden (Pj) (Sardini, 2011: 14-15). Hal ini merupakan proses transfer kekuasaan dari rezim Soekarno ke rezim Orde Baru pada 1966. Keadaan ini bagi sebagian orang ada yang menganggapnya sebagai suatu pemakzulan (*impeachment*) dari lembaga MPRS terhadap Presiden Soekarno. Betapapun rezim Orde Baru telah memulai tradisi demokrasi prosedural yang cukup konsisten, terbukti secara reguler menggelar Pemilu setiap lima tahun sekali. Dimulai dari Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pnemilu 1992 hingga terakhir Pemilu 1997 di era Orde Baru (Sardini, 2011: 3).

Jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 mengakhiri demokrasi prosedural. Presiden BJ Habibie membangun Pemilu yang lebih baik dengan mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Bila melihat kurun waktu sejak Pemilu tahun 1997, seharusnya Pemilu baru akan digelar pada tahun 2003. Namun atas sejumlah pertimbangan serta desakan sebagian besar rakyat melalui agen-agen politik, BJ Habibie menjadwalkan Pemilu pertama di era reformasi. Pemilu ini menghasilkan Presiden KH Abdurrahman Wahid serta Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan tak langsung di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Melalui mekanisme pemakzulan (*impeachment*) pada lembaga yang sama pada Sidang MPR tahun 2001 akhirnya Megawati Soekarnoputri menggantikan

Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa kekuasaan Megawati Soekarnoputri, Pemilu tahun 2004 digelar lebih tertata dan demokratis daripada sebelumnya. Pada masa itu pembenahan tata kelola di antara cabang-cabang kekuasaan sekaligus merupakan eksperimen pertama negara demokratis. Akhirnya Pemilu tahun 2004 menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta HM Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Pemilu secara langsung oleh rakyat (Sardini, 2011: 6-7). Jadi di Indonesia pernah terjadi 2 kali pemakzulan (*impeachment*) lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Presiden yaitu pada masa Presiden Soekarno dan masa Presiden KH Abdurrahman Wahid .

Pemakzulan (*impeachment*) adalah upaya menjatuhkan Presiden ketika sedang menjabat karena dianggap telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di mata rakyatnya

b.1 Persyaratan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden

Pemberlakuan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang sah.

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 12 Mei 2009 oleh Fitra Arsil :

Dalam sistem presidensial yang dianut dalam UUD NRI 1945 sekarang presiden tidak dapat dijatuhkan karena kebijakannya, melainkan hanya dapat dijatuhkan jika melakukan pelanggaran hukum (pidana) seperti yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. (Republika, 12 Mei 2009)

b.2 Koalisi idealnya 50 persen kursi di parlemen

Maksudnya adalah agar posisi presiden aman dari *impeachment* maka idealnya koalisi yang terbentuk adalah sebesar 50 persen kursi atau minimal sepertiga dari kursi DPR.

Hal ini terlihat dalam artikel di *Republika*, 27 April 2009 oleh Harun Husein :

Agar kebijakan pemerintah tak tersandera di Senayan serta meredam gangguan interpelasi dan angket. Idealnya koalisi menguasai 50 persen kursi atau minimal sepertiga agar presiden aman dari *impeachment*. (*Republika*, 27 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di *Republika*, 15 April 2009 oleh Fahmi AP Pane :

Dalam kaitan itu, banyak pihak juga menekankan koalisi harus didukung oleh kekuatan mayoritas di parlemen, sekurangnya 50 persen plus satu kursi anggota DPR. (*Republika*, 15 April 2009)

c. Syarat mengajukan capres/cawapres yang menyatakan hanya partai atau gabungan partai meraih 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara menurut UU no. 42/2008 atau UUD 1945

Sistem pemilihan presiden langsung di Indonesia mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6 A terutama dalam ayat (3) dan 4. Calon dinyatakan sebagai pemenang bila memperoleh minimal 50+1 suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada yang mendapatkan suara itu, maka diadakan Pemilu ulang di antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak.

Menurut Smitha Notosusanto, pemilihan Presiden dan wakil presiden dengan dua putaran dijalankan dengan tujuan pokoknya membangun dukungan luas bagi presiden, legislatif maupun masyarakat. Dengan demikian legitimasi politik Presiden dan wakil presiden lebih kokoh dan stabil, sehingga pemerintahannya lebih terjamin. Paling tidak ada lima kelebihan dengan memakai sistem ini.

Kelebihan itu antara lain: sang Presiden dan wakil presiden akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat secara langsung : tidak perlu terikat pada konsensi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya; lebih akuntabel dibandingkan sistem lain. Karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada legislatif (*electoral college*) secara sebagian atau sepenuhnya; *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang; kriteria calon dapat secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya (Sardini, 2011: 34-35)

Maksudnya adalah persyaratan untuk mengajukan Calon Presiden/Wakil Presiden apabila diusulkan oleh partai atau gabungan partai peraih 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara. Implementasi dari UU itu adalah Partai-partai besar berkoalisi dengan partai-partai kecil yang termasuk dalam *parliamentary threshold* (PT).

Parliamentary Threshold (PT) maksudnya adalah batas minimal 25 persen suara secara nasional yang ditentukan UU Pemilu Presiden. Ada 9 partai yang termasuk dalam PT yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, PDIP, PKS,PKB,PAN,PPP, Hanura dan Gerindra.

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas, 30 April 2009 oleh Syamsuddin Haris:

Secara matematis sulit bagi Golkar (14,6 persen) mengajukan Kalla sebagai capres karena harus memenuhi persyaratan minimal 25 persen suara secara nasional yang ditentukan UU Pemilu Presiden. (Kompas, 30 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Republika, 15 April 2009 oleh Fahmi AP Pane :

Dalam kaitan itu, banyak pihak juga menekankan koalisi harus didukung oleh kekuatan mayoritas di parlemen, sekurangnya 50 persen plus satu kursi anggota DPR. (Republika, 15 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika, 27 April 2009 oleh Harun Husein :

Melihat syarat itu, PD mutlak membutuhkan partai lain, kecuali 20 persen suaranya berbanding lurus dengan persentase kursinya. (Republika, 27 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika, 20 April 2009 oleh Nurul S Hamami :

Melihat perolehan suara Golkar dalam Pileg 9 April lalu, Demokrat tentu lebih aman dan nyaman apabila mengajak Golkar berkoalisi sekaligus memperkuat kompensasi kursi cawapres untuk mendampingi SBY dalam kandidasi pilpres. (Republika, 20 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Media Indonesia, 30 April 2009 oleh R Siti Zuhro :

Berdasarkan hasil pileg yang ditetapkan KPU, Partai Demokrat memperoleh 20,85% (148 kursi), Golkar 14,45% (108 kursi), PDIP 14,03% (93 kursi), PKS 7,88 % (59 kursi), PAN 6,01% (42 kursi), PPP 5,32% (39 kursi), PKB 4,94% (26 kursi), Gerindra 4,46% (30 kursi), Hanura 3,77% (15 kursi). Adapun suara 29 parpol lainnya berada di bawah PT. (Media Indonesia, 30 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Media Indonesia, 27 April 2009 oleh Iberamsjah :

Ada beberapa varian koalisi politik yaitu : Varian A. Koalisi yang dimotori oleh Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009, yang mungkin akan didukung oleh PKS dan PKB serta sangat mungkin oleh PAN... Varian B, koalisi Golkar , PDIP, Hanura dan Gerindra... Varian C, Varian ini terbentuk oleh Golkar, Hanura, PPP dan sejumlah partai baru yang tidak mencapai *parliamentary threshold* (PT) yang diperkirakan mendapatkan dukungan sekitar 25% suara. Varian D adalah koalisi antara PPP, PAN, Gerindra dan sejumlah partai baru yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* (PT).

Varian E adalah koalisi antara PDIP, PPP, Hanura dan beberapa partai kecil yang juga diperkirakan akan dapat mencapai 20% dukungan suara. (Media Indonesia, 27 April 2009)

C.TEMATIK WACANA KOALISI ANTARPARTAI POLITIK DI SURAT KABAR KOMPAS, MEDIA INDONESIA DAN REPUBLIKA

Di dalam artikel-artikel yang dimuat di surat kabar terdapat tema-tema penting yang berkaitan dengan wacana koalisi pragmatis antar partai politik yang dimuat di ketiga media massa yaitu Kompas, Media Indonesia dan Republika. Tema merupakan gagasan yang disampaikan secara tertulis maupun lisan (Eriyanto, 2001: 229). Tematik ini baru dipahami ketika kita membaca teks secara keseluruhan.

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan atau utama dari suatu teks. Tema menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh penulis dalam wacananya.

Ada beberapa tema dalam koalisi antar partai politik pada pemilihan calon presiden dan presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 yaitu :

1. KOMPAS

- a. Koalisi dan Kinerja Pemerintah oleh Eko Prasajo (27 April 2009)
- b. Tumbangnya Koalisi Sembilan Parpol oleh Mohammad Fajrul Falaakh (19 Mei 2009)
- c. Terperosok Koalisi Semu oleh Suhardi Suryadi (1 Mei 2009)
- d. Mencermati Spekulasi Koalisi Demokrat-PDIP oleh J Kristiadi (8 Mei 2009)
- e. Dari Massa Mengambang ke Partai Mengambang oleh M Qodari (11 April 2009)
- f. Golkar, Apa yang kau cari? oleh Syamsuddin Haris (30 April 2009)

g. Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa oleh Yonky Karman (27 April 2009)

2. MEDIA INDONESIA

a. Koalisi Pascakemenangan Demokrat oleh Eko Harry Susanto (14 April 2009)

b. Pemilu Legislatif 2009, Sebuah Catatan Kritis oleh R Siti Zuhro (13 April 2009)

c. Dramaturgi Koalisi Parpoldalam Pilpres oleh R Siti Zuhro (14 April 2009)

d. Peta Kekuatan Politik dan Arah Koalisi Pilpres oleh Iberamsjah (27 April 2009)

3. REPUBLIKA

a. Membaca Arah Golkar oleh Nurul S Hamami (20 April 2009)

b. Berharap menjadi koalisi sejati oleh Nurul S Hamami (4 Mei 2009)

c. Di Persimpangan Dagang Sapi oleh Harun Husein (27 April 2009)

d. Integrasi Kebangsaan Melalui Kebangsaan Melalui Koalisi Permanen oleh Ichwan Ishak (13 Mei 2009)

e. Koalisi tanpa agenda oleh Fitra Arsil (12 Mei 2009)

f. Mencermati Arah Bursa Cawapres oleh Asmar Oemar Saleh (27 April 2009)

g. Koalisi Terbaik Bagi Umat oleh Fahmi AP Pane (15 April 2009)

h. Komunikasi Politik PKS oleh Sapto Waluyo (1 Mei 2009)

i. Koalisi Besar Partai Menuju Pilpres 2009 oleh Sugiyono (5 Mei 2009)

j. Membangun Koalisi Pro Ekonomi Syariah oleh KH Didin Hafidhuddin dan Irfan Syauqi Beik (16 April 2009)

a. **Secara Makro** berarti koalisi antarpartai politik mempunyai pengertian atau makna sebagai penggabungan atau menyatunya berbagai partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya pembagian jatah kekuasaan di kabinet ataupun di

parlemen atau soal pemenuhan harapan-harapan rakyat terutama kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Di **surat kabar Kompas**, beberapa tema dalam koalisi antar partai politik secara **makro** yaitu :

1. Koalisi dan kinerja Pemerintah oleh Eko Prasajo
2. Mencermati Spekulasi Demokrat-PDIP oleh J Kristiadi
3. Terperosok Koalisi Semu oleh Suhardi Suryadi

Di **surat kabar Media Indonesia**, beberapa tema dalam koalisi antar partai politik secara **makro** yaitu :

1. Dramaturgi Koalisi Parpol dalam Pilpres oleh R Siti Zuhro.
2. Koalisi Pascakemenangan Demokrat oleh Eko Harry Susanto.

Di **surat kabar Republika**, beberapa tema dalam koalisi antar partai politik secara **makro** yaitu :

1. Membangun Koalisi Pro Ekonomi Syariah oleh KH Didin Hafidhuddin dan Irfan Syauqi Beik
2. Koalisi Terbaik Bagi umat oleh Fahmi AP Pane.
3. Koalisi Besar Partai Menuju Pilpres 2009 oleh Sugiyono
4. Integrasi Kebangsaan Melalui Koalisi Permanen oleh Ichwan Ischak.
5. Berharap Menjadi Koalisi Sejati oleh Nurul S Hamami.
6. Koalisi Tanpa Agenda oleh Fitra Arsil.

b. Secara Mikro, maksud koalisi sebagai pembagian kekuasaan (*power sharing*), tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*), Pembicaraan-pembicaraan Politik (*Lobbying*), sebagai pertentangan kelas dominan (*dominan versus subordinate*).

Di surat kabar **Kompas**, beberapa tema dalam koalisi antar partai politik secara **mikro** yaitu :

1. Dari masa Mengambang ke Partai mengambang oleh M Qodari. (*Lobbying*)
2. Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa oleh Yonky Karman (*Power sharing dan Dominan versus subordinate*)
3. Golkar, Apa yang kau cari? oleh Syamsuddin Haris. (*Lobbying*)
4. Tumbangnya " Koalisi " Sembilan Parpol oleh M Fajrul Falaakh. (*Dominan versus Subordinate*).
5. Mencermati Spekulasi Demokrat-PDIP oleh J Kristiadi (*Power Bargaining*)
6. Terperosol Koalisi Semu oleh Suhardi Suryadi (*Power Bargaining*)

Di surat kabar **Media Indonesia**, beberapa tema dalam koalisi antar partai politik secara **mikro** yaitu :

1. Pemilu Legislatif 2009, sebuah catatan kritis oleh R Siti Zuhro (*Dominan versus subordinate*).
2. Peta Kekuatan Politik dan Arah Koalisi Pilpres oleh Iberamsjah (*Dominan versus Subordinate*)

Di surat kabar **Republika**, beberapa tema dalam koalisi antar partai politik secara **mikro** yaitu :

1. Membaca Arah Golkar oleh S Hamami (*Power Bargaining*)
2. Koalisi Tanpa Agenda oleh Fitra Arsil (*Power Sharing*)
3. Komunikasi Politik PKS oleh Sapto Waluyo (*Lobbying dan Power Bargaining*)
4. Mencermati Arah Bursa Cawapres oleh Asmar Oemar Saleh (*Dominan versus Subordinate*)

5. Di Persimpangan Dagang Sapi oleh Harun Husein (*Power sharing, Power Bargaining dan Lobbying*)

b.1 Pembagian kekuasaan (*power sharing*)

Pengertian pembagian kekuasaan (*power sharing*) adalah pragmatisme politik dalam pembagian kue kekuasaan. Wacana untuk berbagi kue kekuasaan dimana koalisi hanya menyempurnakan persekongkolan yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif. Koalisi tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Politik dagang sapi ini mengingkari hak rakyat untuk menjadi lebih sejahtera, karena seusai Pemilu politisi menjauh dari asirasi dan kepentingan rakyat.

Wacana *power sharing* atau pembagian kekuasaan juga terdapat dalam kondisi dimana partai-partai besar itu sebelum adanya ijab kabul memerlukan makna sebagai pertukaran dukungan politik dengan jabatan mulai dari kursi wapres, menteri dan pejabat setingkat menteri, dirjen hingga kepala BUMN.

Sub-sub tema makna dari pembagian kekuasaan (*power sharing*) misalnya :

b.1.1. Partai-partai besar menginginkan power yang besar pula

Maksud dari partai-partai besar menginginkan power yang besar pula adalah bahwa partai-partai besar seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP dan PKS yang termasuk dalam *Parliamentary Treshold (PT)* mengharapkan dapat memperoleh jatah kekuasaan yang besar pula.

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas yang ditulis oleh Yonky Karman yang berjudul *Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa* (Kompas 27 April 2009) bahwa :

Koalisi merupakan pembagian kue kekuasaan yang hanya menyempurnakan persekongkolan antara eksekutif dan legislatif. Koalisi tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Wacana *power sharing* atau politik dagang

sapi ini mengingkari hak rakyat untuk menjadi lebih sejahtera, karena sesuai Pemilu politisi menjauh dari aspirasi dan kepentingan rakyat. (Kompas, 27 April 2009)

Dalam artikel di Republika yang ditulis oleh Harun Husein yang berjudul Di Persimpangan Dagang Sapi (Republika, 27 April 2009) dikatakan bahwa

Wacana *power sharing* atau pembagian kekuasaan juga terdapat dalam kondisi dimana partai-partai besar itu sebelum adanya *ijab kabul* memerlukan makna sebagai pertukaran dukungan politik dengan jabatan mulai dari kursi wapres, menteri dan pejabat setingkat menteri, dirjen hingga kepala BUMN. (Republika, 27 April 2009)

b.1.2. Partai-partai gurem (partai-partai kecil) meminta power yang cukup besar pula.

Maksud daripada partai-partai gurem (partai-partai kecil) meminta power yang cukup besar pula adalah partai-partai kecil seperti PPP, PKB dan PAN juga meminta jatah dalam pembagian kekuasaan di pemerintahan.

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas yang ditulis oleh Eko Prasjojo (Kompas, 27 April 2009) yang berjudul Koalisi dan Kinerja Pemerintahan bahwa :

Partai-partai kecil yang terdapat dalam *Parliamentary Threshold* (PT) berusaha meminta jatah kekuasaan baik di dalam pengisian kabinet (menteri-menteri), wakil presiden, Ketua MPR, Ketua DPR maupun dirjen-dirjen dan Kepala BUMN. (Kompas, 27 April 2009)

b.2. Tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*)

Pengertian tawar-menawar adalah upaya-upaya dari pemenang hasil Pemilu 2009 untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan kepada para parpol yang termasuk dalam koalisi partainya Tawar-menawar ini bisa berupa kontrak tertulis yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan koalisi. Salah satu hal yang esensial diatur adalah koalisi yang tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di parlemen.

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika yang ditulis oleh Harun Husein yang berjudul Di Persimpangan Dagang Sapi (Republika 27 April 2009) bahwa :

Wacana *power bargaining* ini nampak ketika partai-partai besar yang meraup suara besar dalam Pemilu seperti Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, PDIP, dan PKS akan mengakhiri periode 'pacaran partai' menjadi '*ijab kabul*'. *Ijab kabul* ini akan berupa kontrak tertulis yang mengikat. (Republika, 27 April 2009)

Sub-sub tema dalam koalisi antarpol secara mikro mengenai tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*):

b.2.1. Kelompok pemenang pemilu DPR atau Partai Terbesar membuat kontrak politik kepada para anggota koalisinya.

Maksudnya adalah kelompok SBY sebagai partai pemenang pemilu menerapkan kontrak politik sebagai dasar koalisi antar parpol dalam pemilihan capres dan cawapres, menteri, Ketua MPR/DP, dirjen-dirjen dan kepala BUMN.

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika yang berjudul Koalisi Terbaik Bagi Umat yang ditulis oleh Fahmi AP Pane (Republika, 15 April 2009) bahwa :

Koalisi akan didasari aturan main (*rules based*) termasuk untuk penyusunan kebijakan Undang-Undang dan lain-lain. (Republika, 15 April 2009)

Hal ini nampak dalam artikel di Kompas yang ditulis oleh Eko Prasajo dengan judul Koalisi dan Kinerja Pemerintah (Kompas, 27 April 2009) bahwa :

SBY sebagai pemimpin partai pemenang pemilu menerapkan kontrak politik sebagai dasar koalisi antar parpol dalam pemilihan capres dan cawapres maupun pengisian kabinet (menteri-menteri), Ketua MPR, Ketua DPR, dirjen-dirjen dan kepala BUMN. Kontrak politik tidak hanya berisi kewajiban dan hak parpol dalam koalisi tetapi yang lebih penting adalah tujuan yang akan dicapai dalam pemerintahan. Biasanya proses koalisi itu berjalan dalam jangka pendek yaitu hanya untuk mendiskusikan pembagian kekuasaan (*power sharing*), sementara itu diskusi, negosiasi serta kontrak politik terkait agenda legislatif untuk pemerintahan yang efektif kurang menjadi fokus perhatian. (Kompas, 27 April 2009)

Hal ini juga terungkap dalam artikel di Republika yang ditulis oleh Harun Husein yang berjudul Di Persimpangan Dagang Sapi (Republika, 27 April 2009) bahwa :

'Ijab kabul' akan berupa kontrak tertulis yang mengikat. Salah satu yang esensial diatur adalah koalisi tidak hanya di pemerintahan tapi juga di parlemen. (Republika, 27 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika (27 April 2009) oleh Asmar Oemar Saleh yang berjudul Mencermati Arah Bursa Cawapres bahwa :

Kelompok pemenang pemilu DPR 2009 memiliki posisi tawar yang tinggi untuk menentukan orang yang akan mendampingi Presiden sebagai wapres 5 tahun ke depan dengan mengumumkan lima kriteria calon wakil presiden. (Republika, 27 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Media Indonesia (14 April 2009) yang ditulis oleh R Siti Zuhro yang berjudul Dramaturgi Koalisi Parpol bahwa :

Partai pemenang pemilu legislatif 2009 hanya akan berkoalisi dengan kontrak politik yang jelas. Hal ini dilakukan guna menjaga kestabilan pemerintah baik di pemerintahan maupun parlemen. (Media Indonesia, 14 April 2009)

b.2.2. Kelompok atau Partai Menengah (Golkar dan PDI-P) maupun Partai gurem (PKS,PPP,PKB dan PAN) menurunkan posisi tawar kekuasaannya setelah mengalami kekalahan dalam pemilu legislatif 2009.

Maksud daripada menurunkan posisi tawar kekuasaannya adalah kesadaran diri terhadap realita bahwa kelompok atau partainya berpeluang sangat kecil dalam pemilihan capres/cawapres setelah mengalami kekalahan dalam pemilu legislatif 2009.

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika (20 April 2009) oleh Nurul S Hamami yang berjudul Membaca Arah Golkar bahwa :

Golkar yang menurunkan posisinya dengan hanya mengajukan calon wakil presiden (cawapres) padahal sebelumnya Jusuf Kalla (JK) ketua umum Golkar yang juga wakil presiden menyatakan kesiapannya menjadi capres bila Golkar kembali menang sebagaimana pada pemilu 2004. (Republika, 20 April 2009)

Hal ini terlihat dalam artikel di Republika (1 Mei 2009) yang berjudul Komunikasi Politik PKS yang ditulis oleh Sapto Waluyo bahwa :

Kelompok atau Partai menengah (PKS,PKB, PAN, PPP) minta bagian atau jatah kekuasaan selain calon presiden setelah mengalami kekalahan suara dalam pemilu legislatif 2009 yang lalu. Misalnya PKS yang mempersiapkan kontrak politik menyangkut masalah kedaerahan, politik domestik, internasional, manajemen koalisi dan *power sharing*. (Republika, 1 Mei 2009)

b.3 Pembicaraan-pembicaraan politik (*Lobbying*)

Pengertian pembicaraan-pembicaraan politik (*lobbying*) adalah komunikasi yang dilakukan oleh para petinggi partai politik dalam rangka melakukan pembahasan mengenai berbagai kepentingan politik dalam hal ini adalah masalah pembagian kekuasaan seperti penentuan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Pos-pos kementerian, Ketua DPR/MPR, dirjen, Kepala BUMN dan sebagainya.

Sub-sub tema dalam koalisi antar partai politik secara mikro mengenai pembicaraan-pembicaraan politik (*lobbying*) :

b.3.1. Sejumlah partai melakukan rapat pimpinan tingkat nasional dalam rangka menyongsong pemilu presiden.

Maksudnya adalah banyak partai politik yang melakukan rapat pimpinan tingkat nasional menjelang pemilihan capres/cawapres 2009 tujuannya adalah untuk membicarakan masalah-masalah politik dan menyatukan kesepakatan-kesepakatan partai.

Hal ini terungkap dalam artikel di Media Indonesia yang ditulis oleh Eko Harry Susanto yang berjudul Koalisi Pascakemenangan Demokrat bahwa :

Pertemuan-pertemuan antarelite politik setelah pemilu legislatif 2009 semakin meningkat. Diantara pimpinan partai sudah melakukan pertemuan-pertemuan tetapi umumnya masih belum jelas arahnya dan cenderung tidak transparan dalam pengungkapan kepada publik. Ketertutupan justru menghasilkan berbagai penafsiran seperti mengkaitkan dengan koalisi setengah hati, koalisi semu yang mudah berubah sesuai arah angin. (Media Indonesia, 14 April 2009)

Hal ini juga nampak dalam artikel di *Republika* (1 Mei 2009) yang berjudul *Komunikasi Politik PKS* oleh Sapto Waluyo bahwa PKS menggelar musyawarah majelis Syura untuk menentukan arah koalisi. (*Republika*, 1 Mei 2009)

Hal ini juga terungkap dalam artikel di *Kompas* 30 April 2009 oleh Syamsuddin Haris yang berjudul *Golkar Apa yang kau cari?* Rapat Pleno DPP Golkar memutuskan untuk tidak mengusung capres dalam kandidat pemilihan presiden langsung bulan Juli 2009.

Hal ini dibahas dalam *Republika* (20 April 2009) yang berjudul *Membaca Arah Golkar* yang ditulis oleh Nurul S Hamami bahwa :

Menjelang pemilu legislatif Ketua Umum Partai Golkar JK menyatakan siap menjadi calon Presiden sebagai reaksi tak kunjung datangnya pinangan Presiden SBY. Namun setelah mengalami kekalahan telak dari Partai Demokrat (PD), elite Golkar bernegosiasi dengan pimpinan Partai Demokrat (PD) dan mengusung kembali Kalla sebagai pendamping SBY. (*Republika*, 20 April 2009)

b.3.2. Partai-partai besar menggalang koalisi besar dengan mengadakan komunikasi politik dengan partai-partai menengah dan partai-partai kecil

Maksud dari pengertian partai-partai besar menggalang koalisi besar dengan mengadakan komunikasi politik dengan partai-partai menengah dan partai-partai kecil adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh partai-partai besar guna memperkokoh posisinya dalam pemilihan capres/cawapres 2009.

Hal ini terungkap dalam artikel di *Media Indonesia* (14 April 2009) oleh R Siti Zuhro yang berjudul *Dramaturgi Koalisi Parpol dalam Pilpres* bahwa :

Semua parpol yang lolos *Parliamentary Threshold (PT)* khususnya sibuk melakukan komunikasi politik dan menjajaki pembentukan koalisi dengan sesama mereka terutama guna menghadapi pilpres. (*Media Indonesia*, 14 April 2009)

Hal ini terlihat juga dalam artikel di *Kompas*, 1 Mei 2009 oleh Suhardi Suryadi yang berjudul *Terperosok Koalisi Semu* diketahui bahwa :

Capres Megawati dan Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan beberapa parpol yang akan menjadi mitra koalisi menerapkan lima aspek terhadap calon wakil presiden yaitu integritas, kapasitas dan kapabilitas, loyalitas dan bebas dari konflik kepentingan, akseptabilitas serta efektivitas koalisi. (Kompas, 1 Mei 2009)

b.4 Pertentangan kelas dominan versus subordinate (*dominasi versus subordinate*)

Maksud dari adanya pertentangan kelas dominan versus subordinate adalah kelompok besar yang mendominasi terhadap fenomena koalisi antar partai politik dan kelompok-kelompok kecil yang tersubordinat dari kelompok besar tersebut.

Sub-sub tema dalam pertentangan kelas dominan (*dominasi versus subordinate*) :

b.4.1. Partai Terbesar atau pemenang pemilu legislatif 2009 mendominasi partai-partai lainnya

Maksud dari pengertian partai terbesar atau pemenang pemilu legislatif 2009 mendominasi partai-partai lainnya adalah bahwa Partai Demokrat mendominasi dalam koalisi partai politik guna pemilihan capres/cawapres 2009.

Hal ini terungkap dalam artikel di Republika (4 Mei 2009) oleh Nurul S Hamami yang berjudul Berharap Menjadi Koalisi Sejati bahwa :

Dalam Pemilu Legislatif 2009, yang menjadi kelas dominan hanyalah 1 partai yaitu Partai Demokrat sedangkan yang menjadi kelas subordinat adalah 8 partai lainnya yang termasuk dalam *Parliamentary Threshold (PT)* yang telah ditetapkan oleh KPU karena memperoleh hasil 2,5 % suara nasional yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, PKS, PAN, PKB, Gerindra dan Hanura (Republika, 4 Mei 2009)

Hal ini juga terlihat dalam artikel di Kompas (8 Mei 2009) oleh J Kristiadi yang berjudul Mencermati Spekulasi Koalisi Demokrat-PDIP bahwa :

Adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya koalisi Demokrat dan PDIP menunjukkan adanya wacana dominasi versus subordinasi. Partai politik yang termasuk partai dominan adalah Partai Demokrat yang menduduki peringkat 1 dalam Pemilu

Legislatif 2009, selain itu PD menempatkan SBY sebagai calon presiden lagi. Partai subordinat adalah PDIP karena walaupun Rakernas PDIP secara bulat telah menentukan Megawati menjadi capres, tetapi SBY pasti tidak mau menjadi wakil presiden. (Kompas, 8 Mei 2009)

b.4.2. Wacana pertentangan kelas dominan versus subordinasi tampak juga dalam pemilihan cawapres.

Maksud dari pengertian adanya wacana pertentangan kelas dominan versus subordinasi dalam pemilihan cawapres adalah pertentangan-pertentangan yang terjadi antara Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu terhadap partai-partai politik lainnya dalam memilih pendampingnya dalam pemerintahan nantinya

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas (27 April 2009) oleh Yongky Karman yang berjudul Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa bahwa :

Meski posisi SBY 'enteng jodoh' penentuan calon wakil presiden tak sederhana. Sebab bila memilih dari partai lain maka PD menjadi partai dominan dan partai lain yang menjadi wakil presiden menjadi subordinat. (Kompas, 27 April 2009)

Hal ini juga terlihat dalam artikel di Kompas (8 Mei 2009) oleh J Kristiadi yang berjudul Menermati Spekulasi Koalisi Demokrat-PDIP bahwa :

Pecahnya koalisi "*incumbent*" (SBY-JK) yang berdasarkan berbagai jajak pendapat diunggulkan memenangi pilpres satu putaran. Selain itu, wacana terhadap koalisi antara parpol pemenang pemilu legislatif 2009 (Partai Demokrat) dengan partai-partai Islam (PKS, PKB, PAN, PPP) menunjukkan dominasi yang sangat kuat antara partai terbesar dengan partai lainnya yang termasuk dalam PT. (Kompas, 8 Mei 2009)

b.4.3. Partai-partai politik yang termasuk dalam *Parliamentary Threshold* (PT) mendominasi kekuasaan terhadap partai-partai politik yang tidak termasuk dalam PT.

Maksudnya adalah adanya pendominasi kekuasaan antara partai-partai politik yang termasuk dalam *Parliamentary Threshold* (PT) terhadap partai-partai politik yang tidak termasuk dalam PT.

Hal ini terlihat dalam artikel di Media Indonesia (27 April 2009) oleh Iberamsjah yang berjudul Peta Kekuatan Politik dan Arah Koalisi Pilpres bahwa :

Adanya perubahan sangat signifikan pada konstelasi posisi partai politik di Indonesia seperti PAN, PKB, PPP, PKS, Golkar, PDIP, Partai Demokrat, Gerindra dan Hanura. Perubahan konstelasi partai politik tersebut menunjukkan adanya pergeseran yang sangat berarti pada peta kekuatan politik di Indonesia menjelang pemilihan presiden (pilpres) pada 8 Juli 2009. Peta kekuatan politik baru ini menjadi sangat penting untuk membaca koalisi-koalisi yang mungkin akan terjadi dengan berbagai variasinya. (Media Indonesia 27 April 2009)

Hal ini terungkap dalam artikel di Kompas (19 Mei 2009) oleh Mohammad Fajrul Falaakh yang berjudul Tumbangnya Koalisi Sembilan Parpol bahwa :

Sebanyak sembilan partai peserta Pemilu 2009 melampaui batas bawah perolehan suara (*Parliamentary Treshold* 2,5 persen dari suara sah nasional). Ada disproporsi antara kursi yang diperoleh parpol dan suara yang mendasari. Versi KPU menunjukkan perolehan kursi enam parpol "menggelembung" berkisar 30 persen, Gerindra 4 persen tetapi PKB dan Hanura menyusut. Hal ini membuktikan kelemahan sistem pemilu. Perolehan suara parpol dihitung guna menentukan *Parliamentary Treshold (PT)* dan dikonversi sebagai perolehan kursi. Akibatnya 19.048.643 suara milik parpol non-PT (17,29 persen suara sah nasional) hangus dan suara terbanyak calegnya tak berdaulat atas kursi. Ini menyumbang disproporsionalitas perolehan kursi 9 parpol atas perolehan suaranya. (Kompas, 19 Mei 2009)

BAB V

PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian di atas, peneliti berusaha melakukan simpulan sebagai berikut :

1. Analisa wacana koalisi antarpol politik terhadap ketiga pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014 direpresentasikan secara makro maupun mikro dalam artikel/opini di surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika

Secara makro, koalisi antarpol politik berarti sebagai penggabungan atau menyatunya berbagai partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya pembagian jatah kekuasaan di kabinet ataupun di parlemen atau soal pemenuhan harapan-harapan rakyat terutama kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Secara mikro, koalisi berarti dimulai dari adanya pembagian kekuasaan (*power sharing*), pembicaraan-pembicaraan politik (*lobbying*), tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*), dan sebagai pertentangan kelas dominan dan subordinate (*dominan versus subordinate*). Namun pada akhirnya adanya pertentangan kelas dominan dan kelas subordinate ini melahirkan munculnya pembagian kekuasaan (*power sharing*) kembali sehingga terjadi siklus.

2. Wacana koalisi antarpol secara pragmatis (*power sharing, power bargaining, lobbying* dan *domination versus subordinate*) direpresentasikan dalam surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika.

a. **Secara Makro** berarti koalisi antarpol politik mempunyai pengertian atau makna sebagai penggabungan atau menyatunya berbagai partai politik untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu, misalnya pembagian jatah kekuasaan di kabinet ataupun di parlemen atau soal pemenuhan harapan-harapan rakyat terutama kesejahteraan rakyat pada umumnya.

b. Secara Mikro, maksud koalisi sebagai pembagian kekuasaan (*power sharing*), tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*), Pembicaraan-pembicaraan Politik (*Lobbying*), sebagai pertentangan kelas dominan (*dominan versus subordinate*).

b.1 Pembagian kekuasaan (*power sharing*)

Pengertian pembagian kekuasaan (*power sharing*) adalah pragmatisme politik dalam pembagian kue kekuasaan. Wacana *power sharing* atau pembagian kekuasaan juga terdapat dalam kondisi dimana partai-partai besar itu sebelum adanya ijab kabul memerlukan makna sebagai pertukaran dukungan politik dengan jabatan mulai dari kursi wapres, menteri dan pejabat setingkat menteri, dirjen hingga kepala BUMN.

Sub-sub tema makna dari pembagian kekuasaan (*power sharing*) misalnya :

b.1.1. Partai-partai besar menginginkan power yang besar pula

Maksud dari partai-partai besar menginginkan power yang besar pula adalah bahwa partai-partai besar seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP dan PKS yang termasuk dalam *Parliamentary Treshold (PT)* mengharapkan dapat memperoleh jatah kekuasaan yang besar pula.

b.1.2. Partai-partai gurem (partai-partai kecil) meminta power yang cukup besar pula.

Maksud daripada partai-partai gurem (partai-partai kecil) meminta power yang cukup besar pula adalah partai-partai kecil seperti PPP, PKB dan PAN juga meminta jatah dalam pembagian kekuasaan di pemerintahan.

b.2. Tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*)

Pengertian tawar-menawar adalah upaya-upaya dari pemenang hasil Pemilu 2009 untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan kepada para parpol yang termasuk dalam koalisi partainya. Tawar-menawar ini bisa berupa kontrak tertulis yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan koalisi. Salah satu hal yang esensial diatur adalah koalisi yang tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di parlemen.

Sub-sub tema dalam koalisi antarpol secara mikro mengenai tawar-menawar kekuasaan (*power bargaining*):

b.2.1. Kelompok pemenang pemilu DPR atau Partai Terbesar membuat kontrak politik kepada para anggota koalisinya.

Maksudnya adalah kelompok SBY sebagai partai pemenang pemilu menerapkan kontrak politik sebagai dasar koalisi antar parpol dalam pemilihan capres dan cawapres, menteri, Ketua MPR/DP, dirjen-dirjen dan kepala BUMN.

b.2.2. Kelompok atau Partai Menengah (Golkar dan PDI-P) maupun Partai gurem (PKS,PPP,PKB dan PAN) menurunkan posisi tawar kekuasaannya setelah mengalami kekalahan dalam pemilu legislatif 2009.

Maksud daripada menurunkan posisi tawar kekuasaannya adalah kesadaran diri terhadap realita bahwa kelompok atau partainya berpeluang sangat kecil dalam pemilihan capres/cawapres setelah mengalami kekalahan dalam pemilu legislatif 2009.

b.3 Pembicaraan-pembicaraan politik (*Lobbying*)

Pengertian pembicaraan-pembicaraan politik (*lobbying*) adalah komunikasi yang dilakukan oleh para petinggi partai politik dalam rangka melakukan pembahasan mengenai berbagai kepentingan politik dalam hal ini adalah masalah pembagian

kekuasaan seperti penentuan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Pos-pos kementerian, Ketua DPR/MPR, dirjen, Kepala BUMN dan sebagainya.

Sub-sub tema dalam koalisi antar partai politik secara mikro mengenai pembicaraan-pembicaraan politik (*lobbying*) :

b.3.1. Sejumlah partai melakukan rapat pimpinan tingkat nasional dalam rangka menyongsong pemilu presiden.

Maksudnya adalah banyak partai politik yang melakukan rapat pimpinan tingkat nasional menjelang pemilihan capres/cawapres 2009 tujuannya adalah untuk membicarakan masalah-masalah politik dan menyatukan kesepakatan-kesepakatan partai.

b.3.2. Partai-partai besar menggalang koalisi besar dengan mengadakan komunikasi politik dengan partai-partai menengah dan partai-partai kecil

Maksud dari pengertian partai-partai besar menggalang koalisi besar dengan mengadakan komunikasi politik dengan partai-partai menengah dan partai-partai kecil adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh partai-partai besar guna memperkokoh posisinya dalam pemilihan capres/cawapres 2009.

b.4 Pertentangan kelas dominan versus subordinate (*dominasi versus subordinate*)

Maksud dari adanya pertentangan kelas dominan versus subordinate adalah kelompok besar yang mendominasi terhadap fenomena koalisi antar partai politik dan kelompok-kelompok kecil yang tersubordinat dari kelompok besar tersebut.

Sub-sub tema dalam pertentangan kelas dominan (*dominasi versus subordinate*) :

b.4.1. Partai Terbesar atau pemenang pemilu legislatif 2009 mendominasi partai-partai lainnya

Maksud dari pengertian partai terbesar atau pemenang pemilu legislatif 2009 mendominasi partai-partai lainnya adalah bahwa Partai Demokrat mendominasi dalam koalisi partai politik guna pemilihan capres/cawapres 2009.

b.4.2. Wacana pertentangan kelas dominan versus subordinasi tampak juga dalam pemilihan cawapres.

Maksud dari pengertian adanya wacana pertentangan kelas dominan versus subordinasi dalam pemilihan cawapres adalah pertentangan-pertentangan yang terjadi antara Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu terhadap partai-partai politik lainnya dalam memilih pendampingnya dalam pemerintahan nantinya

b.4.3. Partai-partai politik yang termasuk dalam *Parliamentary Threshold (PT)* mendominasi kekuasaan terhadap partai-partai politik yang tidak termasuk dalam *PT*.

Maksudnya adalah adanya pendominasian kekuasaan antara partai-partai politik yang termasuk dalam *Parliamentary Threshold (PT)* terhadap partai-partai politik yang tidak termasuk dalam *PT*.

2. Implikasi

Adapun implikasi atau konsekuensi logis dari simpulan penelitian dapat berupa :

- a. Bersifat teoritis (sebagai pengaya khasanah ilmu)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala pemikiran ilmiah bagi kalangan dosen, peneliti, mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya yang

concern pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan koalisi antar partai politik di Indonesia

b. Bersifat praktis (Konsekuensi dalam kegiatan konkret di lapangan)

Hasil penelitian ini berupaya untuk mengungkap makna yang tersembunyi dalam artikel-artikel yang berkaitan dengan koalisi antar partai politik dalam Pemilu Presiden 2009 yang dimuat dalam ketiga media massa bertaraf nasional yaitu Kompas, Media Indonesia dan Republika mulai dari bulan April sampai dengan Mei 2009.

3. Saran

Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia "tidak ada gading yang tak retak" yang berarti tidak ada manusia dan tidak ada hasil karya yang sempurna. Karena adanya ketidaksempurnaan tulisan ini, walaupun sudah dioptimalkan sedemikian rupa tetapi kami yakin masih banyak kesalahan-kesalahan yang ada. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari para pembaca dan kaum intelektual (dosen, mahasiswa maupun masyarakat ilmiah pada umumnya).